

## **BAB V**

### **WACANA DAN RESPON SANTRI PEREMPUAN TENTANG POLITIK**

#### **5.1. Wacana tentang Politik**

Melihat situasi dan wacana politik yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini (saat awal reformasi) politik cenderung dimaknai sebagai hal yang kotor, kejam dan cenderung pada tindakan anarkis. Demi politik, seolah-olah segala sesuatu dihalalkan. Bohong, tidak manusiawi, tidak adil, bahkan perampasan hak asasi manusia dianggap hal yang wajar.

Dunia politik yang begitu keras, menyebabkan selalu diidentikkan sebagai dunia laki-laki, karena sesuai dengan sifat maskulin yang didominasi laki-laki. Struktur sosial masyarakat juga menganggap laki-laki merupakan faktor politik yang menentukan dan perempuan bisa mewakili aspirasi politik kepadanya. Sementara perempuan yang dikonstruksikan lemah, takut terhadap kejadian yang kasar, keras dan mengerikan dinilai tidak cocok untuk menjadi aktor politik, karena minat serta kepentingannya terbatas pada domain privat. Sehingga perempuan hanya dijadikan alat politik dan pelengkap untuk mendapatkan suara.

Padahal, keputusan politik sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan, bahkan pada persoalan-persoalan tersembunyi mengenai kaum perempuan. Pemahaman politik seperti ini semakin melekatkan stereotip bahwa perempuan terpisah dari kehidupan politik dan memperkuat dominasi laki-laki terhadap perempuan, sehingga seperti dikatakan oleh Sylvia Walby bahwa kontrol yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan

terjadi di berbagai bidang kehidupan, karena laki-laki menganggap dirinya sebagai superior dan perempuan adalah bagian dari milik laki-laki.<sup>26</sup>

Berdasarkan wajah politik yang dinampakkan pada tataran riil yang ada di masyarakat tersebut, bagaimana santri perempuan memaknai konsep politik? Ternyata dua orang mahasiswa Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang ini, juga mengatakan bahwa politik itu ekuivalen dengan kekerasan dan keegoisan, serta hal keduniawian.

Politik itu saya lihat **kesannya negatif**. Orang-orang yang bergerak di bidang politik itu saling aduh omonganlah, sifatnya lebih ke duniawilah. Jadi apapun yang dilakukan yang penting menang. Kita yang nggak ngerti apa-apa kan yang jadi korban  
(Nia, Undar)

Politik itu **identik dengan kekerasan**, trus yang ada cuman keegoisan mementingkan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak.  
(Ima, Undar)

Realitas politik sering kali menunjukkan realitas keberpihakan. Seperti ditulis John Maccionis, politik berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Bahkan menurut Marx, "...politik memegang peranan tertinggi sementara negara hanyalah sebuah panitia yang mengelola kepentingan kaum berkuasa secara menyeluruh" (Budiman, 1997: 56).

Dalam kehidupan riil, paradigma politik akan menentukan pada siapa, atau kelompok mana, realitas politik berpihak. Realitas politik negara-negara kapitalis misalnya, cenderung berpihak pada kaum borjuis, para pemilik modal; sebaliknya di negara sosialis, realitas politik merupakan representasi kepentingan kaum pekerja, atau di negara feodal

<sup>26</sup> Virginia Sapiro. *The Political and Integration of Women*, Routledge, 1983. hal. 45

cenderung mengadaptasi kepentingan kaum bangsawan. Jarang sekali bahkan hampir tidak ada realitas politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat.

Kultur politik yang eksploitatif dan diskriminatif ini kemudian menampakkan wajah politik ke hadapan publik sebagai dimensi aktivitas yang sangat maskulin, keras, tidak ramah kepada kaum perempuan. Kesan ini belum terhapus, bahkan menjadi palang pintu bagi perempuan yang hendak memasuki dunia politik. Ditambah lagi dengan panggung politik yang selama ini selalu diwarnai dengan permainan untuk merebutkan kekuasaan dan jabatan, sehingga politik menjadi wajah yang menakutkan bagi perempuan. Seperti dikatakan mahasiswa dari Undar dan Unipdu (Universitas Pesantren Darul Ulum).

Politik itu kan **cuma nyari kursi, jabatan**, nggak pernah mikirin rakyatnya seperti apa, mungkin dia cuma di atas enak-enak, nggak pernah mikirin aspirasi masyarakat seperti apa. Politik itu kan dunia gelap, mesti duit yang main, *money politics* selalu ada. (Ika, Undar)

Tahu sendirilah orang yang di dunia politik itu **selalu berebut uang, jabatan**. Ya siapa sih yang nggak silau kalau dapat uang dengan mudah, tanpa harus banting tulang. (Atik, Unipdu)

Sulit dipungkiri, memang terdapat hubungan interkorelasi yang sangat kuat antara "kekuasaan" dan "uang". Pada satu sisi, uang dapat merupakan salah satu sumber (*source*) dari *power* (kekuasaan). Namun pada sisi lain, kekuasaan juga dapat "memproduksi" uang. Di negara-negara maju, di mana secara relatif telah tercipta tatanan kehidupan politik yang demokratis, uang lebih difungsikan sebagai sarana untuk mendapatkan kekuasaan politik. Namun untuk Indonesia, korelasi

keduanya terjadi, yakni *money politics* dilakukan untuk mendapatkan *power*, dan setelah kekuasaan itu diraih maka beralih fungsi sebagai mesin penghasil uang.

Secara historis, hubungan interkoneksi antara kekuasaan dan uang tersebut terlihat semakin transparan, ketika sistem merkantilis mulai diperkenalkan dalam kehidupan manusia, yang antara lain telah memosisikan uang sebagai alat tukar universal. Akibat dari ini semua, maka nilai tiap komoditi (termasuk kekuasaan) cenderung dinilai dan "diperjual-belikan" berdasarkan uang.

Tapi, meskipun politik itu sering kali dimaknai sebagai hal negatif, namun perempuan tidak boleh menutup mata terhadap wacana politik yang berkembang tetap harus tahu perkembangan politik supaya dia tidak menjadi korban dalam permainan politik. Hal ini diungkapkan oleh informan yang pernah menjadi santri seorang kiai Tambakberas yang aktif di dunia politik.

Politik itu kan **kotor**, kalau menurut aku. Ya memang kalau kita nggak mengikuti dunia politik, kita nanti ketinggalan. Sebenarnya politik itu kan membodohi orang yang nggak tahu, ngomongnya kalau di depan itu gini, tapi kan kenyataannya yang dilakukan kan udah beda. Jadi menurut aku politik itu udah nggak sesuai dengan apa yang ada, realitanya, orang ya dibingungkan dengan politik itu  
(Fia, Undar)

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Lilik, mahasiswi Staibu yang juga menjadi santri di pesantren Latifiyah I Tambakberas.

Politik itu bukan sesuatu yang tabu untuk diketahui. Sekarang orang sudah biasa untuk mengetahui dan belajar tentang politik. Apalagi di era keterbukaan seperti saat ini, penting sekali untuk punya wawasan politik. Meski sebenarnya dunia politik saya

nggak suka, **dunia gelap**, karena idealisme apapun akan luntur ketika seseorang masuk di dalamnya. Dulu ada aktivis PMII yang masuk Golkar. Ketika ditanya kenapa masuk ke partai tersebut? Katanya ingin mewarnai di situ, tapi ternyata justru tidak mewarnai malah diwarnai.  
(Lilik, Staibu)

Dalam tataran politik, Indonesia memang terpuruk dalam jerat konfliktual ala Karl Marx dan melupakan bahwa hidup bersama dalam masyarakat politik dituntut pula perlunya sikap konsensus sebagaimana dicita-citakan Emile Durkheim. Dalam kenyataan yang kasat mata terbaca oleh rakyat, masyarakat politik yang didominasi oleh para elit politik rupanya lebih suka terlibat dalam konflik, bukan demi memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan. Orientasi politik di negeri ini dalam diri para elite politiknya tidak lebih dari sekadar perebutan kekuasaan (*power struggle*) demi kenikmatan *status-quo*.

Pertikaian-pertikaian politik yang ujung-ujungnya mengaburkan semangat demokrasi di negeri ini semakin meyakinkan kita betapa para elit politik selama ini lebih dijiwai "model konflik"-nya Karl Marx. Akibatnya mereka selalu mengedepankan kontradiksi dan konflik sosial. Dan realitas sosial yang seperti ini telah menjadi tontonan yang tidak asing bagi publik, sehingga dalam pemikiran mereka politik itu sebagai hal yang negatif.

Dari wacana politik di atas, image politik digambarkan sarat akan kesemuan, serta aksi politik yang padat ketakutan dan minim demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Namun demikian ada juga santri yang melihat politik itu dari kaca mata yang positif. Politik dimaknai sebagai aturan main yang berkaitan dengan negara (*state*) dan kekuasaan (*power*),

oleh dua mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Bahrul Ulum (Staibu) Tambakberas.

Politik itu ya **ilmu** yang mempelajari tentang seluk beluk **ketatanegaraan** dan kepemimpinan suatu negara, pemerintahan suatu negara.  
(Susi, Staibu)

Politik itu **aturan main** untuk menggunakan kekuasaan yang kemudian dibingkai dalam suatu sistem yang namanya negara. Jadi kalau kita mau main di situ kita harus tahu aturan mainnya.  
(Nisa', Staibu)

Ketika politik dikaitkan dengan negara, maka inti dari politik adalah lebih pada lembaga-lembaga kenegaraan. Menurut Roger F. Soltau (1961:4) dalam *Introduction to Politics* bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan tersebut. Dan politik juga mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, seperti yang dikatakan oleh J. Barent (1965:3).

Berbeda dengan Harold D. Laswell dan A. Kaplan (1964:24) dalam *Power and Society*, memandang politik sebagai ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Deliar Noer (1965: 56) dalam *Pengantar ke Pemikiran Politik* menyatakan bahwa ilmu politik memusatkan perhatiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata, dan tidak pula pada negara yang tumbuh dalam sejarah hidup manusia yang relatif baru. Di luar bidang hukum, serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada. Hanya dalam zaman modern memang kekuasaan berhubungan

erat dengan negara.<sup>27</sup> Sehingga tidaklah heran jika kemudian Nisa' memaknai kekuasaan sebagai hasil politik.

Kekuasaan itu hasil dari permainan itu, hasil dari politik itu. Kalau kita sudah bisa memainkan politik dengan cara kita mungkin, walaupun bagaimanapun itu caranya maka kekuasaan itu yang akan kita dapatkan.  
(Nisa', Staibu)

Ada juga informan yang mengatakan bahwa politik itu tidak hanya dalam tataran negara saja. Ini terkait dengan *personal is political*, bahwa segala hal yang berkaitan dengan kehidupan privat sekalipun tidak terpisah dari kedinamisan kekuasaan yang merupakan bagian dari fenomena politik. Hal ini dikatakan oleh seorang santri yang kuliah di Institut Ke-Islaman Hasyim Asy'ari (Ikaha) Tebuireng.

Politik itu sebuah **aturan**, tidak hanya dalam konsep berbangsa dan bernegara saja, tapi dalam hal yang kecil pun juga ada politik.  
(Izzah, Ikaha)

Politik memang mempunyai warna yang sangat beragam, dan itu juga ditentukan oleh aktor politik dan persepsi orang dalam memandang politik itu sendiri. Politik bisa dalam arti yang positif dan negatif tergantung masing-masing orang atau aktor politik dalam memaknainya, seperti yang diungkapkan oleh informan yang menjadi Ketua Komisariat PMII di lingkungan Ikaha.

Politik itu **persaingan untuk mendapat kekuasaan**, artinya persaingan yang mana tergantung kita yang menilai, kalau kita memandang itu sehat maka persaingan itu pun sehat jadinya. Tapi kalau kita sudah punya pemikiran politik itu sudah

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, cet. Ke-25, 2003, hal. 9-10

menjurus ke ide-ide, nilai-nilai yang yang *negatif thinking* maka akhirnya hasilnya pun akan negatif. Jadi tergantung pada persepsi awal kita, kalau kita memandang positif maka hasilnya pun akan positif.  
(Ka'e, Ikaha)

Oleh karena itu informan juga memaknai kekuasaan sebagai hal yang positif. Kekuasaan itu akan didapat seseorang sesuai dengan ihtiar yang dilakukan. Karena orang atau kelompok yang ingin mencapai kekuasaan mutlak setidaknya harus memenuhi ketentuan dan penguasaan atas kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*) dan kepandaian (*skill*)<sup>28</sup>. Tidak harus bermain kotor dan merampas hak orang lain untuk mendapatkannya.

Kekuasaan bagi saya itu sesuatu yang memang harus kita peroleh dengan jalan yang betul-betul pantas untuk didapatkan. Artinya kekuasaan itu tidak harus dengan mengorbankan orang lain supaya kita memperoleh kekuasaan itu  
(Ka'e, Ikaha)

Secara tidak langsung dia menekankan pentingnya bersifat positif dalam melihat sesuatu, termasuk berbagai tindakan atau perilaku aktor politik. Karena persaingan dalam politik pun bisa jadi suatu tindakan yang positif kalau persaingan itu dilakukan secara *fair* bukan dengan penuh intrik yang menjatuhkan. Hal senada juga dikatakan oleh informan yang sekarang menjabat sebagai ketua BEM di Psikologi Undar yang menginginkan adanya kedewasaan dalam berpolitik, dengan membingkai politik itu dalam frame yang positif.

Kalau dari pengalaman saya, politik itu macam-macam. Dalam pendekatan pun perlu politik, dalam pengembangan program juga perlu politik, yang jelas politik itu kan juga **kembali ke**

<sup>28</sup> Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* el-Kahfi. Jakarta. 2004, hal. 40



**orangnya.** Ada memang politik itu yang tujuan dari awalnya nggak baik, politiknya bagaimana dia nanti bisa jatuh dan kita bisa masuk ke sana. Kadang kadang saya baca seperti itu, kalau politik yang seperti itu saya kurang sepakat. Kalau katanya musyawarah itu harus menghormati pendapat orang lain, ternyata di situ itu nggak. Politik seperti itu kan kurang dewasa. Kalau harus saling menjatuhkan nggak akan damai.  
(Een, Undar)

Berbagai makna politik yang diungkapkan dalam penelitian ini tidak lepas dari tampilan realitas politik, serta konstruksi sosial dan budaya patriarki yang telah lama hidup dalam masyarakat. Selama ini masyarakat disugahi dengan cara-cara politik yang penuh kelicikan, strategi-strategi politik yang sarat kecurangan, maksimum intimidasi, minimum demokrasi, maksimum distorsi dan minim informasi, maksimum korupsi dan minim koperasi. Sehingga politik bukanlah sebuah wacana yang di dalamnya tercipta semangat demokrasi yang dinamis, tetapi sebuah wacana yang penuh dengan intrik, konspirasi, kekerasan dan KKN.

Dominasi budaya patriarki, membuat perempuan disingkirkan dari kehidupan publik (politik). Kriteria manusia normal dipandang dari kaca mata laki-laki. Cara berpikir biner patriarkis, yang memposisikan si kuat menentukan kehidupan si lemah menghasilkan cara pandang kehidupan dalam segala aspek. Pandangan ini mempengaruhi Aristoteles (1972:28) dalam memahami politik, yang dinyatakan sebagai pandangan politik klasik. Aristoteles membuat dikotomi antara urusan bersama atau kepentingan publik dan kepentingan individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Pandangan dikotomis pada perkembangannya, seperti yang dinyatakan oleh Samuel P. Huntington (1975), kepentingan publik secara

singkat dikatakan sebagai kepentingan pemerintah, karena lembaga pemerintah dibentuk untuk menyelenggarakan kepentingan bersama. Namun pandangan klasik ini sangat kabur, sehingga kemudian pengertian politik diperjelas dengan melembagakan politik.

Max Weber (1961) merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara berhasil memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dan dalam wilayah tertentu. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa kemudian masyarakat menganggap negara adalah penguasa. Walaupun pengertian politik dikembangkan terus untuk mengatur kehidupan dengan semakin baik, misalnya dengan konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesque, tetapi kalau masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok masyarakat yang dikategorikan lemah, maka akan terus menghasilkan suatu relasi yang tidak adil, korup, manipulatif serta bersifat vertikal, dan perempuan akan berada pada pihak yang subordinat.

Pemahaman politik yang didasari pada cara pandang biner patriarkhis, akhirnya menciptakan suatu wacana politik yang lebih bersifat negatif dari pada wacana politik yang bersifat positif. Karena sebenarnya warna politik (baik buruknya politik) tergantung pada aktor-aktor yang bermain di dalamnya, bukan suatu hal yang *given* bahwa politik itu cenderung negatif. Sebagaimana dalam penelitian ini, perempuan menganggap sebagai dunia yang kotor, gelap, kejam, kekuasaan yang cenderung negatif dan strategi-strategi untuk membuat suatu

kebijakan/*policy*. Dengan meminjam istilah Yasraf Amir Piliang (2001: 80) – bahwa sistem politik yang berkembang selama ini semacam *horrocracy*<sup>29</sup>.

Sehingga akhirnya ranah politik dianggap perempuan sebagai dunia laki-laki. Karena laki-laki sejak awal atau sejak zaman purba dianggap biologisnya lebih bebas dibanding keadaan biologis perempuan. Di mana laki-laki pergi berburu dan menangkap hewan, sedangkan perempuan secara biologis hamil, melahirkan, menyusui dan tinggal di tempat yang aman untuk memelihara kehidupannya.

Meskipun dalam penelitian ini masih berkembang wacana politik yang bermuatan negatif. Tetapi masih ada suatu harapan ke depan bahwa pada saatnya akan ada politik yang lebih dewasa, dan menggunakan politik itu untuk *amar ma'ruf nahi munkar* dan untuk kemaslahatan ummat.

## **5.2. Respon Terhadap Isu-isu Politik**

### **5.2.1. Kuota 30 Persen bagi Perempuan di Legislatif**

Diskursus kiprah perempuan dalam kancah politik di negeri ini telah bergulir deras. Lewat UU 12/2003 telah mencantumkan ketentuan kuota. Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan, "Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen." Dilansirnya undang-undang tersebut dianggap sebagai gerbang masuk bagi partisipasi kaum perempuan secara lebih terbuka, tapi masih dinilai banyak pihak

<sup>29</sup> Sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi terletak pada sebuah kekuatan yang mereproduksi dirinya melalui cara-cara kekerasan, teror dan prinsip ketakutan

lebih sebagai retorika yang tidak sepenuh hati, dan dirasa lebih beraroma janji daripada sebuah jaminan politik yang penuh kepastian. Karena ketentuan kuota tersebut bukan satu-satunya yang bisa menjadi pegangan harapan.

Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam lembaga legislatif pada kenyataannya tetap sangat tergantung pada parpol yang selama ini masih didominasi oleh kaum Adam dengan kultur patriarkinya. Tentunya mereka tidak akan begitu saja membagikan kue kekuasaan yang selama ini mereka nikmati. Ditambah lagi, tak sedikit kalangan yang masih berusaha kembali membuka katup kontroversi yang senantiasa mempertanyakan adanya kuota tersebut. Kelompok perempuan sepenuhnya belum bisa menerima ihwal keraguan terhadap mutu dirinya. Kualitas, salah satu hal yang selama ini banyak menimbulkan keraguan beragam kalangan pada diri perempuan, meskipun itu tidak bisa dijadikan ukuran tunggal dan sepihak dalam melihat sosok perempuan. Hal ini diungkapkan oleh seorang mahasiswa Ikaha yang juga menjadi ketua keamanan di pondoknya.

Kalau mau melihat dari presentase ya itu sangat sedikit sekali ya kita bermain, tapi kembali lagi kepada SDM perempuan itu sendiri, itu sudah sedikit **memberi kesempatan kepada perempuan** bagaimana kita sudah mendapat 30% itu ya, kita sudah diberi jalan untuk mewarnai partai, nuansa politik itu sendiri. Kalau itu benar-benar dilaksanakan, saya rasa sebagai awal yang bagus. Tapi lagi-lagi yang terhambat untuk mencapai kuota 30% itu perempuan sendiri yang tidak bisa untuk berkembang, berkembang dalam artian SDMnya, bukan kuantitas orangnya.

(Ka'e, Ikaha)

Dalam buku *Symbols and Society*, Thomas Jefferson (1972) pernah mengatakan, *"the only weapons by which the minority can defend*



*themselves (againts) those in power are the forms and rules of proceeding which have been adopted and became the law of the house.*" Dari paparan Jefferson di atas, bisa ditarik scuntai benang merah bahwa kesadaran dan rasa patuh terhadap aturan, lebih penting dan utama daripada materi peraturan itu sendiri. Artinya, dalam kerangka ini, terlepas apakah soal mutu perempuan harus dijadikan tolok ukur standar atau tidak, jika perempuan ingin lebih dihargai oleh publik, maka ia mesti berbuat dan sadar akan eksistensi dan segenap kemampuannya. Dari situ, mereka akan terpicu untuk membuktikan bahwa perempuan (pada kenyataannya) bisa menentukan sendiri nasibnya, tanpa menggantungkannya pada pihak lain.

Namun karena segi kualitas yang masih minim membuat salah seorang santri Tambakberas, tidak setuju dengan sistem kuota tersebut. Karena ketika kuota itu ada maka kualitas perempuan pada tataran *grass root* pun harus bagus, bukan hanya pada tataran elit saja. Sehingga nilai sebuah pemberdayaan itu menjadi penting bagi perempuan.

Kalau melihat kualitas perempuan kayaknya **nggak perlu**. Kan gini... saya pikir orang-orang yang menginginkan kuota itu orang-orang yang bener bener secara wacana... orang yang atas-atas itu memang pintar, punya kemampuan, punya uang dan semacamnya. Tapi ketika melihat kenyataan di bawah berapa persen sih yang ngerti politik, mungkin harus dilakukan pemberdayaan dulu lah.  
(Lilik, Staibu)

Apabila selama ini ada anggapan minor seputar permintaan tambahan kuota politik dari kalangan perempuan - yang menganggap secara kualitatif, memang perempuan berada di bawah kaum lelaki - mereka harus memberikan bukti dan jaminan yang kuat bahwa mereka memang benar benar bisa diandalkan. Tak hanya banyak dalam angka-

angka kuantitatif. Jika perempuan akhirnya tak bisa memberikan kontribusi dan tak mampu berbuat banyak, maka dengan sendirinya kepercayaan terhadap mereka akan menurun dan hilang. Sebaliknya, jika perempuan mampu menyodorkan bukti yang meyakinkan, niscaya simpati dan pengakuan publik akan datang tanpa diminta.

Dalam konteks ini, perempuan tak cukup sekadar menuntut adanya upaya pemahaman (dalam bahasa Max Weber dikenal dengan *verstehen*) dari kalangan di luar dirinya, sehingga ia diposisikan sebagai sang lain (*the others*) yang layak dirangkul. Di luar itu, perempuan juga harus mampu memberikan koreksi, kritik ke dalam, serta pematangan dalam membentuk sang diri (*self*) lewat gelaran interaksi sosial, dialog serta perbenturan wacana yang kreatif-progresif.

Dengan demikian, antara pihak perempuan dan lingkungan luar (kaum pria), akan mudah terbentuk komunikasi dan kesalingpahaman (*mutual understanding*) yang positif, berbobot, saling isi dan mencerahkan. Selanjutnya, akan terjalin apa yang disebut sebagai tegur sapa dinamis (*dialogisme*), dan bukan komunikasi searah yang cenderung sepihak (*monologisme*).

Namun begitu, kemampuan (kualitas) semata tak cukup. Ia harus ditopang oleh longgarnya ruang kesempatan bagi partisipasi politik kalangan Hawa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Khofifah Indar Parawansa<sup>30</sup> bahwa "Tanpa keterlibatan perempuan tidak akan ada demokrasi dan keadilan. Ini prinsip kenapa kita memperjuangkan kuota 30 persen tersebut. Masalah ini telah menjadi kesadaran di hampir semua

<sup>30</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 5 Februari 2003

negara yang menginginkan kehidupan demokrasi' secara sehat di negaranya. Bahkan beberapa negara menerapkan kuota tidak hanya di parlemen, tetapi juga di eksekutif." Pada aras demikian, tersedianya media yang representatif serta kesempatan yang memadai yang pada akhirnya akan mampu menggayungsambuti bakat, minat serta kemampuan perempuan untuk terjun membuktikan diri layak berkiprah di kancah politik.

Lebih dari itu, untuk memperoleh kualitas, perempuan perlu digembleng lewat sistem pendidikan, kaderisasi serta lebih-lebih media promosi yang memadai. Karena selama ini perempuan berada pada posisi yang marginal, sehingga tak heran kalau aksesnya untuk memperoleh pendidikan yang layak masih sangat minim. Sehingga ke depan tak akan ada lagi kuota yang tidak terpenuhi. Hal ini dilansir oleh seorang mahasiswa Staibu yang saat ini juga aktif mengajar di pondok pesantrennya.

Sebenarnya seneng sekali ketika **perempuan dikasih kesempatan** seperti itu, bahkan sebenarnya nggak harus dibatasi seperti itu, siapapun kalau misalnya perempuan itu lebih berkapabilitas, punya kemampuan, berpotensi untuk duduk di legislatif, kenapa nggak? Namun ternyata, dibatasi 30 itu kan nggak mencapai, karena SDM perempuan nggak mencapai angka itu. Dan itu juga kesalahan sistem yang mendiskriminasikan atau memarginalkan perempuan dalam hal pendidikannya. Sehingga ketika pemerintah memberikan kuota 30% kan kuota itu belum bisa terpenuhi.

(Nisa', Staibu)

Menurut Drude Dahlerup<sup>31</sup> sistem kuota kemudian dianggap sebagai sebuah alternatif yang mampu menggambarkan lompatan kualitatif ke suatu kebijakan mengenai cara dan tujuan yang pasti. Karena efisiensinya yang relatif, maka melalui sistem ini besar harapan akan ada peningkatan atas representasi perempuan dalam bidang politik. Ani Sucipto<sup>32</sup> menambahkan bahwa ide dasar kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak terisolasi dalam kehidupan politik.

Sistem kuota dibangun sebagai *gender neutral*, yang berarti bahwa kuota bertujuan mengoreksi kurang terwakilinya perempuan dalam dunia parlemen, melihat akses perempuan hasil pemilu 1999 menurut Chusnul Maryah<sup>33</sup> kuota diperlukan dalam setiap partai politik. 32% untuk jangka waktu dua kali pemilu atas keterwakilan perempuan. Ia mengambil contoh negara Norwegia yang memiliki 35,5% wakil perempuan diparlemen/*Unicameral* atau Australia di *Lower House* diwakili sekitar 12,5% dan *Upper House* 25%. Melalui kuota ini diharapkan perempuan mampu mengakses wilayah politik praktis ini dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga kepentingan perempuan dan sensitifitas gender dalam proyek proyek pembangunan lebih tersentuh. Sebagaimana dikatakan oleh dua orang mahasiswa Undar, Fia, seorang mahasiswa yang aktif di HMI dan Indah, aktifis FMN (Front Mahasiswa Nasional).

<sup>31</sup> Drude Dahlerup. *Menggunakan Kuota untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan dalam Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*, Yayasan Jamal Perempuan, Jakarta. 1999. hal 85

<sup>32</sup> Ani Sucipto. *Perempuan Indonesia di Parlemen* dalam Luluk Nurhamidah (pengantar) *Perempuan dan Kekuasaan*. Pengurus besar Korps PMII Putri, Jakarta. 2000

<sup>33</sup> Chusnul Maryah. *Urgensi Kuota Perempuan Dalam Parpol* dalam Parianom, Bambang dan Ariessianto, Dondy (Ed) *Megawati dan Islam, Polemik Gender dalam Persuasion Politik*, PT. Antar Surva Jaya dengan LSK Surabaya. 1999



Kalau menurut saya itu wajar-wajar saja, untuk **mengangkat masalah perempuan**. Mungkin kalau menurut saya jika keputusan itu juga bagus untuk mengangkat masalah-masalah perempuan, karena selama ini permasalahan perempuan ketika ditangani oleh seorang laki-laki itu kurang tahu permasalahan perempuan itu sejauh mana. Jadi mungkin kalau ada kuota 30% itu bagus untuk mewakili wanita.

(Fia, Undar)

Ya nggak papa sih **setuju aja**. Ya mungkin dengan itu bisa **menyuarakan suara wanita**. Saat ini kan banyak sekali kejadian di Indonesia wanita tertindas, seperti TKI itu. Kenyataannya kasus-kasus TKI kan nggak ada yang selesai, trus masalah kekerasan terhadap wanita seperti pemerkosaan. Mungkin nanti itu bisa terselesaikan.

(Indah, Undar)

Sistem kuota telah menjadi sebuah mekanisme yang penting untuk meraih peningkatan keterwakilan perempuan di dalam proses-proses politik, serta sebagai sebuah sarana untuk menjamin agar kepentingan-kepentingan politik perempuan tetap disuarakan dan diwakili. Pemberlakuan kuota atau strategi-strategi langkah afirmatif merupakan bagian tak terpisahkan dari serunya perdebatan mengenai pengembangan sebuah sistem politik yang demokratis dan dibangun di atas azas utama kesetaraan gender. Tuntutan pemberlakuan kuota adalah bagian integral dari tuntutan yang lebih besar mengenai hak-hak bagi perempuan di dunia politik. Mengapa isu-isu politik begitu penting bagi perempuan? Itu tak lain karena perempuan adalah bagian terbesar/mayoritas dari negeri ini, sedangkan hak-hak mereka sebagai warga negara yang sah belum mendapatkan perhatian yang selayaknya, di samping mereka terus-menerus dipinggirkan (dimarginalkan) di dalam proses-proses pembuatan keputusan.

Secara keseluruhan, proporsi perempuan dalam dewan legislatif sangat sedikit. Pertanyaannya adalah mengapa dan apakah itu menjadi masalah? Mengapa harus jadi masalah; perbedaan apa yang akan muncul bilamana perempuan ada di dewan legislatif dan lembaga pemerintahan lainnya? Bagi Izzah, mahasiswa yang sekarang menjabat sebagai Bendahara BEM fakultas Tarbiyah Ikaha ini mengatakan bahwa adanya perempuan di legislatif maka kepentingan perempuan akan lebih diperhatikan dalam membuat sebuah kebijakan, meskipun minimnya SDM perempuan itu masih jadi kendala untuk memasuki dunia politik.

Saya sangat-sangat sepekat sekali, karena apa? Ketika kebijakan itu ada kan berarti **memberikan peluang pada wanita** di legislatif. Kita kan negara demokrasi, otomatis pengambilan sebuah keputusan itu kan akhirnya suara terbanyak. Ketika wanita nanti keterwakilan wanita di legislatif itu sedikit, otomatis kepentingan kita, hak-hak kita ya percuma saja kalau disuarakan 1 atau 2 orang. Namun yang masih menjadi permasalahan ketika ada kuota tersebut ternyata SDM wanita masih minim, akhirnya kepercayaan wanita terhadap wanita sendiri jadi minim.

(Izzah, Ikaha)

Penting untuk dipahami bahwa isu keterwakilan perempuan di legislatif tidak hanya mengenai jumlah saja. Tapi bagaimana kebijakan dan hukum dibuat merupakan kebijakan yang sensitif gender serta memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan diharapkan lebih berfokus pada isu-isu keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia, maka representasi perempuan, termasuk pengalaman serta perspektif mereka dalam proses pengambilan keputusan akan mengarah pada solusi yang lebih sesuai dan memenuhi harapan bagi lingkup masyarakat luas.

Itulah sebabnya mengapa perempuan harus menjadi bagian dari proses itu dan mengapa posisi perempuan di legislatif menjadi penting.

Bagi Izzah, perempuan yang di legislatif selama ini sudah cukup berusaha semaksimal mungkin di legislatif, meskipun dia menyayangkan isu kuota yang ditentang oleh seorang *first lady* seperti Megawati.

Mungkin saya kira untuk di legislatif itu perempuan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan kebijakan yang sensitif gender, kayak Khofifah atau Aisyah Amini. Tapi saya sendiri menyayangkan Bu Mega sendiri, kenapa pas waktu adanya kuota 30% itu nggak sepakat.  
(Izzah, Ikaha)

Menghasilkan suatu *policy* yang sensitif gender merupakan tantangan tersendiri bagi perempuan. Patriarki, subordinasi perempuan, dan persepsi terdalam bahwa *public domain* (wilayah publik) diperuntukkan bagi laki-laki dan bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah, itu semua menyingkirkan kalangan perempuan – meskipun hak-haknya dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris.

Di saat sistem dan tradisi politik kita telah bisa menerima kehadiran perempuan secara layak, maka dengan sendirinya kesadaran perempuan untuk unjuk kemampuan akan semakin tinggi. Sehingga pada akhirnya, parpol yang emoh terhadap kiprah perempuan akan semakin kehilangan simpati publik. Paling tidak simpati sebagian besar masyarakat perempuan yang jumlahnya lebih banyak dari kaukus pemilih lainnya. Di samping itu, segala ihwal dan kebijakan yang tetap meminggirkan peran perempuan, akan kian kritis dipertanyakan. Sebagaimana mahasiswa Unipdu asal

Magetan ini yang mempertanyakan kenapa kuota perempuan cuma 30 persen? Padahal bagi dia kualitas perempuan tak kalah dengan laki-laki.

Saya **kurang setuju**, kenapa perempuan kok cuma dihargai 30% setidaknya kita kan punya hak yang sama dengan lelaki. Kita punya kuota 100% nggak masalah untuk kita. Saya nggak setuju dengan kuota 30% itu, kayaknya kita hanya dihargai segitu kemampuan kita.  
(Nana, Unipdu)

Nana kecewa dengan penghargaan kualitas perempuan yang dilihat sebelah mata. Padahal selama ini perempuan telah menjadi lumbung suara (*vote-getter*) pada setiap pemilu. Untuk itu bagi Nia, mahasiswa Undar yang aktif di PMII menginginkan bahwa dengan sistem kuota tersebut perempuan bisa menunjukkan kapasitasnya, dan menyumbangkan kontribusi bagi wacana demokrasi.

Setuju dengan sistem kuota tersebut, bagus. Kalau kita nggak begitu kan disepelekan. Padahal kebanyakan perempuan-perempuan itu pintar. Cuma nggak ada kesempatan aja. Dengan dikasih seperti itu bisa **nunjukin kemampuannya**.  
(Nia, Undar)

Kuota perempuan di legislatif merupakan salah satu upaya meningkatkan keterwakilan perempuan melalui gagasan yang dikenal dengan *afirmatif action*. Afirmatif action di sini diartikan sebagai kegiatan proaktif yang bersifat sementara untuk mengatasi kesenjangan sehingga kelompok minoritas bisa berkompetisi secara adil. Afirmatif action lebih luas dari sekedar kuota. Ada jangka waktu yang diterapkan, berapa lama kesetaraan itu dapat tercapai. Bukan sekedar perimbangan jumlah tetapi lebih pada kesetaraan. Afirmatif action selain berbentuk kuota, bisa juga

pemberian kesempatan yang sama atau kebijakan lain yang non diskriminatif.

Afirmatif action tidak identik dengan kuota, karena sering dikritik memberikan jatah tertentu kepada perempuan tanpa mempertimbangkan kualifikasi perempuan. Tetapi di sini kesempatan itu diberikan kepada perempuan dengan mementingkan adanya kualitas. Afirmatif action yang berbentuk kuota dapat diadopsi secara sukarela maupun diharuskan. Jadi kebijakan ini bukan kebijakan yang aneh, karena banyak negara-negara didunia yang telah menerapkan afirmatif action dalam bentuk kuota ini untuk mempercepat jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga pengambil kebijakan.

### 5.2.2. Pemilu

Salah satu ciri yang melekat dalam negara yang demokratis adalah dilaksanakannya pemilu. Demokrasi memiliki prinsip bahwa pejabat harus dipilih dan diganti melalui proses kompetisi yang adil dan damai. Istilah demokrasi bukanlah hal yang asing di telinga masyarakat. Setelah perang dunia II, negara-negara Liberal seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa maupun negara sosialis di Eropa Timur sama-sama menggunakan istilah demokrasi. Di Indonesia pun rezim yang berlaku pada suatu masa disebut demokrasi. Mulai dari Demokrasi Liberal tahun 1950-an, Demokrasi Terpimpin pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, dan setelah itu sampai sekarang disebut dengan masa Demokrasi Pancasila.

Sepanjang sejarah republik ini, makna demokrasi begitu dipuja dan dirindukan. Dan pemilu selalu dijadikan sebagai suatu simbol nyata pelaksanaan sistem demokrasi. Sehingga pemilu itu kemudian dikatakan sebagai proses demokrasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Hawa, mahasiswa Undar yang berasal Gresik.

Pemilu itu sangat penting, sebagai **proses demokrasi** buat negara kita.  
(Hawa, Undar)

Sebagai sebuah perjalanan demokrasi, pemilu merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dikatakan penting, sebab pemilu adalah arena paling terbuka di mana masyarakat diberi kesempatan secara terbuka untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan dan nasib bangsa ke depan. Semua warga negara yang memenuhi persyaratan diberi kesempatan memilih pemimpin dan wakil-wakil mereka di legislatif. Ini sejalan dengan apa yang dikatan oleh mahasiswa Undar dan Staibu berikut ini:

Penting sekali pemilu itu, karena dalam pemilu itu nanti **akan menentukan siapa yang jadi pemimpin kita**. Dan itu juga menentukan maju atau mundurnya negara kita.  
(Indah, Undar)

Dengan pemilu kita **akan memilih wakil-wakil di legislatif dan juga presiden**. Mereka itu adalah para pemimpin kita. Bagi saya pemimpin itu sangat penting sekali, apalagi bagi sebuah negara. Nggak bisa dibayangkan apabila sebuah negara nggak ada pemimpinnya.  
(Lilik, Staibu)

Di lain pihak juga dikemukakan oleh aktivis HMI yang juga menjadi pemantau pemilu 2004 berkaitan dengan sistem pemilu sekarang ini.

Untuk pemilu 2004 ini sistemnya sudah cukup bagus dari pada sebelumnya, tapi mengenai kualitas yang terpilihnya yang masih diragukan, kita nggak terlalu kenal dengan kualitas orang-orangnya. Mengenai sosok-sosok presiden maupun wakil-wakil di legislatif sangat perlu, karena mereka itu pemimpin kita. Walaupun visi dan misi kemarin dipaparkan lewat media massa, saya pikir itu ada kepentingan-kepentingan. Visi-misi itu, siapapun itu hanya untuk menarik perhatian. Visi-misi mereka bagus-bagus, cuma apakah mereka itu bisa melaksanakan, kita semua nggak tahu, semoga saja.

(Lilik, Staibu)

Para pejabat yang duduk di kursi pemerintahan sebagai buah hasil pemilu semata-mata hanyalah wakil rakyat, yang nantinya akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya kepada rakyat. Mereka memiliki pijakan legitimasi yang kuat. Sebab mereka mendapat mandat langsung dari rakyat. Dan kata orang bijak sejak zaman Romawi kuno dulu, *vox populi, vox dei*, suara rakyat adalah suara Tuhan. Untuk itu menyuarakan hati nurani dalam pemilu menjadi suatu ikon penting yang dijadikan jargon para pemimpin parpol dalam melakukan kampanye. Ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh santri Walisongo dalam memaknai pemilu.

Saya rasa memang sangat perlu. Sangat penting ya, karena kita **bisa menyuarakan hati kita**, mencoba melatih bagaimana menjadi seorang pemimpin, artinya kita bisa menyuarakan hati kita, suara hati kita. Makna yang terpenting yaitu melatih pada diri sendiri gitu, kita melatih bagaimana memberikan kepercayaan kepada orang lain, sehingga dia bisa menjadi pemimpin. Selain untuk orang lain kan kita melatih saya bisa jadi pemimpin diri saya dengan mewakili suara saya kepada siapa gitu.

(Ka'e, Ikaha)

Penting untuk digarisbawahi, bahwa pemilu juga harusnya mempunyai makna adanya suatu pendidikan politik yang diberikan oleh

negara. Pemilu diharapkan memberikan pengaruh bagi peningkatan peran masyarakat agar paham akan kewajiban politiknya, yang berkaitan dengan nasib bangsa dan negara. Bukan hanya sekedar mengajari apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sejatinya juga tugas dari partai politik, selain fungsi parpol sebagai sarana untuk pengisian jabatan publik yang sepertinya lebih menjadi fokus perhatian dan minat partai politik selama ini. Hal ini juga diungkapkan santri asal Flores ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2004.

Memang kalau liat sistemnya, pemilu 2004 memang sudah bagus. Cuma permainannya aja saya ada yang kurang sepakat. Kita kan terasa ya, misalnya no 1 sama no 6, yang no 1 tidak dapat suara yang paling banyak no 6, tapi kok bisa yang nomor 1 yang jadi. Kita kan juga ikut pelatihan pemilu di Cepdes ya bertanya tentang itu dijawab, ini memang sudah aturannya gitu. Kayak tidak puas, nggak *fair* aja, kenapa kok bisa ya menjadinya yang nomor 1 padahal yang suara terbanyak nomor terakhir. Kenapa bukan orang yang terbanyak itu yang jadi. Padahal itu kan suara orang ya, suara hati rakyat yang memilih dia kan. Kenapa diberikan kepada yang pertama, padahal dia nggak punya suara. Tapi kok bakal jadi ya yang nomor 1 itu herannya begitu. Kalau untuk pilpres sekarang memang lebih *fair*, artinya mencoba untuk melihat ini sebenarnya siapa yang harus dipilih, tapi lagi-lagi ya *money politics* itu memang nggak bisa dihindari. Ya kalau kaca mata secara umum, nampaknya itu sudah sangat-sangat baik sekali yang dinilai masyarakat. Tapi kalau kita mencoba menilai di belakang situ, otomatis kan mesti ada kecurangan. Jadi itu memberi pendidikan politik kepada warga masyarakat bahwa itu kurang baik, kalau memang dilandasi dengan permainan seperti itu.

(Ka'e, Ikaha)

Untuk itu, proses pemilu diharapkan berlangsung secara jujur dan adil, dan jauh dari teror serta intimidasi pihak-pihak yang kuat kepada pihak-pihak yang lemah. Saat pemilu berlangsung masyarakat harus bebas dari segala macam bentuk ancaman, tipuan dan rayuan politik yang



menyebabkan. Itulah idealnya berlangsungnya pesta demokrasi untuk rakyat, sebagaimana diungkapkan oleh santri asal Solo ini.

Kalau dilihat dari arti penting pemilu kalau menurut saya ya terletak pada **proses pemilihan suara** untuk menemukan atau menentukan suatu presiden atau penguasa, suatu pemimpin lah.. pentingnya di situ proses pemilihan itu. Kalau proses ya baik insya Allah hasilnya baik juga. Maksudnya proses baik itu, kan banyak orang berpolitik itu dengan *money politics*, katakanlah kalau proses nggak halal itu kan nggak menutup kemungkinan ke depannya juga akan gampang melakukan sesuatu yang melanggar aturan atau sesuatu yang dilarang.  
(Ais, Unipdu)

Sejalan dengan itu juga dikatakan oleh aktivis PMII dari Staibu dalam memaknai pemilu yang bisa bermakna positif dan juga negatif.

Kalau selama pemilu itu bisa jujur dan benar-bener bisa dipertanggungjawabkan dan itu memang sebagai pesta rakyat, **pesta demokrasi yang bukan untuk sesaat**, itu sangat penting. Tapi kalau itu hanya dibuat untuk **formalitas** dan untuk mengakomodir kepentingan dari sekelompok golongan aja, saya merasa pesimis banget.  
(Nisa', Staibu)

Sikap Nisa' yang ambigu terhadap makna politik itu didasakan pada pengalamannya dalam pemilu 2004, sebagai pemantau pemilu mahasiswi yang pernah menjadi santri di Bangil ini melihat masih ada kecurangan dalam proses pemilu kemarin.

waktu pilpres kebingungan mau milih yang mana, calon yang disodorkan itu semuanya rata-rata tidak memenuhi kriteria yang diinginkan oleh rakyat. Seenggak enggakya sedikit aja semua memiliki cacat politik dan kita melihat prosesnya itu juga pesimis banget, seperti *money politics*, serangan fajar. Seandainya prosesnya itu benar-bener dikawal dengan baik oleh yang berkepentingan seperti KPU atau Panwaslu, mungkin kita nggak akan sepesimis gitu. Setiap orang mungkin nggak ada yang benar, pasti ada cacatnya, tapi kalau prosesnya saya masih bisa. Tapi saya melihat prosesnya itu sangat nggak bener. Kalau

legislatif saya masih bisa percaya, orang-orangnya masih bisa dipertanggungjawabkan, itu menurut saya. Dan kebetulan yang saya pilih, prosesnya beliau-beliau itu lewat jalur yang benar. Dari hasil pemilu alhamdulillah ya sudah lumayan valid, bahkan dari kalangan Megawati sendiri kan bisa menerima kekalahan mereka, dan itu yang bagus, dimana ketika ada saatnya pihak lain yang menang ya bisa menerima kealahannya  
(Nisa', Staibu)

Menerima apapun hasil pemilu secara ksatria dan lapang dada adalah hal yang sepatutnya ditunjukkan dalam suatu negara demokrasi. Karena jika pemilu itu tidak bisa menampilkan wajah santunnya sebagai wujud demokrasi yang sebenarnya, hanya suatu arena pesta pora di mana si empunya bisa mengatur segala sesuatunya sesuai dengan skenario yang dia inginkan tanpa memperhatikan kepentingan rakyat kecil. Maka pemilu itu hanya sebuah permainan, tanpa adanya kedewasaan dalam berpolitik. Dan selama ini Fia, mahasiswa akuntansi yang aktif di HMI melihat jalannya pemilu hanya seperti itu.

Pemilu itu **hanya sebuah permainan politik**. Memang kalau di depan rakyat itu ngomong kepentingan rakyat, tapi kalau sudah jadi terpilih, udah jadi pemimpin, kepentingan kelompoknya sendiri yang lebih diunggulkan.  
(Fia, Undar)

Pemilihan umum di Indonesia hampir selalu menghadirkan fenomena menarik, mencegangkan sekaligus membingungkan masyarakat. Menjelang pemilu elit politik yang selama ini dikenal berseberangan satu sama lain, tiba tiba bergandengan mesra melakukan koalisi dan lobi-lobi politik tingkat tinggi yang seolah diantara mereka tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya.

Perbedaan sikap, cara pandang dan ideologi seketika disingkirkan, dibungkus, jika perlu disimpan dan dikunci rapat dalam laci. Ironisnya, semua perbedaan yang tersimpan rapat itu kelak akan dibuka, diperdengarkan kembali kepada publik saat harapan –tentang pembagian kekuasaan- tidak sesuai realitas dan saat *deal* politik tidak memenuhi atau dikhianati oleh salah satu pihak.

Hanya dijadikan ajang orang-orang yang berkuasa, orang punya duit untuk **membodohi orang-orang yang nggak ngerti**. Seperti orang-orang di desa atau buruh-buruh tani itu saat pemilu legislatif mereka diberi pengarahan untuk mencoblos nomor partai tertentu. Dan itu saya temui sendiri di desa saya.  
(Nia, Undar)

Sepanjang kita tahu, ilmuwan politik asal Amerika, Harold D. Lasswell, pada masanya cukup populer. Salah satu pendapatnya yang banyak dikutip orang, bahwa politik adalah siapa dapat apa. Menjelang dan saat pemilu 2004 pendapat itu semakin santer gaungnya. Namun apa yang dikatakan oleh Lasswell itu tidak dipraktikkan pada akhirnya, melainkan pada awalnya saja.

Pernyataan itu mula-mula terdengar wajar sebagai konsekuensi dari suatu koalisi. Adalah masuk akal jika dalam perundingan dan kesediaan berkoalisi, ada *deal*, ada *quid pro quo*, ada siapa dapat apa. Semua itu dianggap dan ditanggapi normal dan biasa saja. Karena masih belum diketahui publik, juga oleh pihak-pihak yang melakukan koalisi.

Terlepas dari sisi buruk yang muncul dalam setiap pemilu, masih ada harapan lain yang dapat muncul dari awan gelap, yaitu hujan yang penuh dengan rahmad. Di mana, dari hasil pemilu rakyat menginginkan adanya perubahan, reformasi menuju masa depan yang lebih cerah. Kini

mereka mengharapkan hadirnya pemimpin bangsa yang berkarakter kuat dan kerakyatan sebagaimana generasi Soekarno-Hatta.

Para pemimpin hasil pemilu 2004 ini diharapkan mau belajar dan menghayati amanat penderitaan rakyat Indonesia serta senantiasa mengedepankan semangat persatuan untuk secepatnya membebaskan rakyat dari krisis berkepanjangan. Akar masalah kekusutan yang terptntal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selama ini tida hanya terletak pada tataran implementasi dan mental elit pelaksana saja, tetapi juga pada sistem. Mustahil untuk dapat memperbaiki kekusutan seperti itu dengan hanya melakukan tambal sulam di sana-sini tanpa suatu visi dan misi yang kuat. Sehingga pemimpin itu diharapkan mempunyai kualitas diri yang baik sebelum dia memperbaiki bangsa ini, seperti apa yang diinginkan oleh santri yang kini menjadi ketua di Puspuri Undar ini.

Memperbaiki dirinya sendiri. Setelah dia bisa memperbaiki diri sendiri mungkin dia bisa memperbaiki bidang lain, masalah korupsi, masalah pendidikan, ekonomi dan yang lainnya, serta mengetahui aspirasi rakyatnya. Intinya, kalau kita ingin memperbaiki orang lain kita harus memperbaiki diri sendiri.  
(Ika, Undar)

Selain itu agenda utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin Indonesia mendatang, hendaknya melakukan gerakan perbaikan moral sebelum memperbaiki bidang-bidang lain. Mengingat banyaknya perilaku elit yang sulit untuk dicontoh oleh warga negara yang dipimpin. Saran ini dikemukakan oleh aktivis dari Unipdu dan Stailbu.

Mungkin moral dulu ya, karena itu sebagai akar krisis selama ini, banyak orang melakukan KKN karena dia tidak punya moral

yang baik sebagai pejabat. Baru kemudian ekonomi, hukum dan bidang-bidang lain, karena kita mengalami krisis multidimensional. Untuk itu pemerintah harus melakukan tindakan kongkret.

(Atik, Unipdu)

Permasalahan yang paling krusial yang pertama adalah moral, sampai-sampai ada yang mengatakan untuk memilih pemimpin yang bermoral. Kedua, aturan main itu yang harus dibenahi mulai dari atas sampai tingkatan bawah agar uang negara itu benar-benar bisa sampai pada orang-orang yang membutuhkan atau agenda-agenda yang memerlukan dana itu. Kalau aturan mainnya sudah bagus seenggak-enggaknya korupsi atau KKN bisa ditanggulangi. Jadi secara otomatis ketika ekonomi rakyat sudah stabil, juga tingkat kejahatan bisa dikurangi dan moralnya juga bisa diperbaiki. Demokrasi suatu bangsa itu nggak akan jalan kalau perut dan otak mereka itu kosong. Ya mudah aja kalau otak mereka kosong, berarti mereka nggak punya pendidikan, mereka gampang dikibuli. Juga kalau perut kosong, kelaparan, ekonomi mereka lemah, saya kasih kamu uang nanti kamu milih ini ya. Nah seperti itu. Sedangkan demokrasi kan nggak seperti itu, demokrasi itu kan ketika milih pemimpin memang dengan suara terbanyak, tapi nggak harus dengan membodohi rakyat. Kalau aturan main udah dibenahi, ekonomi rakyat bisa stabil, kemudian dekadensi moral bisa ditangani.

(Nisa', Staibu)

Perubahan dan perbaikan besar memerlukan waktu untuk mengakar, mendalam, dan menyeluruh. Tidak ada perubahan total yang berjalan mendadak dan lewat jalan pintas kecuali penghancuran. Indonesia Baru yang dibangun ini pun memerlukan waktu dan tentu, paradigma baru. Paradigma yang tegas menjelaskan bahwa sistem-manusia Indonesia hanyalah satu di antara sistem-manusia lainnya di dunia. Paradigma yang lugas menunjukkan bahwa tidak pernah ada pendekatan tunggal dalam pembangunan. Paradigma yang membantu masyarakat untuk memahami bahwa manusialah tujuan semua gerak-sosial-budaya, termasuk politik. Tidak ada pilihan lain bagi politik Indonesia baru, selain untuk berpihak pada manusia, pada rakyat - masyarakat secara sistemik dan menyeluruh.

Pemimpin bangsa saat ini harus berani menegakan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Begitu juga tata dunia baru akan tercipta jika hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas. Inilah zaman yang diharapkan ketika lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa.

### 5.2.3. Golput (Golongan Putih) dalam Pemilu

Istilah golongan putih (golput) muncul tahun 1970-an, mengacu pada sikap dan tindakan politik untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) Orde Baru karena dinilai tidak demokratis. Golput adalah protes politik, merupakan refleksi ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintah Orba yang menggunakan pemilu untuk melegitimasi rezim otoritarian. Karena itu, pemilu seperti yang dilakukan Orba harus ditolak, di mana dianggap tidak jujur (jujur dan adil). Mengingat karakteristik seperti itu, golput muncul dari kelompok terpelajar dan merupakan bentuk kesadaran politik, bukan dari masyarakat umum.

Dari data statistik partisipasi pemilih dari sembilan kali pemilu legislatif yang pernah dilaksanakan Indonesia sejak tahun 1955-2004 yang diolah dari data KPU<sup>34</sup> menunjukkan pemilu legislatif tahun 1971, merupakan pemilu pertama masa Orde Baru yang mencapai tingkat partisipasi tertinggi dan mencapai angka 96,62 persen. Sedangkan yang

---

<sup>34</sup> [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)

terendah adalah pemilu legislatif 2004, yang mencapai angka 84,07 persen. Sedangkan pemilu 1955 dengan partisipasi mencapai 91,41 persen merupakan pemilu yang dilaksanakan dalam suasana atmosfer kebersamaan sebagai bangsa dan negara baru masih dirasakan, sehingga fenomena golput belum muncul dan motif yang melatarbelakanginya dirasakan kurang signifikan untuk munculnya gerakan protes yang signifikan.

Melalui data KPU juga, bahwa pemilu legislatif 2004 dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan kualitas pendidikan politik yang masih memprihatinkan. Dilihat dari salah satu indikator elementer, yaitu adanya suara tidak sah yang mencapai angka 7,38 persen. Sementara suara tidak sah pada pemilu 1999 hanya 3,39 persen. Dan mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya (sekalipun terdaftar) adalah 23.551.321 orang atau 15,67 persen. Sementara pemilu 1999 hanya 7,26 persen.

Maka angka kumulatif warga negara yang tidak terlibat dan menyalurkan aspirasinya dalam pemilu 2004, atau sering diistilahkan dengan golput mencapai angka 23,25 persen. Angka yang fantastis dan mampu mengalahkan perolehan Partai Golkar yang 21,58 persen sebagai pemenang pemilu legislatif 2004. Angka tersebut merupakan angka tertinggi golput sejak pemilu 1955.

Golput sendiri ada karena bermacam-macam sebab. Bisa jadi karena sebab yang bersifat politis, dan ada pula yang karena teknis. Secara inderawi, golput bisa dilihat dari tidak digunakannya hak pilih dengan cara tidak mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) atau datang tetapi menggunakan hak pilihnya secara tidak absah. Tapi terlepas dari itu

semua golput juga merupakan proses dari suatu demokrasi, seperti yang dikatakan mahasiswa Staibu dan Unipdu berikut ini.

Nggak masalah. Itu kan **salah satu bentuk demokrasi**. *Monggo monggo* aja. Meskipun beberapa orang mengatakan itu berarti tidak ikut menentukan nasib bangsa. Tapi apaun itu tetap dihargai, karena mereka kan punya pendapat masing-masing.  
(Lilik, Staibu)

Golput itu **sah-sah saja, semua manusia kan berhak memilih dan dipilih ya**. Berhak memilih berarti boleh memilih, kalau boleh memilih berarti boleh tidak memilih. Lha tidak memilih itu juga sebuah pilihan, itu suara kita, kita mau membawa suara kita kemana itu kan terserah kita. *Mbuh* itu ke PKB, *mbuh* itu ke mbak Mega, *mbuh* itu ke SBY itu kan hak itu. Atau mungkin nggak kita keluarkan pun itu hak kita, lha ada juga di firman Allah, kalau kita malah membawa kemudhorotan lebih banyak mendingan kan nggak. Atau bisa dibilang kita kan memberikan suara kita berarti kita bisa mempertanggungjawabkan suara kita itu. Lha dari pada kita nggak bisa bertanggung jawab, lebih baik nggak usah.  
(Ais, Unipdu)

Sebenarnya perbedaan sikap golput amat terkait dengan sejauh mana kesungguhan demokrasi itu diselenggarakan di satu pihak dan – meminjam analisis Lipset- kondisi perekonomian masyarakat atau negara di pihak lain. Kalau yang pertama lebih menekankan pada kualitas pelaksanaan demokrasi oleh sebuah pemerintahan (bagaimana kualitas kinerja partainya, tingkat partisipasi masyarakat, kualitas capres dan cawapres, kinerja pemerintahan dan seterusnya). Sedang yang kedua lebih sebagai kondisi makro yang amat menentukan bagaimana masyarakat menentukan pilihannya.<sup>35</sup>

Seperti hasil riset Lipset, semakin masyarakat meraih kemandirian ekonomi, di saat sama ia akan makin melepaskan diri dari ketergantungan

<sup>35</sup> Saiful Arif *Golput dan Masyarakat Apolitis*. Kompas. 8 Juli 2004



pada negara. Masyarakat kapitalis Amerika Serikat yang secara ekonomi, katakanlah sudah dianggap berdaya sudah banyak mengabaikan peran negara. Mereka sudah membuang kepedulian pada negara. Tapi apakah ini juga terjadi pada masyarakat Indonesia? Setidaknya mereka yang berada pada kelas menengah atas. Bukankah mereka justru lebih banyak menggunakan fasilitas negara untuk mencapai kemakmuran hidup yang mereka capai selama ini. Bahkan ada kecenderungan penguasa adalah pengusaha, dan pengusaha juga penguasa. Penguasa dan pengusaha menjadi satu kesatuan bagi pejabat atau kelas borjuis di negara ini.

Perbedaan atas sikap golput terkait dengan bagaimana pemilu itu dilihat. Apakah itu sebagai media untuk memobilisasi massa atau untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Di negara-negara dengan standar kualitas demokrasi yang memadai dan kondisi perekonomian yang baik, golput bukanlah persoalan yang perlu dikhawatirkan. Ia bahkan menjadi pertanda positif di mana ketergantungan masyarakat atas negara sudah berkurang. Bahkan terkadang mereka menganggap urusan politik atau negara dianggap mengganggu *privacynya*.

Berbeda dengan Indonesia, meski fenomena golput sudah muncul pada pemilu sebelumnya, tetap saja masih dianggap sebagai hal yang mengkhawatirkan. Elit masih berpendirian bahwa partisipasi dan masyarakat dalam pemilu dicerminkan pada keikutsertaan mereka memilih calon pemimpinnya. Dan itu juga dianggap sebagai kepedulian dan tanggung jawab masyarakat terhadap jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tetapi yang perlu dimengerti oleh semua pihak, bahwa meningkatnya angka golput juga bukan cermin dari kegagalan suatu pemilu. Tindakan golput bukanlah tindak kriminal. Hal ini dikatakan oleh Ketua Badan Pengkajian dan Pengkaderan PMII Komisariat Staibu.

itu kan **terserah dia, golput itu bukan suatu kriminal**, tapi dianggap kriminal kalau dia mengajak orang lain untuk golput. Toh ternyata polling pada waktu pemilu legislatif saja, golkar sebagai pemenang pertama dalam pemilu legislatif suara golput itu lebih banyak dari pada suara golkar. Jadi lebih banyak orang yang pesimis pada pemilu legislatif saat itu, nggak tahu yang pemilu pilpres ini.  
(Nisa', Staibu)

Sejalan dengan itu, pakar hukum Roni Nitibaskara<sup>36</sup> berpandangan, bila memilih dianggap sebagai hak, maka tidak menggunakan hak pilih adalah perbuatan yang tidak mengundang konsekuensi hukum. Lain halnya bila memilih itu wajib, maka tak memilih adalah meninggalkan kewajiban. Seandainya tidak memilih sebagai cacat secara hukum dalam pandangan politik kriminal yang berlaku maka tidak memilih dapat dikenai sanksi. Tapi, jika hal itu ditempuh, pengenaan sanksi itu akan merampas kemerdekaan dan meniadakann pluralisme. Keadaan ini jelas akan bersceberangan dengan nilai deokrasi yang hendak ditegakkan melalui pemilu.

Yang terpenting dalam sebuah pemilu adalah proses dan hasil yang dicapai benar-benar jujur dan adil dan dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. Jadi golput tidak perlu dikhawatirkan, karena bukan ancaman. Justru cerminan sikap kritis masyarakat terhadap jalannya roda pemerintahan bangsa ini yang masih dalam proses transisi demokrasi.

<sup>36</sup> [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), 2 Agustus 2004

Golput itu **orang yang kecewa** dengan kondisi politik yang ada. Jadi dari pada nati salah pilih. Katakanlah nggak ada lagi calon yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Kemudian memilih si A, ternyata nantinya si A juga sama saja. Dari pada merasa berdosa ikut memilih orang tersebut, lebih baik kan nggak memilih.  
(Nia, Undar)

Bagi orang yang memilih pimpinan bagian dari ibadah, ikut pemilihan pimpinan mengandung nilai-nilai transendental. Dilihat dari aspek ini, maka tidak jadi pemilih dapat dimaknai lari dari tanggung jawab, karena itu berdosa. Namun, yang tidak memberikan suaranya pun juga punya alasan. Dengan tidak memilih ia terlepas dari tanggung jawab atas kemudharatan yang akan terjadi karena tiadanya pilihan yang baik. Mengingat masing-masing punya landasan pembenaran yang patut dihargai, mereka yang tidak memilih pun perlu dihargai.

Begitu juga yang dilakukan oleh dua orang aktivis Unipdu dan Ikaha, mereka menghargai sikap golput, apalagi golput yang bersifat kritis. Meski, di sisi lain mereka secara pribadi kurang setuju terhadap golput, karena tidak menyelesaikan masalah dan dianggap tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik.

Secara umum saya memaklumi kenapa banyak masyarakat kita yang golput. Mereka **kecewa** dengan apa yang dilakukan pemerintah selama ini. Bagi mereka tidak terlalu banyak yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis yang sudah multidimensi ini. Tapi saya pribadi kurang setuju dengan golput. Karena sebenarnya mereka kan punya hak untuk untuk menentukan siapa yang harus mereka pilih, tapi mengapa tidak digunakan sebaik-baiknya. Itu kan **menyia-yiakan haknya**.  
(Atik, Unipdu)

Saya sangat memaklumi kenapa mereka golput, karena itu **rasa sakit mereka, kekecewaan** mereka, ternyata bangsa ini kok nggak berubah. golput atau nggak itu hak nurani mereka. Tapi toh ketika kita golput itu juga **nggak menyelesaikan masalah**, apa salahnya sih kita memilih. Dan yang penting kita sebagai

seorang muslim, kita punya cara sendirilah, kita harus coba ya mungkin melalui istikharah. Ya kalau saya sih cukup bismillah saja, saya yakin apa yang saya pilih bisa memulihkan Indonesia lagi.

(Izzah, Ikaha)

Namun demikian ada juga santri yang tidak setuju sepenuhnya dengan perilaku golput, seperti yang diutarakan oleh dua orang mahasiswa Undar ini yang kini tinggal di Puspuri.

Saya **nggak setuju**. Kita harus tetap milih, itu kan demi negara kita. Kalau suara kita hilang satu itu kan sayang, padahal itu sangat berarti. Pokoknya saya **nggak** suka golput.

(Hawa, Undar)

Golput itu sebenarnya **nggak** bagus juga karena mau **nggak** mau dia kan juga harus mengikuti pemimpin mereka. Ketika dia golput saya rasa **malah** **nggak** **menyuarakan** **suara** **hatinya**.

(Fia, Undar)

Secara moral, Ketua Panwaslu Komarudin Hidayat, menilai golput adalah pilihan yang kontraproduktif bagi pemilu. Mereka sama dengan tidak menanam saham pada pemerintahan. Mereka yang golput secara moral tidak berhak komplain atas kebijakan pemerintah yang terpilih dalam pemilu. Namun, golput dapat menjadi pembelajaran politik yang bagus apabila diniatkan kepada para kontestan peserta pemilu bahwa mereka tidak sepenuhnya dapat memenuhi harapan rakyat. (Pikiran Rakyat, 2 Agustus 2004)

Menjadi golput secara kritis adalah pilihan sadar yang amat bijak dan harus dihormati ketika secara rasional tidak ada partai atau pemimpin yang layak dipilih. Secara kritis, mereka melihat tidak ada perubahan signifikan yang dihasilkan dalam seremoni pemilu sebelumnya, baik dalam berbagai bidang kehidupan negara ini maupun dalam proses pemilu itu

sendiri. Kecuali hanya rutinitas yang membosankan di balik sebuah jargon pesta demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam model seperti ini, adalah partisipasi kritis. Mereka tidak mencoblos sebagai wujud kritik atas sistem pemerintahan selama ini yang masih korup dan pelaksanaan pemilu yang hanya dijadikan kepentingan untuk mendapatkan jabatan. Bukankah sikap ini lebih partisipatif dan elegan dari pada sebagai warga negara yang dengan patuh datang ke TPS, tetapi tidak tahu makna perilakunya.

Di samping itu perilaku golput juga bisa disebabkan oleh kebingungan masyarakat untuk memilih para wakil dan pemimpinnya. Menjelang maupun saat pemilu perilaku kaum elit politik tak ubahnya seperti bunglon. Bisa berubah bukan dalam hitungan hari dalam hitungan detik. Koalisi dan lobi-lobi politik diantara para elit hanya membingungkan rakyat kecil yang berada pada kehidupan yang serba sulit. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan santri Darul Ulum yang aktif di KSR (Korp Suka Rela).

Saya setuju sekali dengan golput karena mungkin **kebingungan masyarakat untuk memilih**. Pertama Mega didampingi oleh orang NU juga, terus SBY juga sama orang NU. Mereka bingung kalau dulu kan PKB semua, trus kan sekarang kayaknya pecah, sekarang itu dulu yang *note benenya* mendukung Gus Dur sekarang pecah dan akhirnya golput  
(Ima, Undar)

Dalam konteks akademis maupun sebagai wacana substansial demokrasi, kecemasan terhadap kenaikan angka golput adalah kecemasan yang tidak beralasan. Kecuali jika kecemasan itu dirasakan oleh para elit partai, itu bisa dimaklumi. Mengingat pandangan partai di negeri ini sampai sekarang hanya berorientasi pada kekuasaan, dan itu bisa diraih

dengan banyaknya suara yang masuk untuk mendukung partai yang bersangkutan.

Di balik meningkatnya kuantitas golput itu, semoga juga didorong dengan kualitas sikap mereka yang semakin kritis terhadap berbagai pelaksanaan demokrasi. Sehingga itu semua semakin mendorong terciptanya iklim demokrasi yang semakin kondusif dan menunjukkan kedewasaannya. Bukan hanya jargon yang menjadi hegemoni yang digunakan penguasa untuk membodohi rakyat kecil.

Kita boleh berbeda, bahkan perbedaan merupakan sesuatu yang esensial di dalam suatu masyarakat yang modern dan majemuk. Tetapi kita harus berhenti berbeda bila dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara ini sudah dipertaruhkan. Dalam keadaan seperti itu, bersatu termasuk bijaksana dalam memaknai fenomena yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Dan tak kalah pentingnya adalah untuk memaknai setiap pilihan terbaik kita sejalan dengan kepentingan bangsa dan negara yang lebih kokoh. Sehingga pilihan apa pun tidak akan membawa implikasi yang merugikan kepentingan masyarakat banyak.

#### **5.2.4. Kepemimpinan Perempuan**

Dalam masyarakat muslim, ada beberapa konfigurasi pemikiran keagamaan tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Pandangan pertama, menyatakan bahwa perempuan diharamkan untuk terjun di dunia politik, karena politik merupakan wilayah publik dan wilayah kekuasaan laki-laki. Apalagi sampai menjadi pemimpin politik atau kepala negara, hal ini sangat tidak dibenarkan. Pandangan kedua,

menyatakan perempuan bisa terlibat dalam dunia politik dan bahkan memimpin negara dengan alasan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama diciptakan Allah sebagai Khalifah di muka bumi. Pandangan ketiga, menyatakan perempuan dapat terjun ke dunia politik seperti halnya laki-laki, tetapi tidak dapat menjadi pemimpin tertinggi atau kepala negara.

Di pentas sejarah Islam klasik, banyak kisah sukses yang diukir para perempuan. Sebutlah, misalnya, Siti Aisyah, isteri Nabi Muhammad Saw, yang dengan sukses dapat memimpin puluhan ribu pasukan perang di bawah kendali pemerintahnya. Tetapi, 'Agama' diyakini banyak orang, menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan paralel dengan ketidaksuksesan dan kesengsaraan. Sehingga, tidak ditemukan satupun literatur Islam klasik yang membenarkan kepemimpinan selain untuk laki-laki.

Ayat Alqur'an: *ar-rijalu qowwamuna a'lannisa*, yang sering dimaknai tunggal: Laki-laki sebagai pemimpin atau penguasa. Meskipun sebenarnya konteks munculnya ayat ini adalah setting sosial tentang upaya pengaturan suami-istri dalam rumah tangga. Senada dengan ayat tersebut maka seorang santri yang sudah sejak kecil mengcyam kitab kuning di pesantren menyatakan tidak setuju jika perempuan menjadi pemimpin suatu negara.

Saya **tidak setuju** perempuan menjadi pemimpin, dalam artian ketika masih ada laki-laki kenapa perempuan harus jadi pemimpin. Kecuali kalau tidak ada laki-laki baru perempuan bisa jadi pemimpin. Dalam skup kecil saja, keluarga, laki-laki harus jadi pemimpin, apalagi negara.  
(Atik, Unipdu)

Informan melakukan generalisasi pada ayat Alqur'an di atas, bahwa jika dalam keluarga saja laki-laki harus menjadi pemimpin apalagi dalam

ranah yang lebih luas lagi yaitu negara. Maka tidak ada daya tawar lagi bagi perempuan untuk menjadi pemimpin selama laki-laki masih ada, maka laki-laki lah yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan yang berasal dari Sumatera, yang masih cucu seorang ulama salaf di Nganjuk.

Saya terus terang pemimpin perempuan itu **nggak suka** kalau, okelah kalau memang lingkuplah di sini di asrama kan lingkupnya cewek. Tapi kalau ada komunitas cowok, ngapain nggak cowok aja. Cowok itu pemikirannya nggak seperti cewek, cewek itu pikirannya mungkin cuma pendek, hanya bisa nangis dan putus asa. Kalau cowok itu nggak pernah nangis-nangis ya, mungkin kalau dia lagi kecewa banget baru nangis, cowok itu pikirannya panjang. Kalau presiden itu cewek memang saya kurang sepakat. Cewek kan ngerti sendiri kan, nanti dengan kesibukannya di luar, dia akan melupakan kewajibannya sebagai seorang istri, untuk mengurus suami dan anaknya nanti akan terbengkalai.

(Ika, Undar)

Ika sendiri sebenarnya pernah mendapat kesempatan untuk menjadi ketua umum di Jama'ah Masjid (Jama') Al-Musta'in untuk menjadi ketua umum dalam periode tahun 2004/2005 ini. Jama' adalah organisasi untuk mahasiswa yang tinggal di pesantren yang berada di bawah yayasan Universitas Darul Ulum. Karena itu anggota Jama' tidak hanya mahasiswa perempuan saja, tapi juga mahasiswa laki-laki. Dengan alasan tersebut kemudian dia lebih memilih pada posisi sebagai wakil ketua dan ketua umumnya diserahkan pada mahasiswa putra.

Dia menganggap ketika dalam komunitas heterogen (campur antara perempuan dan laki-laki), laki-laki yang lebih tepat untuk menjadi pemimpin. Ada perasaan "sungkan" ketika perempuan harus memimpin laki-laki, apalagi dalam sebuah jama'ah masjid. Untuk menjadi imam



sholat saja jika ada makmum perempuan dan laki-laki, maka seorang imam itu harus laki-laki, itulah salah satu analogi yang dia ambil ketika mengundurkan diri sebagai ketua umum Jama'.

Ketidaksetujuan informan terhadap kepemimpinan perempuan juga didasarkan pada alasan psikologis. Secara psikologis perempuan dianggap emosional dan tidak mengedepankan logika, sehingga kurang cocok jika menjadi pemimpin. Lain halnya dengan laki-laki secara psikologis lebih memenuhi syarat sebagai pemimpin dengan berpikir panjang, keras, dan tidak mudah emosional atau menangis.

Stereotip seperti ini memang tidak lepas dari konstruksi budaya patriarki, yang mengidentikkan perempuan dengan sifat-sifat feminitasnya dan laki-laki dengan sifat maskulinitasnya. Stereotip bahwa sifat maskulin lebih mendominasi dunia publik adalah bukan hal yang asing lagi, ditambah dengan alibi bahwa selama ini yang menguasai domain publik adalah laki-laki, maka sangatlah pas jika yang menjadi pemimpin itu laki-laki dengan sifat maskulinitas yang melekat utuh pada dirinya. Sedangkan perempuan dengan feminitasnya lebih sesuai di ranah domestik dan bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga.

Berbeda dengan dua pendapat di atas, informan yang satu ini tidak mempermasalahkan jika seorang perempuan menjadi pemimpin. Meskipun dia berasal dari keluarga seorang kiai NU di Flores, namun kehidupannya dipenuhi dengan nilai-nilai demokrasi, bahkan sejak kecil dia tidak mau sekolah di lingkungan NU. Ka'e lebih memilih sekolah di lingkungan Muhammadiyah mulai dari SD sampai SMA dan sorenya baru ikut diniyah di pesantren salaf milik orang tuanya. Tumbuh dalam lingkungan yang

demokratis dan selalu aktif berorganisasi sejak kecil membuat wacana pemikiran sangat luas, dan tergolong sebagai aktivis PMII yang suka melakukan suatu lompatan-lompatan pemikiran yang progresif. Sentuhan kultur Muhammadiyah dan NU, serta berbagai buku dan kajian gender yang memenuhi kehausannya akan ilmu, membuat dia selalu berfikir kritis dalam menghadapi berbagai penafsiran teks agama dengan segala wacana yang melingkupinya.

Itu memang kalau kita melihat dalil yang ada dalam Al-qur'an itu, maka itu sebenarnya **tidak harus mengharamkan** seorang perempuan itu jadi pemimpin, cuman mereka melihat lagi kajian-kajian kitab klasik, di mana di sana memang ada sebagian dari ulama bukan seluruhnya ya kan mengatakan seperti itu. Tapi saya rasa itu keliru ya...keliru, kenapa harus dibatasi? Wong scandainya ya pada saat itu yang menjadi pemimpin pertama di kaum Arab itu perempuan, maka Allah akan mengasihkan itu ke perempuan. Hanya kebetulan yang diutus itu dari Nabi, rosul yang pertama sampai Muhammad itu semua laki-laki, akhirnya kan di klaim bahwa pemimpin itu harus laki-laki.... pemimpin itu harus laki-laki, padahal Bilqis pun bisa. Bisa saja sih perempuan jadi pemimpin yang penting ada syarat-syaratnya itu terus terpenuhi. Artinya syarat itu yang tidak terlepas dengan syariat-syariat agama tadi, kalau dipandang dari sudut mata agama. Lain lagi kalau pake kaca mata umum, dia mampu, dia bisa, kenapa harus mundur.  
{Ka'e, Ikaha}

Dalam masyarakat Islam ganjalan terkuat seputar kemunculan pemimpin perempuan adalah ganjalan teologis. Memang tak ada ayat Alqur'an yang secara tegas melarang perempuan jadi pemimpin pemerintahan. Ganjalan tersebut sebenarnya tak ada dalam spirit ajaran Alqur'an. Karena prinsip dasar Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan adalah untuk menjadi pemimpin di muka bumi (*Inni ja'ilun fil ardhi khalifah*). Bahkan, Alqur'an menggambarkan Ratu Bilqis (semasa Nabi

Sulaiman) yang berhasil memimpin negeri Saba' secara arif, adil dan bijaksana.

Namun sampai sekarang kepemimpinan perempuan masih saja menjadi perdebatan di kalangan ulama sendiri. Penafsiran teks (Alqur'an) sangat tergantung pada penafsirnya, di mana selama ini yang menjadi penafsir mayoritas adalah laki-laki. Alam bawah sadar kolektif masyarakat laki-laki, yang agaknya, egonya tabu tunduk dibawah kekuasaan perempuan. Laki-laki sejak kecil telah tersosialisasi untuk menjadi penguasa; paling kecil, berkuasa di tengah-tengah keluarganya. Sehingga ketika melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat Alqur'an tidak akan lepas dari kepentingannya untuk mempertahankan status quo.

Kendala yang dihadapi perempuan untuk masuk dunia politik memang tidak sedikit, perempuan harus bisa menunjukkan kemampuannya bahwa dia memang pantas dan profesional di bidang tersebut. Dia harus membuktikan kualitasnya itu tidak hanya pada laki-laki yang mendominasi dunia politik, tapi juga pada kaum perempuan sendiri bahwa dia layak untuk duduk di politik tidak hanya untuk memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri tapi kepentingan masyarakat umum.

Kepemimpinan yang baik bukan tergantung pada jenis kelamin, tapi pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan adil dan bijaksana. Sebagaimana dikatakan oleh Toeti Heraty Noerhadi bahwa kepemimpinan adalah memperoleh atau mencapai keunggulan individu dalam masyarakat atau wilayah yang disebut publik. Kepemimpinan bisa juga berarti

kompetisi atau hierarki, dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab (Melly G. Tan, 1991:10)

Ketika perempuan bisa membuktikan kemampuan dan kualitasnya untuk survive di dunia publik, maka tidaklah menjadi masalah kalau kemudian dia duduk sebagai pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh Ana, santri Tambak Beras yang juga menjadi ketua komisariat PMII di Staibu.

Ada dua pendapat masalah khalifah sama pemimpin, ada orang yang mengartikan sama, pemimpin adalah khalifah, yang dari dulu itu nggak ada kan khalifah itu perempuan. Jadi nggak boleh kan pemimpin perempuan, mungkin dari situ aja diambil. Kalau lihat dari pemimpin sih saya kira **nggak harus laki-laki**, toh dari kepemimpinan itu nggak dilihat dari jenis ketaminnnya tapi dilihat dari dia mampu atau tidak dalam melaksanakan kepemimpinannya.  
(Ana, Staibu)

Jika merujuk makna khalifah pada zaman Rosulullah Saw sampai zaman khulafa'urra'idin<sup>37</sup>, memang tidak ada seorangpun dari mereka yang perempuan. Tapi dalam Alqur'an sendiri dikatakan bahwa setiap manusia ini adalah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Oleh karena itu dengan merujuk pada ayat tersebut maka faktor penentu bagi seorang pemimpin atau kepala negara bukanlah gender (kelamin laki-laki dan perempuan), melainkan *integrity, capability, acceptability, morality, credibility*, dan dukungan publik. Dengan demikian, ketika kondisi sosial-politik telah berubah dan memungkinkan tampilnya seorang perempuan yang benar-benar *capable* dan *acceptable* untuk menduduki posisi politik strategis seperti kepala negara (presiden), maka hukum Islam yang membolehkan kepemimpinan perempuan itu bisa diaplikasikan. Apalagi

<sup>37</sup> Setelah wafatnya Nabi, kemudian masyarakat Quraisy menunjuk pemimpin sebagai pengganti Nabi. Ada empat khalifah di zaman khulafa'urra'idin, yaitu Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib.

jika perempuan itu mempunyai kualitas yang lebih dibandingkan laki-laki. Hal ini juga dikatakan oleh informan yang sejak kecil tidak suka berorganisasi, tapi setelah kuliah dia menjadi orang yang bersemangat untuk aktif di organisasi, baik itu organisasi kampus maupun di luar kampus. Dia merasakan banyak sekali hikmah yang didapat setelah aktif di organisasi, selain memberi wawasan yang luas, juga telah menumbuhkan rasa *confidence* dalam kehidupannya.

Aku **setuju** kalau perempuan itu jadi pemimpin, kalau dia itu udah profesional di bidang politik, kenapa tidak? Malah aku mendukung banget, kalau memang udah nggak ada laki-laki yang mampu, nggak ada yang profesional cuma saling rebutan kekuasaan saja, kenapa nggak perempuan aja, itu kadang-kadang dibutuhkan. Dan itu terjadi di PMII.  
(Fathih, Ikaha)

Sejalan dengan itu Fathih juga menjelaskan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin selain kemampuan yang dimilikinya, tapi juga harus bisa bersikap profesional serta bisa menyeimbangkan antara kualitas feminin (perasaan) dan maskulin (logika) yang ada dalam dirinya.

Bisa menjadi panutan, profesional, adanya perpaduan antara logika dan perasaan. Dari awal kalau perempuan itu mayoritas perasaannya lebih menonjol, kalau cowok lebih main logika, itu pasti. Tapi, perasaan-perasaan itu memang juga dibutuhkan dan logika nggak selamanya benar, sebenarnya seperti itu, ada tempatnya masing masing.  
(Fathih, Ikaha)

Pemimpin sebagai simbol kekuasaan tidak hanya dimaknai sebagai dunia maskulin saja, tetapi harus digunakan secara konstruktif. Sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin bukanlah dominasi sifat maskulinitas saja, karena itu bisa merusak keseimbangan ekosistem yang ada di alam

ini. Sehingga akan menimbulkan sebuah negara *horrocracy* yang pemimpin dan pejabat-pejabatnya adalah para koruptor, preman, dan provokator yang hanya menebarkan berjuta ketakutan dalam kehidupan masyarakat.

Perpaduan antara energi maskulin dan feminin, adalah sisi yang berbeda dengan gerakan feminis yang muncul pada awal 1970-an dan 1980-an yang lebih menekankan kekuasaan yang bernuansa maskulin dengan menyingkirkan ciri feminin. Tapi dengan bermunculannya aliran-aliran dalam gerakan feminis, kekuasaan yang menonjolkan sifat-sifat maskulin yang lebih menekankan kekuatan, otoritas, ketegasan dan kerja keras serta mengatur kehidupan orang lain, menjadi bergeser di mana kekuasaan juga harus bernuansa feminin. Dalam kekuasaan, maskulinitas dan feminitas bertemu dalam suatu lingkaran penuh menjadi “yin” dan sekaligus menjadi “yang”, dan bukan yin dan yang yang bersifat dialektis.<sup>38</sup>

Dalam hal ini ekofeminisme memberikan jalan untuk menerima konsep diferensiasi maskulinitas dan feminitas, serta tetap menghormati pada perbedaan dan keragaman yang muncul dari kedua sifat tersebut. Namun seperti gerakan feminis pada umumnya, ekofeminis masih tetap “alergi” dengan segala bentuk masyarakat yang berstruktur atau patriarkat. Sehingga konsep yang di kedepankan adalah *equality in diversity* dengan paradigma yang berbeda dengan teori feminis lainnya yang

---

<sup>38</sup> Sachiko Murota. *The Tao of Islam*, Mizan, Bandung, 2004. hal. 28-29 Dalam bukunya tersebut Sachiko Murota, seorang wanita Jepang yang mendalam filsafat Islam menjelaskan tentang kosmologi Cina yang mempunyai kemiripan dengan kosmologi Islam di mana menggambarkan seluruh alam semesta dalam ungkapan-ungkapan yin dan yang. Ungkapan yin/ yang dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip eksistensi yang bersifat aktif (yang) dan reseptif (yin), kuat dan lemah, atau pria dan wanita. Pemikiran Cina sangat menekankan konsep harmoni dan keseimbangan, dan ini disimbolkan antara keduanya yang saling merangkul dalam keselarasan dan keterpaduan. Kesatuan wajah yin dan yang tidak lain adalah Tao, yaitu kualitas primordial. Kesatuan tao ini dimanifestasikan di dunia pada ciptaan secara unik, sehingga terjadi diferensiasi dengan kualitas masing-masing. Namun semua kualitas selalu terkait dengan yang dua (yin/ yang) dengan yang satu (Tao)

melihat individu sebagai makhluk otonom, tetapi ekofeminisme menginginkan adanya kesatuan antara alam dan manusia secara keseluruhan.

Semangat *equality in diversity* yang dipropagandakan ekofeminisme memang tidak begitu saja akan hadir dalam kehidupan, kadang orang memandang kehidupan ini secara dikotomis dan ambigu. Seperti yang dikemukakan Nana seorang mahasiswa Unipdu yang menanggapi pro-kontra kepemimpinan perempuan dari dua kaca mata. Santri Darul Ulum ini menolak kepemimpinan perempuan dengan landasan agama, tapi dia juga menerima kepemimpinan perempuan dari kaca mata sosial.

Saya memandang itu dari **dua kaca mata**, satu dari kaca mata agama, yang satu dari kaca mata sosial. Kalau dari agama itu kita sendiri tahu perempuan itu nggak pas lah kalau jadi pemimpin karena dilihat dari fisiknya pun kita mungkin kalah sama lelaki, tapi kalau masalah intelektual kan ya belum tentu, yang namanya nash dalam Al-qur'an ya, ya sudah menjadi nashnya. Kalau dari segi kaca mata sosial setidaknya kita kan juga memberi peluang pada perempuan juga, karena apa? keadaan dunia ini, kita tidak memandang Indonesia tapi dunia, komunitas yang utama yang lebih banyak kuantitasnya adalah perempuan. Setidaknya kan perempuan bisa berkiprah, bisa menyalurkan aspirasinya dalam itu, di beri peluang untuk memimpin suatu negara. Jadi saya itu orangnya juga sekuler juga.

(Nana, Unipdu)

Sikap ambivalen ini muncul karena kebingungan dia sendiri ketika memaknai pemimpin dalam tataran teks dan kontekstual. Dalam PMII sendiri, dia menjabat sebagai ketua komisariat di Unipdu untuk masa jabatan 2004/2005. Nana merasa sangat kaget ketika terpilih menjadi ketua komisariat dan dia sempat menolak karena di situ komunitasnya laki-laki dan perempuan. Selain itu dia juga merasa kemampuan dan

pengalamannya belum “mumpuni” dibandingkan aktifitas PMII yang laki-laki.

Menurut dia laki-laki sebaiknya yang menjadi pemimpin, apalagi selama ini dia berada dalam pesantren Darul ‘Ulum, dari sistem pengajaran mungkin bisa dikatakan modern tapi kultur pesantren salaf juga masih dipegang teguh dalam arti interaksi kiai-santri dan penafsiran kitab kuning secara “saklek”. Namun kepercayaan dan dukungan terutama dari kader laki-laki, serta tuntutan suksesi di organisasi yang sudah banyak bersentuhan dengan wacana gender itu akhirnya membuat dia menerima jabatan sebagai pemimpin, meskipun dia masih belum *confidence* dengan kemampuan yang dia miliki untuk memajukan PMII di lingkungan Unipdu.

Dengan kondisi yang melingkupinya tersebut membuat Nana memaknai pemimpin dalam dua sudut pandang yang berbeda, untuk menolak sekaligus menerima kepemimpinan perempuan. Dia tidak ingin dikatakan sebagai santri yang tidak taat pada ajaran sang kiai, dalam komunitasnya di pesantren. Tapi dia juga ingin tetap eksis di dunia sosialnya di mana dia juga banyak menggali ilmu yang dianggap juga sangat berguna dalam kehidupannya nanti ketika sudah keluar dari pesantren. Dan dia juga ingin tetap mengikuti wacana global yang berkembang di luar pesantren.

Berbagai wacana kepemimpinan perempuan yang berkembang di kalangan santri ini tidak lepas dari latar belakang sosial dan pendidikan mereka, pengalaman di organisasi serta persentuhan mereka dengan dunia luar dan wacana-wacana dominan yang berkembang di *peer group* maupun



out groupnya. Semua itu akan tarik menarik dalam dirinya untuk tetap menyeimbangkan perannya sebagai santri yang kental dengan tradisi salafnya (meskipun ada juga beberapa pesantren kualitas kesalafannya sudah berkurang) dan sebagai mahasiswa yang harus bersifat kritis.

Sejumlah argumen di atas telah diusung oleh para santri, baik oleh mereka yang pro dan kontra atas kepemimpinan perempuan dengan menggunakan literatur klasik maupun kontemporer yang bersifat intertekstual. Semua itu menjadi *khilafiyah* (perbedaan pendapat) yang harus bisa secara arif disikapi oleh semua pihak dan menjadikan sebagai *rahmatan lil alamin*, serta proses pencerdasan dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan pertikaian yang hanya membuat gap-gap dan terpuruk dalam perdebatan yang tiada akhir.

#### **5.2.5. Fatwa Haram Pemimpin Perempuan**

Pro-kontra kepemimpinan perempuan ternyata bukan sekedar dalam tataran wacana saja, tapi sering kali menjelang pemilu selau ada fatwa ulama entah itu melarang atau mendukung kepemimpinan perempuan. Jika pada tahun 1997 Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama NU di Lombok mengeluarkan fatwa bahwa tidak ada larangan bagi perempuan menjadi pemimpin karena kepemimpinan tidak bisa dinilai berdasarkan gendernya, melainkan pada kemampuannya. Konteks politik pada saat itu, adalah NU sedang membaca kondisi riil politik di mana pada saat itu Soeharto punya keinginan untuk mengajukan Siti Hardianti Indra Rukmana tampil di panggung politik. Sementara di pihak lain, ada arus

politik bawah yang juga sedang mengangkat kepemimpinan Megawati. Fatwa itu tentu saja menjadi sangat bermakna dan fenomenal.

Tahun 1999 ketika Megawati ada tanda-tanda akan menjadi presiden karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dia pimpin secara mengejutkan memenangi pemilu legislatif, beberapa tokoh politik Islam -tak terkecuali Gus Dur, Amien Rais dan Hamzah Haz- menggunakan legitimasi keagamaan untuk menolak kepemimpinan perempuan. Megawati sendiri ketika itu menyebutkan, pernyataan dari berbagai pihak bahwa perempuan tidak bisa menjadi presiden atau pemimpin bangsa sangat melecehkan harkat dan marbat perempuan (Kompas, 11 Maret 1999).

Akhirnya Megawati ketika itu memang tidak bisa menjadi presiden karena penolakan dari beberapa kalangan, terutama partai yang berazaskan Islam. Megawati menjadi presiden setelah Gus Dur yang ketika itu dipilih MPR menjadi presiden dan sekaligus diturunkan oleh lembaga yang sama. Dan pada saat kepemimpinan Mega tak ada satu pun dari ulama maupun tokoh parpol yang bernafaskan Islam menolak pemerintahan Mega.

Kini menjelang pemilu presiden 2004, kiai khos NU kembali mengeluarkan fatwa haran untuk kepemimpinan perempuan. Keluarnya fatwa tersebut menunjukkan bahwa perempuan ternyata dalam posisi subordinat dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perempuan hanya menjadi komoditas politik yang setiap saat berubah kedudukannya, bergantung pada pemegang posisi "penguasa". Salah satu informan begitu kritis dalam melihat munculnya kembali fatwa tersebut. Santri ini memang

tidak hanya aktif mendalami kitab kuning di pesantren, tapi juga aktif dalam berbagai kajian gender di berbagai organisasi. Untuk itu dia mempertanyakan kembali ada apa dibalik keluarnya fatwa yang mengharamkan perempuan menjadi pemimpin.

Untuk fatwa kiai Pasuruan itu saya rasa **ada nuansa politiknya** ya, sapa tau mungkin.... bukan su'udhon ya, cuman kita mencoba untuk memilah kok ada yang mengatakan seperti ini. Meskipun itu sebagai panutan ya, sebagai kiai-kiai besarlah yang memang fatwanya harus bisa diikuti, cuman kita kembali lagi melihat, ada apa kok perempuan dilarang?  
(Ka'e, Ikaha)

Senada dengan yang dilontarkan oleh Ka'e, Nisa, seorang santri dari Tambakberas juga melihat adanya usaha menjegal satu-satunya kandidat presiden perempuan yaitu Megawati. Meskipun para ulama bersikukuh bahwa fatwa tersebut tak ada hubungannya dengan dukung mendukung atau tolak menolak kandidat presiden, namun dalam sejarah politik sebelumnya menunjukkan ada kepentingan politik dibalik keluarnya fatwa. Baik itu untuk kepentingan penguasa, partai politik tertentu atau golongan tertentu.

Saya kaget sekali, kenapa harus seperti itu. Kemudian itu juga dicituskan oleh orang yang mengatasnamakan Kiai dan NU juga. Toh ternyata PBNU pusat nggak mengakui itu, nggak melegitimasi itu karena memang itu bukan sikap NU. NU adalah organisasi kemasyarakatan, dia tidak memihak pada apapun. Mereka kan melarang memilih presiden perempuan, otomatis mereka kan mengkampanyekan nggak boleh memilih Megawati sebagai satu-satunya kandidat presiden yang perempuan. Mereka itu meskipun kiai namanya manusia juga, dan manusia itu tempatnya salah, jadi bisa saja khilaf, mereka juga manusia, mungkin mereka **terpengaruh oleh kepentingan dari beberapa kelompok** sehingga muncul fatwa seperti itu.  
(Nisa', Staibu)

Jejak langkah peradaban manusia telah memperlihatkan bahwa menghadang partisipasi perempuan di ruang publik (politik), seringkali menggunakan pembenaran agama. Hal ini tidak hanya terjadi pada Megawati, tapi juga Benazir Bhuto yang ditentang secara keras oleh para mullah (ulama konservatif) Pakistan ketika dia naik menjadi perdana menteri. Semua itu tidak luput dari kepentingan penguasa atau kelompok tertentu, tapi seiring setelah kepentingan tercapai dengan adanya *bargaining* politik yang dapat menguntungkan penguasa, partai atau golongan tersebut, maka dengan sendirinya isu-isu tersebut pun menjadi hilang.. Hal ini tentu bukan tanpa maksud, karena maksudnya adalah satu yaitu: kepentingan, kekuasaan dan golongan.

Sehingga masyarakat yang seharusnya mendapatkan pembelajaran dalam hal menghormati kelompok lain, serta pembelajaran dalam berdemokrasi justru malah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu, sehingga malah terjadi konflik horisontal dengan menggunakan nama Tuhan serta agama. Hal ini tentu mencemarkan esensi sebuah agama yang sebenarnya menjunjung tinggi demokrasi, serta menghormati adanya perbedaan, berubah menjadi sosok yang menakutkan. Dengan meminjam istilah Yasraf, agama menjelma menjadi *horrocracy* yang menebarkan berjuta ketakutan dalam masyarakat.

Agama harusnya dijadikan *way of life* yang bisa menjadi sumber positif dari kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi dunia hipermodern. Konsep-konsep keterbukaan, kejujuran dan keadilan harusnya ditunjukkan oleh elit-elit agama dalam menuju millineum renesans spiritual. Teks teks dalam agama harus dilihat secara *kaffah*

(menyeluruh) bukan *parsial* yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Begitu juga dengan fatwa ulama harusnya dilihat secara *integrated*, baik dari kaca mata agama maupun kondisi sosial, budaya dan politik yang melingkupi keluarnya fatwa tersebut, seperti yang diungkapkan oleh santri Tambakberas yang telah lama aktif di PMII ini.

Fatwa kemarin itu kan **tendensius** ya, ada kepentingan-kepentingan yang mendasari hal itu. Saya tidak setuju itu, karena jelas kita memahami ayat Alqur'an dan hadist itu tidak hanya secara "saklek", dari ayat itu aja, tapi kita juga harus lihat *asbabul wurujnya*. Kalau hadist ya mengapa sampai muncul hadist? Mengapa sampai muncul ayat-ayat seperti itu? Yang jelas ya memang penafsiran ayat-ayat dan kitab-kitab kuning dalam Islam itu dipengaruhi oleh budaya patriarki, yang menjadi penafsir itu kan cowok-cowok ya. Jadi masih ada nilai subyektifitasnya, meskipun mereka sudah melakukan yang terbaik, itu tetep ada. Karena mereka rata-rata cowok, bapak-bapak, jadi kepentingan-kepentingan mereka bisa dicurahkan lewat tulisan-tulisan itu."

(Lilik, Staibu)

Selama ini, memang wacana agama yang dihasilkan dari proses penafsiran itu pada dasarnya sangat tergantung kehendak si penafsir yang *note benenya* adalah laki-laki. Jika monopoli tafsir dalam memaknai sebuah pemahaman agama, tanpa menghendaki adanya "tafsiran yang demokratis" maka itu berarti bahwa agama justru menjadi ajang "kolonialisasi". Dalam wacana agama dan feminisme, perempuan sering diposisikan sebagai kelompok yang ter(di)pinggirkan, ter(di)tindas, dan tidak memiliki hak bicara secara signifikan.

Untuk itu dibutuhkan penafsiran yang terbuka dan kontekstual, sehingga akan terlihat bahwa agama sejatinya memiliki semangat dan kepekaan yang sangat besar dalam menghendaki keadilan gender, sehingga

tidak ada seorang pun yang akan terdiskriminasi baik itu laki-laki atau perempuan. Penafsiran terhadap teks yang masih dianggap kurang responsif terhadap konteks zaman, maka fatwa yang dikeluarkan kiai pun dianggap masih kental dengan nuansa-nuansa pada pemihakan atas kepentingan sebagian golongan. Mereka menganggap kiai juga seorang manusia yang tidak luput dari salah dan tergoda dengan nafsu duniawi, seperti yang dikatakan oleh mahasiswi Ikaha yang juga seorang hafidh Alqur'an.

Kalaupun ada fatwa lagi yang melarang perempuan untuk menjadi pemimpin itu karena **ada kepentingan tertentu**. Namanya orang itu kan ada nafsu manusiawi, ada nafsu syaiton.  
(Fathih, Ikaha)

Meskipun beberapa santri di atas, kurang menyetujui keberadaan fatwa ulama yang mengharamkan pemimpin perempuan, namun ada juga sepakat dengan fatwa tersebut. Nash-nash yang dijadikan sebagai alasan untuk menolak kepemimpinan perempuan tersebut sesuai dengan Alqur'an dan hadist. Hal ini diungkapkan oleh Fia seorang mahasiswa Undar yang kehidupan keluarganya sangat kental dengan nilai nilai NU dengan tradisi pesantren salaf.

Fatwa itu di kitab itu memang ada. Kalau menurut saya tadi bahwasannya fatwa ulama itu memang **bener**, saya sepakat bahwasannya laki-laki itu adalah pemimpin. Peran di rumah tangga aja, pemimpin itu jelas laki-laki. Kalau saya menyetujui fatwa ulama bahwasannya pemimpin adalah laki-laki.  
(Fia, Undar)

Bagi Fia teks agama itu harus diterima apa adanya teks tersebut dan laki-laki memang diciptakan sebagai pemimpin tidak hanya dalam tingkat

rumah tangga, tapi juga negara. Ajaran seperti itu yang dia terima dai sang kiai selama ini ketika menjadi santri di Tambak Beras maupun di Darul Ulum. Dan dia meyakini ajaran tersebut, karena menganggap ulama atau kiai itu merupakan perpanjangan tangan para nabi (*waratsat al-anbiyā'* [pewaris etos kenabian]-red) dan mereka dipercaya sangat menguasai ajaran agama. Begitu juga nilai seorang ulama di mata masyarakat pada umumnya. Akhirnya, apa yang dikatakan ulama adalah kebenaran ajaran agama yang tidak disangsikan lagi. Sama halnya dengan yang dikatakan Atik, seorang aktifis HMI, yang yakin akan latar belakang dan alasan para kiai sepuh mengeluarkan fatwa mengharamkan kepemimpinan perempuan, mengingat kepemimpinan Megawati selama ini pun tidak banyak membawa perubahan ke arah yang lebih baik pada kehidupan rakyat Indonesia.

Saya **setuju** dengan fatwa Ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Tentunya para kiai itu punya alasan ketika mengeluarkan fatwa tersebut. Mereka memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Seperti kepemimpinan Mega selama ini, saya cuma melihat dia meresmikan ini, meresmikan itu, tapi tidak ada tindakan kongkret yang dilakukan dalam mengatasi krisis negara ini.

(Atik, Unipdu)

Pengaruh ulama masih besar sekali di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pesantren. Sebab, ada hubungan segitiga antara kiai, santri dan masyarakat sekitar. Itu sangat melingkupi. Sehingga fatwa apapun yang dikeluarkan ulama akan dilaksanakan, karena kebenarannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini membuat kalangan santri menjadi tidak kritis terhadap wacana yang berkembang. Hegemoni kultur pesantren yang begitu kuat membuat seseorang takut untuk melakukan

counter terhadap wacana yang ada, karena takut “kualat” dan tidak dapat barokah dari kiai.

Tapi ada juga santri yang melihat fatwa tersebut secara dikotomis (benar atau salah), melainkan konteks dari munculnya fatwa tersebut juga harus dilihat. Kapasitas dan kondisi psikologis seseorang juga menjadi pertimbangan dalam menentukan seorang pemimpin. Hal ini dikatakan seorang mahasiswa Psikologi Undar, yang juga menjadi Ketua BEM di fakultasnya.

Yang jelas ya mungkin, saya **nggak bisa bilang** bahwa fatwa itu **bener atau salah**, karena semua kan ada dasarnya. Yang jelas harus melihat kondisinya dulu di mana pemimpin itu menjadi seorang pemimpin. Mungkin kalau ada suatu kalau laki-laki itu bisa, kenapa tidak yang laki-laki, mungkin saya mendukungnya begitu. Schingga kalau cewek yang muncul sebagai kandidat tapi ada laki-laki yang lebih mampu, saya akan lebih memilih laki-laki. Karena cewek sendiri kan mungkin depresinya lebih mudah dibanding cowok, kalau masalah emosi cewek-cowok sama aja, malah cowok kalau emosi malah nggak menjalur. Yang jelas melihat kondisi dan situasi, kalau orang-orang di situ menganggap cewek itu lebih mampu dan nggak ada yang lain, kan udah darurat, dari pada negara itu hancur.  
(Een, Undar)

Sekarang ini fatwa ulama bukan sesuatu yang harus diikuti begitu saja secara *sami'naa wa atho'naa* (kami mendengar dan kami menaati). Disadari atau tidak, gerakan santri (baca: kaum muda) salah satunya melalui isu gender merupakan resistensi secara sistematis tetapi halus untuk menggeser paradigma tradisional dan menggoyang tahta paternalisme kiai tua yang kokoh karena posisi geneologis mereka.

Kaum muda ini mayoritas bukan darah biru, tetapi mereka menggunakan senjata ampuh melalui publikasi, media dan jaringan lokal, nasional, maupun internasional untuk menyebar paradigam progresifnya.



Bahkan sudah mulai terlihat mereka justru memberi masukan pada kiai sepuh yang mau berendah hati dan berjiwa demokratis.

Kiai sepuh mesti sadar bahwa struktur kultural yang ada selama ini sudah berubah. Kiai sepuh bukan lagi produsen tunggal kuasa dan wacana. Otoritas sudah dibagi dalam sejarah. Fatwa yang dikeluarkan oleh kiai sepuh bukan sesuatu yang harus dilaksanakan begitu saja, karena tiap individu (santri) sudah punya otoritas tersendiri dalam menentukan sikapnya sesuai dengan wacana dominan yang telah mereka miliki.

Akhirnya pro-kontra seputar isu kepemimpinan perempuan tampaknya akan terus menggelinding. Yang jelas, isu tersebut ternyata tidak semata-mata berhubungan dengan persoalan dogmatik agama, tetapi lebih berkaitan dengan persoalan politik Islam yang menggunakan isu itu untuk kepentingan pragmatis. Dengan kata lain, persoalan pro-kontra, dukung-mendukung dan tolak-menolak atas kepemimpinan perempuan akan terus berlangsung bergantung pada kepentingan politik yang sedang dimainkannya.

#### **5.2.6. Dekonstruksi Teks Agama yang Bias Gender**

Dalam tradisi umat beragama, teks selalu menempati posisi sentral. Teks senantiasa menjadi rujukan utama bagi laku beragama mereka. Ia kerap berfungsi sebagai hakim atas problematika yang dihadapi. *Ikhtwal* ini karena teks bukanlah hanya berupa lembaran lembaran kertas, tapi juga berarti orisinalitas dan otentisitas. Teks dianggap memiliki otoritas (*authority*) yang muluk untuk mengadili para pembangkang teks karena

pengarangnya (*the author*) adalah Tuhan atau Nabi. Karena begitu kentalnya merasuk, tak heran bila teks kemudian mampu menentukan langgam serta gaya hidup (*life style*) umat beragama. Pada aras ini, teks telah menjadi ikon pembentuk peradaban dan budaya masyarakat. Peradaban Arab-Islam misalnya sering disebut dengan peradaban teks (Nasr Hamid Abu Zayd: 1993).

Seperti yang dikatakan oleh Atik, seorang mahasiswa Unipdu yang menjadi aktivis HMI, bahwa tidak perlu ada pemaknaan ulang dari hadist atau ayat-ayat Alqur'an. Karena dari dulu teksnya juga seperti itu dan sudah dari zaman Rosulullah yang telah mengubah era jahiliyah kaum Quraisy.

Wah gimana ya....? Al Qur'an dan hadist itu kan pedoman kita, masak harus dimaknai ulang, saya **kurang setuju**. Nanti orang menjadi seenaknya dan memilih yang enak-enak saja dan disesuaikan dengan logika rasionalnya. Padahal nggak semua yang di kitab suci didasarkan pada akal manusia saja, ada rahasia tertentu kenapa ada ayat-ayat yang mungkin dianggap manusia merugikan. Tapi pikiran kita belum sampe ke sana.  
(Atik, Unipdu)

Bagi Atik, teks agama tidak dapat dijabarkan dengan berdasar logika saja, karena logika manusia nggak akan sampai ke sana. Alqur'an atau teks agama lain merupakan suatu yang sakral dan manusia tidak punya wewenang untuk mengubahnya. Dengan demikian bisa dipastikan perilaku keberagamaan umat beragama tak bisa lepas dari pengaruh teks agama berikut penafsiran. Wajar kalau kemudian fenomena radikalisme, fanatisme, fundamentalisme, bahkan ekstremisme umat beragama banyak dituduhkan bermula dari penafsiran teks yang serba formalistik-simbolik sehingga terkesan kaku, rigid, dan tidak fleksibel. Pemahaman yang

muncul seringkali lebih bersifat literal-verbal, tekstual, bukan kontekstual. Akibatnya, teks agama hanya dipahami pada tataran permukaan. Sedangkan hal yang bersifat mendasar terabaikan.

Pola pikir umat beragama cenderung ter(di)bentuk (*constructed*) menjadi kelompok yang berbudaya diam (*silence culture*), tidak kritis ketika berhadapan dengan teks. Sikap reaksioner dan emosional acapkali muncul tatkala teks ditafsirkan berbeda dari cara pandang yang telah mapan. Bahkan tak jarang teks agama menjelma bak algojo yang siap menjemput nyawa si (tertuduh) pembangkang. Ironis! Padahal teks semestinya difungsikan untuk membimbing umat beragama menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam situasi demikian, tentunya sangat urgen menafsir kembali teks agama secara kritis. Bagaimanapun juga, perbincangan seputar umat beragama tidak bisa lepas dari perbincangan teks. Pun demikian, ini bukan berarti sebuah afirmasi untuk kaum tekstualis dan skripturalis malah sebuah tantangan untuk selalu melakukan kontekstualisasi terhadap teks sehingga *up to date* dan tidak basi. Untuk itulah *desakralisasi* sebagai cara pandang terhadap teks maupun pemikiran keagamaan layak dikedepankan sebagai upaya mendobrak sakralisasi (*al-taqdis*) yang sekian lama menghegemoni kesadaran umat beragama.

Desakralisasi di sini menekankan adanya sebuah dekonstruksi sebagai salah satu proses kritik dari dalam dan strategi untuk membangun kritisisme dan kemajuan berfikir. Dekonstruksi akan menampakkan aneka ragam aturan yang sebelumnya tersembunyi yang menentukan teks. Ini dimaksudkan untuk menggali lebih jauh lagi makna-makna dan pesan-

pesan teks yang bersemayam dan mengendap jauh didalam teks karena untuk menuju kontekstualisasi teks (rekonstruksi) harus ada dekonstruksi teks. Sehingga—meminjam kategori yang sering dipakai oleh Arkoun—batas-batas antara hal yang terpikirkan (*thinkable*) dan hal yang tak (belum) terpikirkan (*unthinkable*) meleleh. Tak ada lagi penjarakan dan pembedaan antara keduanya.

Dalam menangkap makna sebuah teks diperlukan tidak hanya pemahaman gramatika bahasa, melainkan memerlukan data dan imajinasi konteks sosial serta psikologis, baik dari sisi pembicara (pengarang) maupun pendengar (pembaca). Dalam bahasa Fazlur Rahman, semua ayat (al-Quran) yang turun, sebagaimana ayat-ayat itu diwahyukan pada waktu tertentu dalam sejarah, beserta keadaan yang umum maupun khusus yang menyertainya (*asbabun nujul*), menggunakan ungkapan yang relatif mengenai keadaan tersebut. Pembaca atau penafsir harus mampu memahami implikasi yang tersirat dari pernyataan al Quran, sewaktu pernyataan itu diwahyukan, dalam menentukan makna utamanya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh dua orang santri dari Undar dan Ikaha, ketika ditanya tentang adanya pemaknaan ulang terhadap hadist dan ayat-ayat Alqur'an yang misoginis.

Ya **perlu**, hadist dan ayat-ayat Alqur'an itu kan diturunkan ada *asbabun nujuhnya*. Nah kadang-kadang ayat itu digunakan bukan pada tempatnya gitu, yang penting kayak gini nggak boleh, hadistnya ini. Padahal hadist atau ayat itu diturunkan situasinya berbeda dengan yang seperti itu. Ya harus dilihat dulu hadist atau ayat itu kemarin diturunkan kenapa? jangan sampai ayat yang benar ditaruh pada situasi yang salah atau situasi yang benar ditaruh dengan ayat yang salah.  
(Nia, Undar)

Jelas, bagi saya **perlu** adanya pemaknaan ulang lagi. Mencoba penyadaran terhadap laki laki juga biar tidak sewenang-wenang, karena dia punya justifikasi dari hadist dan Alqur'an tadi. Kita coba menerangkan bahwasannya bagi saya yang mendiskriminasi wanita itu tidak hanya masyarakat, tapi juga agama, yang sebenarnya tidak. Tapi karena salah pemaknaannya gitu lho. Jadi kita harus mencoba mengembalikan lagi dengan melakukan pemaknaan ulang. Toh Alqur'an sendiri itu lentur, bisa setiap zaman. Kita nggak bisa memaknai Alqur'an secara harfiah saja, tapi ada *asbabun nuzulnya*, ada *asbabul wurujnya*.  
(Izzah, Ikaha)

Menurut Fetima Mernissi, menafsirkan kembali teks-teks klasik dan hadist misoginis hendaknya dilakukan dengan menghindari reduksi citra perempuan dalam masyarakat di luar citra dan sejarah yang bias gender. Ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan karena adanya pemisahan ruang publik dan domestik yang masih dipertahankan oleh penduduk Mekkah sebagai warisan tradisi pra-Islam yang masih kental di kalangan umat Islam sendiri. Jadi, sekalipun Islam bermaksud memberikan posisi perempuan setara dengan laki-laki, tetapi jika misoginis yang berasal dari pra Islam masih bercokol, maka kesetaraan akan sulit terwujud.

Sejalan dengan itu Amina Wadud Muhsin dalam bukunya *Qur'an and Woman*, mengatakan bahwa tidak ada penafsiran yang benar-benar obyektif, karena penafsiran tidak akan steril dari latar sosio historis yang melingkupinya. Dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap model tafsir klasik agar relatif obyektif maka harus dikembalikan pada prinsip dasar nilai-nilai Islam sebagai paradigmanya, yang mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara.

Menurut Amina Wadud, ada tiga kategori penafsiran ayat Alqur'an. *Pertama*, penafsiran tradisional, cenderung eksklusif terhadap perspektif

perempuan sehingga hak-hak perempuan tidak terakomodasi dengan baik. *Kedua*, penafsiran reaktif, merupakan model yang dilakukan oleh para modernis sebagai reaksi terhadap lambatnya gerakan pemberdayaan perempuan. Ide dasarnya diambil dari pemikiran feminis dan rasionalis. Sekalipun semangat pembebasan yang dibawa merupakan hal yang positif, namun tidak terlihat adanya hubungan sinergi dengan sumber ideologi dan teologi Islam. *Ketiga*, penafsiran holistik, merupakan penggabungan penggunaan seluruh metode penafsiran dengan mengaitkan dengan persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan psikologis yang muncul bersama-sama dengan isu gender di masyarakat. Diharapkan dengan pendekatan hermeneutika yang dikemukakan oleh Amina Wadud ini dapat mengurangi subyektifitas penafsiran.

Selain melihat *asbabun nujul* sebuah ayat dengan pendekatan hermeneutika, penting juga untuk memetakan ayat-ayat *muhkamat* dan *mutasyabihat*. Hal ini dikatakan oleh seorang santri yang berasal dari Madura, yang juga aktif di Jamhur<sup>39</sup>(Jam'iyah Hafadz Universitas Darul Ulum).

**Perlu sekali**, mungkin tentang Alqur'an itu perlu pendalaman untuk lebih dikaji, kan ada ayat-ayat *mutasyabihat* yang kita harus lebih mengerti arti yang sebenarnya.  
(Ima, Undar)

Ayat-ayat mutasyabihat merupakan ayat yang bersifat metaforis, tidak bisa diikuti begitu saja sebagaimana adanya seperti ayat muhkamat. Pada ayat mutasyabihat perlu dilakukan penta'wilan dan deskripsi yang dapat

<sup>39</sup> Jamhur merupakan organisasi para *hafidz* Alqur'an (orang yang hafal Alqur'an) di kalangan mahasiswa Undar.

mengantarkan pada kesimpulan yang tidak berlawanan dengan keseluruhan maksud teks itu sendiri.

Sama halnya dengan Julia Kristeva, seorang pemikir post-strukturalis Perancis yang memperkenalkan istilah 'intertekstualitas' sebagai kunci untuk menganalisis sebuah teks. Menurutnya, relasi dalam sebuah teks tidaklah sesederhana relasi-relasi antara 'bentuk' dan 'makna' atau 'penanda' (*signifier*) dan 'petanda' (*signified*) sebagaimana dipertahankan oleh semiotika konvensional. Sebaliknya, Kristeva melihat pentingnya dimensi ruang dan waktu. Sebuah teks dibuat di dalam ruang dan waktu yang konkret. Karena itu mesti ada relasi-relasi antara satu teks dengan teks lainnya dalam suatu ruang, dan antara satu teks dengan teks sebelumnya di dalam garis waktu.

Kristeva menandakan bahwa sebuah teks tidak berdiri sendiri, tidak mempunyai 'landasan' atau kriteria dalam dirinya sendiri—tidak otonom dalam pengertian bahwa teks tersebut, eksis berdasarkan relasi-relasi atau kriteria-kriteria yang internal pada dirinya sendiri, tanpa 'dilatarbelakangi' oleh sesuatu yang eksternal—melainkan sebuah permainan dan mosaik dari kutipan-kutipan dari teks yang mendahuluinya. Sebuah teks hanya dapat eksis bila di dalam ruang teks tersebut, beranekaragam ungkapan-ungkapan yang diambil dari teks-teks lain silang-menyilang dan saling menetralsir satu sama lain.

Senada dengan Kristeva, Mikhail Bakhtin, seorang pemikir Rusia, mengatakan bahwa tidak ada ungkapan yang tidak berkaitan dengan ungkapan lainnya. Secara implisit Bakhtin menerangkan bahwa sebuah teks diungkapkan atau diproduksi dalam suatu ajang komunikasi, entah

dalam bentuk karnaval atau dialog. Sebuah teks bukanlah dihasilkan oleh seorang pengarang yang 'bergumam', bicara pada dirinya sendiri, dalam suatu monolog: sebuah teks bukanlah refleksi diri pengarang secara utuh dalam suatu proses 'referensi diri' (*self reference*).

Di sinilah faktor historisitas dengan latar sosio-kultural, politik, ekonomi, struktural yang mendasari turunnya sebuah teks mesti diperhatikan. Karena sebuah teks tidak akan turun atau dibuat tanpa sebab-sebab tertentu (*asbab an-nuzul*) atau, sebagaimana disitir oleh Francis Bacon dalam karyanya *De Augmentis Scientiarum* (1605), setiap teks mempunyai roh-zamannya (*zeitgeist*). Historisitas tidak hanya meliputi ruang dan waktu melainkan sekaligus ia adalah sebuah teks itu sendiri yang berkaitan erat dengan teks lainnya yang akan menentukan makna teks.

Untuk memahami makna teks secara intertekstual, maka diperlukan suatu wawasan yang integrated, bukan parsial. Dan itu semua tidak harus dilakukan oleh para ulama atau kiai saja, tapi dialog yang sinergis antara kiai dan santri juga diperlukan. Seperti selama ini sebenarnya di kalangan pesantren pun sudah ada forum bahstul mas'il (pembahasan masalah-masalah) para santri dan ulama untuk membahas fiqh terhadap permasalahan yang mengemuka di kalangan ummat. Namun sangat disayangkan, bahstul masa'il ini belum efektif untuk membahas masalah yang berkaitan dengan perempuan, dan masih didominasi oleh "suara-suara" kiai yang kental dengan budaya patriarki. Ini dikatakan oleh seorang santri yang selain aktif di PMH, BEM Fakultas juga aktif di forum bahstul masa'il.



Saya rasa memang **perlu** ya adanya pemaknaan ulang terhadap hadist dan ayat Alqur'an. Bahstul masa'il itu memang perlu ditingkatkan. Cuman kebanyakan... saya kemarin ikut bahstul masa'il di Trenggalek dan yang membahas tentang kepemimpinan perempuan itu tidak terlalu digubris, kayak gitu. Sangat sedikit yang mau menggubris perempuan sekarang itu bagus lho untuk disoroti, itu nggak terlalu ditanggapi. Jadi bahstul masa'il itu coba diwarnai dengan suara-suara kajian tentang perempuan mungkin bisa. Itu acara rutin, bahkan sejawa timur ya, setiap 6 bulan sekali diikuti oleh pondok pesantren sejatim, pembahasnya pun kiai-kiai, tapi yang mempresentasikan ada soal dari pondok pondok itu tidak bisa dibahas, mungkin kekurangan waktu ya. Jadi presentasinya di bahstul masa'il itu lebih banyak dilakukan kiai-kiai.  
(Ka'e, Ikaha)

Seorang penafsir haruslah bersikap terbuka dan objektif dalam menafsir teks. Ia juga harus bisa melepaskan diri dari kondisi dan beban psikologis yang traumatik sehingga penafsiran ulang terhadap sebuah teks menjadi semakin kritis, objektif, dan kontekstual.

Menafsir sebuah teks tentu saja memerlukan kehati-hatian dari si penafsir teks. Me-reaktualisasikan teks agama bukan berarti menafsirkan teks secara serampangan melainkan agar teks-teks tersebut selalu eksis seiring dengan perubahan zaman yang serba cepat. Apalagi teks yang selama ini dipahami adalah teks yang sudah terpisah dari kondisi objektif-historisnya. Teks mesti dimaknai kembali secara lebih luas untuk menghindari pemahaman yang monolitik, tidak variatif dan beragam. Sebab hal ini hanya akan menggiring ke dalam bentuk pemikiran dan pemahaman yang *teologis-dogmatis*. Kita juga mesti bersikap arif untuk menerima perbedaan penafsiran, karena sesungguhnya ketika teks telah menjadi sentral peradaban atau kebudayaan maka dapat dipastikan tafsir dan interpretasi akan beragam sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh

masyarakat bersangkutan. Bukankah perbedaan merupakan sunnatullah. Sehingga tidaklah masalah jika ada juga santri yang merasa bahwa tidak perlu lagi adanya suatu pemaknaan ulang terhadap hadist dan Alqur'an. Karena bagi informan ini dua teks tersebut adalah teks yang sakral yang tidak boleh dipertanyakan lagi kebenarannya. Ini dikatakan seorang mahasiswa Undar yang latar belakang keluarganya begitu kental dengan nilai-nilai Islam. Apa yang dikatakan oleh orang tuanya, yang juga pengasuh pondok pesantren di Lampung, dianggap sesuatu yang harus ditaati karena itu sebagai tanda baktinya seorang anak yang sholehah kepada orang tuanya.

Aku yang seperti itu gimana ya? Ayat nya udah seperti itu, hadistnya juga seperti itu, kalau dimaknakan ulang berarti dia masih belum percaya pada ayat Alqur'an kalau seperti ini, masak Alqur'an mau ditambahi juznya jadi 31 kan nggak mungkin. itu kayaknya nggak percaya sama Alqur'an, kalau kita mikir pakai nalar kita itu nggak bakalan sampai. Kalau sudah ngatak-atik seperti itu, **berarti dia nggak percaya sama adanya Alqur'an dan hadist.**

(Ika, Undar)

Berbeda dengan Nisa', meskipun sejak di Madrasah Tsanawiyah (SMP) sudah berada di pondok pesantren Bangil, namun dia menganggap pentingnya pemaknaan ulang pada hadist dan Alqur'an yang dianggap misoginis. Karena dalam beberapa materi kuliah di kampus sudah ada yang membahas tentang reinterpretasi terhadap teks agama, yang kebetulan pengajarnya juga pengasuh pondok pesantren di mana dia berada. Ditambah lagi dengan aktifitas dia di PMII yang sering melakukan kajian gender merupakan bagian program kerja dari departemen yang diketuainya.

Itu **perlu sekali**, dan kebetulan dalam beberapa kajian di kampus ya mengulas masalah itu, itu masuk materi kampus. Ulumul qur'an itu keberulan yang megang Bu Nyai saya, jadi ketika mengajarkan itu dia lebih pada kajian gender juga dan reinterpetasi pada beberapa ayat. Dan yang paling mengejutkan tentang adanya hadist bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk pria yang bengkok, makanya jangan terlalu keras ama wanita nanti patah itu ternyata hadist itu bukan hadist yang shoheh, itu adalah cerita-cerita dari orang-orang setelah kewafatan Nabi. Ternyata kalau ditelusuri hadist-hadist semacam itu yang sering kali digunakan untuk memojokkan wanita itu ternyata tidak bisa dijadikan dasar pijakan suatu hukum. Kok kayaknya perempuan itu sangat-sangat sulit dalam hadist itu, dan itu posisi perempuan sangat-sangat dipojokkan. (Nisa', Staibu)

Hubungan final antara teks dengan tafsirnya harus "dibongkar". Teks dan tafsir sangat terikat pada si penafsir dan konteks yang "menggumuli" selama proses pembentukan teks. Untuk itulah, perlu ada "rekonstruksi tafsir" dalam memahami teks mengenai perempuan. Dengan demikian upaya ini akan berimplikasi pada penghapusan monopoli tafsir yang dilakukan oleh otoritas tertentu yang berbicara atas nama Tuhan, agama, dan juga kekuasaan. Tafsir yang berlaku dalam wacana poskolonial adalah tafsir yang demokratis, menegasikan kecenderungan potensi hegemonisasi, dan pemaknaan yang tidak menghendaki absolutitas terhadap pemaknaan yang diwacanakan "yang lain" (*the others*), alias penafsir di luar dirinya.

Rekonstruksi tafsir semacam itu sebenarnya pernah digagas oleh Edward Said, yang terkenal lewat bukunya *Orientalism* (1978) dan merupakan salah satu pemikir poskolonial. Said ingin menguraikan praktik multikultural yang berlangsung dalam bidang sejarah tafsir. Dan proses rekonstruksi ini dimaksudkan sebagai jalan pembebasan menuju

pemahaman transnasional yang lebih persuasif atas sejarah suatu kaum melalui peninjauan ulang atas heterogenitas dan hibriditas.

Dengan meminjam kerangka pikir Said ini, pembacaan kita terhadap wacana agama dan feminisme lebih melihat pada "pembebasan perempuan" (*liberty of women*) dan melihatnya menurut keragaman budaya masyarakat yang ada, bukan patriarki semata. Penciptaan makna agama yang lebih mengukuhkan kekuasaan patriarki, sesungguhnya dalam prosesnya terselubung "ideologisme" antara tafsir agama dan konteks kekuasaan kaum laki-laki pada saat itu.

Michel Foucault, seorang filsuf posmodernis, menengarai adanya hubungan antara "pengetahuan" dan "kekuasaan" (*knowledge and power*), yaitu bahwa kekuasaan menentukan pengetahuan, dalam arti: menetapkan tipe-tipe diskursus yang benar dalam arti yang "*works*"; menetapkan mekanisme yang memungkinkan untuk membedakan proposisi yang benar dan yang salah; menetapkan teknik dan prosedur dalam mencapai kebenaran di atas; menetapkan status dari mereka yang ditugasi untuk mengatakan hal-hal yang dianggap benar. (Foucault: 1980, 131).

Kekuasaan tidak selamanya diartikan sebagai negara, lebih jauh lagi adalah segala sesuatu yang menjamin "normalitas", "regularitas", dan "familiaritas". Yaitu, segala upaya untuk menjamin stabilitas status sebuah pemikiran atau tindakan. Jika, pemahaman absolut itu diterapkan maka di situ kaitan antara pengetahuan dan kekuasaan sangat jelas. Yaitu bahwa kondisi penafsir yang memiliki kekuasaan dan kepentingan dalam memaknai agama mengenai persoalan-persoalan perempuan, biasanya

memposisikan perempuan sebagai sesuatu di peringkat terbawah. Dengan alasan, itu adalah hasil penafsiran yang sudah dianggap jelas dan dengan legitimasi tekstualitas agama. Padahal, model penafsiran seperti ini tidak lagi melihat konteks perubahan zaman dalam memahami kembali persoalan perempuan di masa sekarang ini. Jika, pemaknaan dalam memproduksi tafsir agama lebih mengukuhkan kekuatan patriarki maka pada dasarnya agama di sini kemudian menjadi ajang ideologisasi, dan tentunya menimbulkan "kolonialisasi" terhadap hak-hak perempuan. Pemahaman seperti ini sangat berbahaya.

Agama tidak seharusnya menjadi legitimasi prosedural dalam menciptakan diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan. Berbagai teks agama yang tersebar dalam lembaran lembaran Kitab Suci perlu ditafsirkan kembali secara kontekstual. Teks dan konteks sangat dipengaruhi oleh kondisi bagaimana si penafsir itu mampu "menggumuli" teks. Penafsiran secara kontekstual akan memahami kenyataan pluralitas bahwa makna teks tidak bisa dianggap satu, final, dan absolut.

Persoalan perempuan sangat kompleks sehingga membutuhkan perangkat alat penafsiran yang komprehensif dengan melihat realitas secara objektif. Jika, penafsiran secara tekstualis itu ditambah dengan kecenderungan adanya "ideologisasi" maka akan sangat sulit sekali mengurai proses pemaknaannya secara objektif. Biasanya kita memahami sebuah tafsir secara sakral. Padahal, tidak demikian! Letak persoalan kolonialisme wacana agama dalam memposisikan perempuan sebagai kelas terendah disebabkan oleh dua kecenderungan di atas, yaitu kehendak

penafsir (laki-laki sebagai pencipta makna) yang tidak melihat pluralitas kebutuhan perempuan di masa kini, dan kedua adalah karena kecenderungan pada ideologisasi dalam memahami teks yang direproduksi secara anti-jender. Persoalannya sangat jelas, yaitu bahwa tafsir agama yang membebaskan dalam memaknai hakikat kemerdekaan perempuan menjadi kebutuhan saat ini. Dan itulah realitas objektif dalam penampakan kondisi kekinian. Yang seharusnya dikedepankan adalah bagaimana kita menciptakan rekonstruksi tafsir yang lebih dimaknai secara demokratis dan kontekstual. Sehingga, agama benar-benar memang berwajah sebagai ajaran yang sangat respek dengan berbagai persoalan keadilan gender

#### **5.2.7. Keberadaan dan Pemikiran JIL**

Kemunculan Jaringan Islam Liberal (JIL) pada tahun 2001 adalah angin segar bagi pembaharuan pemikiran Islam Indonesia. Mereka umumnya berasal dari kalangan NU, IAIN, serta PMII. Gagasan yang mereka usung sepertinya terinspirasi dari buku Charles Kurzman tentang wacana Islam Liberal. Mereka menekankan tentang perlunya penafsiran ulang terhadap ajaran Islam sehingga Islam bisa lebih mencerahkan dan membebaskan. Secara garis besar, ide mereka adalah tentang penentangan terhadap teokrasi; perlunya demokrasi; penghormatan dan pengakuan hak-hak perempuan; hak-hak non Muslim; penekanan kebebasan berpikir; serta disemarakannya gagasan tentang kemajuan.

Mereka mendeklarasikan diri sebagai lawan dari gerakan Islam fundamental. Jika dirunut ke belakang, mereka pada dasarnya adalah

metamorfosis dari gerakan neomodernisme Cak Nur sebab isu-isu yang mereka ambil dari bentuk pengulangan dari yang lama serta mereka masih berputar pada bentuk wacana semata. Selain di JIL, anak muda NU juga banyak yang mengorganisasi diri di LSM, pers, maupun pusat kajian.

Mereka terus aktif bergerak di jalur kultural dan intens mengembangkan wacana keagamaan kontemporer serta demokratisasi dan *civil socety*. Keakraban mereka dengan ide-ide pembaruan Hassan Hanafi, Arkoun, Ali Syariati, Jabiri, Nasr Hamid, adalah sebagai bentuk perlawanan tradisi NU yang cenderung tradisional dan mengultuskan seorang kiai. Hal inilah sampai sekarang dikembangkan kalangan muda NU dengan benderanya yang bermacam-macam, tetapi isinya tampaknya serupa, semisal, Islam Emansipatoris, Islam Kiri, atau Islam Pribumi. Sehingga tidak heran, kalau ada beberapa kalangan, terutama kalangan salaf yang begitu kental dengan kultur yang masih tradisional, tidak setuju dengan keberadaan JIL, seperti yang dikatakan oleh seorang santri yang sejak Madrasah Aliyah (SMA) sudah menjadi santri di Tambak Beras dan kini linggal di Puspuri (Pondok Kampus Putri Al-Musta'in) undar.

Kalau menurut saya itu sudah **menyimpang** dari ajaran Islam, kalau itu saya nggak setuju bahwasannya sudah jelas kalau *arrijahu qowwamuna allan nisa*, bahwasannya laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Itu udah jelas,tapi kalau sudah diartikan kalau memang pengembangan mereka itu sudah luas bahwasannya pemimpin itu dalam kutip tersendiri bukan dalam kutip umum.  
(Fia, Undar)

Anggapan bahwa JIL sudah salah dalam mengartikan makna kebebasan suatu bentuk demokrasi bahkan dianggap sudah keluar dari

nilai-nilai Islam. Pernyataan ini dikemukakan oleh santri Darul Ulum yang sebelumnya tinggal di pesantren salaf di Purwokerto.

menurut saya bebas itu ya bebas tetep dalam peraturan, bebas yang teratur. Kalau di JIL itu bebas yang nggak beraturan, sudah **keluar dari koridor Alqur'an dan hadist**. Tapi balik lagi ke orangnya masing-masing dalam mengartikan.  
(Ais, Unipdu)

Sama halnya dengan Indah, mahasiswa Undar yang pernah menjadi santri di Tambak Beras memandang JIL tidak melihat ajarana Islam atau ayat-ayat Alqur'an itu secara kaffah (menyeluruh) tapi hanya ayat-ayat tertentu saja yang didikonstruksi ulang.

Saya **nggak setuju**, pendapat-pendapat mereka saya kira mereka membahas pada ayat yang ini, tapi ayat lainnya nggak dikaji juga, jadi ya setengah-setengah.  
(Indah, Undar)

Apa yang menjadi keengganan para santri di atas untuk menerima keberadaan Jaringan Islam Liberal (JIL), hampir sama dengan alasan penolakan KH Subadar terhadap aktivis JIL di struktur organisasi NU, menjelang Muktamar Ke-31 NU, 28 November-2 Desember 2004. Pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Pasuruan, ini mendesak agar struktur NU pusat maupun daerah dibersihkan dari aktivis JIL (Tempo Interaktif, 23 November 2004).

Alasan KH Subadar menolak eksponen JIL karena pemikirannya tidak cocok dengan NU. Kiai Subadar menyebut Ulil Abshar Abdala, koordinator JIL, yang Ketua Lajinah Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakspesdam) NU sebagai contoh aktivis JIL yang pemikirannya tidak sesuai dengan NU. Selain itu pemikiran JIL dianggap



sudah melewati batas dari prinsip-prinsip nilai Islam dan dikhawatirkan mengganggu ketenangan masyarakat.

Pernyataan KH Subadar ini penting, bukan hanya karena beliau adalah salah satu kiai sepuh berpengaruh, tetapi juga menunjukkan seberapa peluang kaum muda dan pemikirannya yang profesional mendapat tempat di NU. Penolakan ini juga sebenarnya menggambarkan bahwa sejauh ini NU yang note benanya masih kental dengan nilai-nilai kesalahannya masih belum bisa menerima perbedaan pemikiran yang muncul, terutama pemikiran yang dianggap “menyimpang” atau berbeda dengan tafsir umum. Keberadaan “bengkel kerja” anak-anak muda NU untuk mengolah gagasan di luar struktur NU sebenarnya juga mengindikasikan bahwa terbatasnya daya akomodasi NU dan masih belum lentur terhadap pemikiran-pemikiran progresif.

Terlepas dari berbagai alibi yang tidak menginginkan keberadaan JIL, masih ada santri yang memandang ada sisi positif dari JIL yang juga bisa dijadikan rujukan ketika berhadapan dengan tafsir teks agama yang cenderung bias gender. Dia sangat menghargai keberanian seseorang dalam menelurkan wacana-wacana baru, walaupun dari kaca mata umum dinilai sebagai pemikiran “nyeleneh”.

Saya **ada yang sepakat, ada yang nggak sepakat**, karena dia menamakan JIL itu neo mu'tazilah ya, yang mengutamakan rasio. Ada beberapa pemikiran mereka yang saya suka, tapi juga ada pemikiran mereka yang saya nggak sepakat. Kita kan harus memilah wacana mana yang harus kita terapkan dalam diri kita atau dalam kehidupan kita, mana yang pantas dan mana yang nggak pantas. Tapi cara berfikirnya cukup mewarnai pada pemikiran saya sendiri, ketika kita nggak bisa menerima hadist itu langsung mentah-mentah seperti ini, kita juga harus tahu tahu dasarnya. Ketika Nabi ngomong begini kita juga harus tahu dalam keadaan bagaimana. Itu juga teori hermeunetik yang

mendasari. Jadi saya kira mereka pun ketika ngomong begitu juga nggak asal ngomong, juga ada referensi yang jelas. Dan saya melihat Pak Masdar dan Ulil itu, saya lebih melihat pada keberanian mereka untuk berfikir, keberanian mereka untuk mengeluarkan pendapat, dari pada mereka yang diam dan hanya bisa menela.

(Nisa', Staibu)

Mahasiswa jurusan tarbiyah Staibu ini mengaku sering melakukan diskusi dengan pengasuh pondok pesantrennya yang juga alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Banyak hal yang dia peroleh dari diskusi dengan sang Bu Nyai yang kini aktif melakukan reinterpretasi terhadap kitab kuning yang sampai sekarang masih dijadikan rujukan wajib di pesantren Tambak Beras, bahkan juga di semua pesantren yang ada di Jombang. Tapi karena sang Bu Nyai ini selalu mengajarkan untuk bersifat kritis terhadap penafsiran teks-teks agama, secara tidak langsung juga mempengaruhi wacana Nisa' dalam mensikapi maraknya pemikiran-pemikiran progresif yang di kalangan pesantren sendiri kadang dicap sebagai pembangkangan pemikiran.

Pemikiran Ulil dan komunitas Utan Kayunya tidak serta merta dianggap oleh semua santri sebagai hal negatif yang harus dijauhi. Mahasiswa Psikologi Undar ini meyakini apa yang dilakukan Ulil dan kawan-kawannya sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Pemikiran-pemikiran baru akan selalu muncul sebagai dialektika kehidupan yang dinamis, akan selalu ada hegemoni dan counter hegemoni untuk berdialog secara aktif.

Zaman selalu bergeser, pemaknaan terhadap Islam sendiri pun juga berkembang, ya saya **menghormati** saja. Pemikiran Ulil itu juga rahmad Allah, saya yakin pemikiran mereka nggak muncul sendiri begitu saja, saya yakin Allah yang mengendalikan. Bahkan munculnya Ulil juga rahmad Allah. Zaman Rosulullah juga ada perbedaan pemikiran seperti itu. Pemikiran Ulil itu juga

*rahmatan lil 'alamin*, saya juga menghargai itu. Pemikiran-pemikiran baru itu akan selalu muncul, kalau nggak ada pemikiran-pemikiran baru itu kita nggak akan berkembang.  
(Een, Undar)

Jika mau mengakui secara objektif, umat Islam di belahan dunia mana pun, termasuk di Indonesia, kini mengalami apa yang oleh pemikir besar dari the City University, London, Ziauddin Sardar disebut kegagalan untuk menyamakan langkah dengan dunia masa kini. Ini disebabkan karena kegagalan umat Islam untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, seiring kegagalan mereka dalam memahami Islam dengan latar belakang kondisi kehidupan yang senantiasa dinamis.

Namun, penafsiran teks-teks suci dalam Islam itu tidak harus "saklek", sehingga dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip Islam itu cenderung ajek, mandek, dan rigid. Perjalanan waktu selalu menambah pengetahuan manusia, dan pengetahuan yang baru bisa jadi mendatangkan perubahan ilmiah dan teknologi. Ini juga berpengaruh terhadap struktur masyarakat.

Bila Islam masih ingin tetap menjadi agama dengan visinya yang *rahmatan lil 'alamin* bukan sekadar menjadi wirid apologetik, pembacaan dan pemaknaan baru terhadap ajaran memang harus terus dilakukan. Teologi Islam tidak harus menjadi teologi yang mengurus surga dan neraka saja, tetapi teologi yang betul bisa mencerahkan umat dan membebaskan mereka dari kungkungan hegemoni para penindas dan kapitalisme global. Meskipun pemikiran JIL dan kaum muda lain yang progresif akan mengundang berjuta kontroversi dan penentangan dari ulama sepuh, itu semua tetap diperlukan untuk memberikan warna pada

wacana yang berkembang. Jadi tidak hanya terwarnai dan terhegemoni dengan wacana dominan penguasa. Sebagaimana pernyataan dua orang santri Tambak Beras yang aktif di PMII ini.

Ide ide JIL kalau diterapkan di Indonesia ya akan muncul kontroversi. Tapi saya yakin kok Ulil nggak sepenuhnya benar-bener seperti itu. Ketika ditantang apakah benar seperti itu? Ya nggak seratus persen, nggak seperti apa yang dikhawatirkan. Itu kan pendapat ya **sah-sah saja**. Cuma, ya Indonesia itu kan kagetan ya, ada ini kaget, ada ini *shock*. Saya pikir dia lho Syeh Siti Jenar baru, ya itu aja. Sehingga ada istilah pengkafiran santri Walisongo. Itu sah-saha aja, perbedaan seperti itu yang bikin Islam itu berwarna, meskipun nggak warna-warni ya.  
(Lilik, Staibu)

Kalau orang awam mungkin kalau membaca tulisan Ulil mungkin langsung kaget, *shock* ya. Tapi sebenarnya kata-kata Ulil itu **hampir sama dengan ayat-ayat Alquran** dan itu butuh sekali penafsira-penafsiran yang sangat dalam. Tapi karena *saking* tingginya kata-kata yang dikeluarkan Ulil, akhirnya orang langsung marah. Ulil mengatakan bahwa Jilbab itu bukan budaya kita. Orang awam yang dengar langsung marah, apalagi orang Islam yang biasa pakai kerudung. Mereka juga tidak melihat Ulil seperti apa? Tahu sendiri orang Indonesia seperti apa? Hanya *manut* pada seseorang yang dianggap lebih mumpuni dan bersikap *ta'lid*. Padahal sebenarnya dibalik itu Ulil kan ingin kita tahu apa yang kita lakukan, kita juga tahu asal mulanya kenapa kita melakukan itu. Kalau kita nggak tahu asal mulanya kenapa kita pakai? Itu mungkin maksudnya Ulil.  
(Ana, Staibu)

Akhirnya, terlepas dari penolak kiai sepuh NU terhadap JIL dan pemikiran “menyimpang” kaum muda, tentunya itu semua harus tetap dihargai dan tetap positif thinking. Bahwa segala wacana yang dilontarkan merupakan rasa peduli terhadap masa depan umat ini. Penolakan terhadap JIL oleh sejumlah elit di NU, secara tidak langsung membunuh masa depan NU sendiri. Karena bagaimanapun gerakan JIL dan pemikiran progresif lainnya merupakan kader-kader muda yang berusaha menangkap spirit

zaman dengan segala daya kritisnya, yang seharusnya diberi tempat untuk lebih bisa berkembang tanpa ada pemasangan yang bernilai politis.

Sebagaimana biasanya, seperti pemikiran tokoh-tokoh yang lain dalam bidang apapun, tidak akan lepas dari permasalahan pro dan kontra. Demikian halnya pemikiran JIL dengan Kajian Utan Kayunya, yang berangkat dari analisa sosial, hingga mengkritisi teks-teks agama yang masih dipahami sebagai tradisi yang sakral dan tidak bisa diatak-atik, menjadi sebuah tradisi yang dianggap profan dan layak untuk diperdebatkan. Pemikiran JIL mampu meruntuhkan “tembok” kejumudan berpikir dan menjadi “*shock therapy*” dari permasalahan-permasalahan yang menjadi “*blunder*” dalam masyarakat. Ide-ide perubahan sosial yang digulirkan oleh JIL memang bisa dikatakan sebuah pembaruan yang radikal jika kita lihat dalam konteks sosio-kultural masyarakat pesantren apalagi tradisi NU dengan kaum nadliyinnya yang sudah dikonstruksi dengan nilai-nilai kitab kuning. Karena bagaimanapun juga, ide ide tersebut berani “menantang arus” dari *mainstream* ( arus utama) masyarakat.

#### **5.2.8. Elit Pesantren “Bermain” Politik**

Ulama berpolitik dalam percaturan Indonesia bukan fenomena baru. Baik Clifford Geertz (1976) maupun HJ. Benda (1983), sependapat bahwa tradisi pesantren dan kepemimpinan Kiai atau ulama merupakan unsur kebudayaan Islam Jawa yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika kehidupan agama, sosial dan politik dalam masyarakat Jawa dan Indonesia. Kecenderungan ini berlangsung secara berkelanjutan dari masa

tradisional sampai dengan masa kolonial dan masa Indonesia merdeka. Tidak lain, karena tradisi pesantren, bukan hanya menjadi segmen sosial-kultural, melainkan juga menjadi basis kekuatan sosial dan politik.

Dari perspektif historis dapat ditunjukkan bahwa pesantren secara berkelanjutan telah menjadi basis kekuatan sosial politik pada masa awal pendirian kerajaan Islam Demak, Cirebon dan Banten di daerah pesisir utara Jawa dan pada masa kerajaan Mataram Islam di daerah pedalaman Jawa. Pada masa kolonial abad ke-19, yaitu setelah kerajaan-kerajaan Islam runtuh, tradisi besar pesantren menjadi basis kekuatan sosial politik masyarakat pedesaan dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda.

Demikian pula halnya pada periode kelahiran nasionalisme di Indonesia, tradisi besar pesantren kembali menjadi basis kekuatan sosial politik bagi berdirinya organisasi pergerakan nasional seperti Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Partai Sarekat Islam Indonesia, dan Masyumi. Kedudukan dan peran yang sama juga terus berlangsung pada periode pasca revolusi kemerdekaan, yaitu menjadi basis berdirinya partai-partai politik "aliran" Islam seperti Partai Masyumi, dan Partai N.U. pada periode 1950-an, dan Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) pada masa Orde Baru. Dalam perjalanan sejarah kebangsaan dualitas fungsi ulama atau kiai sebagai pemimpin pesantren dan organisasi sangat terasa.

Sampai sekarang para ulama juga banyak yang ikut terjun ke wilayah politik praktis, atau setidaknya menjadi simpatisan partai politik tertentu secara eksplisit. Eksplisit dalam artian, ulama tersebut tidak

menjadikan sikap politiknya sebagai sesuatu yang bersifat privat, tetapi justru ada kesan bahwa sikap politiknya tersebut perlu dipublikasikan.

Pada kenyataannya, peran para ulama tersebut sangat mewarnai peta perpolitikan, apalagi jika yang dibicarakan adalah dukungan massa di tingkat akar rumput (*grass root*). Terutama dalam masyarakat tradisional, banyak ulama bisa menjadi *vote getter* yang bisa diandalkan untuk mendukung sebuah partai politik tertentu, karena biasanya ulama mempunyai pengikut-pengikut fanatik, yang dalam banyak hal selalu *sami'na wa atho'na*, termasuk dalam dalam hal pilihan partai politik. Sikap mengikuti sang ulama ini kemungkinan besar lebih disebabkan karena kebiasaan masyarakat dalam mengikuti fatwa-fatwa atau ajaran-ajaran ulama terutama dalam masalah-masalah keagamaan. Hal ini terjadi disebabkan sang ulama dianggap sebagai sosok yang paling mengetahui dan mempunyai otoritas keilmuan untuk itu.

Berkaitan dengan keistimewaan ulama yang bisa menjadi *vote getter* tersebut, maka tidak heran jika ada fenomena sowan ke ulama, atau ulama yang kembali aktif menjadi tim sukses, menjelang masa pemilu baik pemilu legislatif maupun dalam pemilihan presiden. Bisa Jadi seorang ulama akan konsisten menjadi –meminjam istilah Clifford Geertz- perantara dan pialang budaya (*cultural broker*), dan kemungkinan besar itu kemudian membawa kiai tersebut masuk jalur politik praktis. Namun bagaimana pendapat para santri tentang kiai yang menjadi pengasuh pesantren meniti jalur politik praktis? Berikut ini penuturan santri Darul Ulum dan santri Tambak Beras yang pengasuhnya kini menjadi anggota legislatif dari PKB.

Kalau aku **sangat nggak setuju sekali**, di asramaku sendirinya kurang perhatian untuk anak-anak asrama. Bu Nyai aktif di DPRD dari PKB. Menurut saya banyak keluhan dari mbak-mbak yang kritis. Banyak yang nggak setuju kalau pengasuh itu aktif di luar, nggak melalaikan sih, pengarahan itu pasti ada habis sholat, tapi sepenuhnya kepengurusan itu di tangan mahasiswa. Ngaji kitab itu mungkin hanya satu kali ke Pak Kiai, lainnya itu dari guru-guru dari luar.  
(Ima, Undar)

Sebenarnya sih saya **nggak setuju**, asli saya nggak setuju. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah terjun ke politik, apa yang seharusnya dilakukan di sini sebagai seorang kiai atau Bu Nyai itu kan harusnya banyak berkecimpung di pondoknya, karena anaknya kan banyak, kalau terjun di politik, akhirnya tercurah di politik semua. Misalnya di sini sendiri itu ya Bu Nyai itu jarang ada, karena kesibukannya di politik, jadi nggak maksimal gitu lho. Jabatan seorang Bu Nyai seharusnya itu membimbing santrinya, setiap hari memberi kajian pada santri-santri kalau bisa sebanyak mungkin. Tapi nyatanya di sini dalam satu tahun nggak sampailah di sini itu sampai berapa bulan, paling lama itu cuma dua sampai tiga hari, itu aja nggak mesti tiap bulan.  
(Susi, Staibu)

Ketidaksetujuan dua orang santri tersebut disebabkan perannya pengasuh pesantren menjadi dinomorduakan, semua urusan dalam pesantren di serahkan pada pengurus yang mayoritas mahasiswa atau masih pelajar aliyah (setingkat SMU) yang duduk di kelas dua atau kelas tiga. Praktis semua urusan pondok mereka yang menangani, mulai dari kegiatan sehari-hari di pondok sampai pada urusan keuangan pondok semua menjadi tanggung jawab pengurus yang tiap tahunnya harus dilaporkan melalui konferensi periodik tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus, sekaligus pembentukan pengurus baru. Dan biasanya saat pelantikan pengurus baru, Bu Nyai atau Pak Kiai yang aktif di legislatif ini baru bisa datang untuk memberikan pengarahan pada santrinya.



Tapi untuk tahun 2004 kemarin pelantikan pengurus baru untuk pesantren yang di Tambak Beras tanpa dihadiri oleh Bu Nyai pengasuh pondok pesantren dan diwakili oleh kiai dan nyai dari pesantren lain yang masih dalam naungan yayasan Bahrul Ulum. Hal ini disebabkan karena kesibukan Bu Nyai tersebut sebagai anggota dewan di pusat, sehingga beliau sudah jarang sekali berada di tengah-tengah santrinya, apalagi memberikan kajian atau pengarahan pada santrinya bisa dihitung dengan jari dalam setahunnya. Sehingga dapatlah dimaklumi kekecewaan dan sikap yang menentang pada kiai atau nyai yang terjun di dunia politik praktis. Meskipun kekecewaan mereka itu tidak pernah mereka sampaikan langsung pada sang pengasuh pesantren maupun pengganti pengasuh, karena ada budaya sungkan dan takut dianggap menentang sang ulama tersebut sehingga tidak akan mendapat barokahnya. Budaya ini masih sangat kental dan mendarah daging.

Seorang kiai atau nyai merupakan unsur yang paling esensial dalam sebuah pesantren, karena mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan dan pengurusan sebuah pesantren. Sebagai pemimpin pesantren, watak dan keberhasilan pesantren banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa, serta ketrampilan kiai. Dalam konteks ini, pribadi kiai sangat menentukan sebab dia adalah tokoh sentral dalam pesantren.<sup>40</sup> Sikap tidak mendukung kiai yang bergelut dengan dunia politik juga diungkapkan oleh santri yang juga pernah merasakan berada di bawah

---

<sup>40</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal 24-27

pimpinan kiai yang juga aktif di politik praktis dan sampai mengorbankan semua kepentingan pesantren, di mana para santri menjadi terabaikan.

Kalau aku **kurang setuju**, karena nanti nilai-nilai keislamannya udah berkurang. Kalau menurut aku udah ada permainan politik. Politik itu kan kotor, kalau menurut aku. Ya memang kalau kita nggak mengikuti dunia politik, kita nanti ketinggalan. Tapi alangkah baiknya kalau kiai itu cenderung ke pondoknya, memperbaiki pondoknya, akhlak-akhlak santrinya. Perbedaannya ya itu, ketika kyai saya belum ikut politik, itu untuk pengajian, untuk kontrolnya itu masih lancar aja. Habis terjun ke politik, udah berkurang nilai pengajiannya, sempat amburadul gitu lho (Fia, Undar)

Kadang keberhasilan kiai di dunia politik, memang tidak dibarengi dengan keberhasilannya dalam mengasuh pondok pesantren. Ada salah satu yang harus dikorbankan, jika sang kiai tidak siap untuk terjun ke dunia politik. Dalam artian, ketika kiai sibuk di luar mengurus politik, tidak ada pengasuh pengganti yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pesantren yang bersangkutan. Biasanya kiai atau nyai yang sudah sibuk di politik mereka akan menyerahkan urusan pesantren pada anak atau menantunya, atau kalau tidak mereka akan menyerahkan pada saudaranya yang lain. Hal ini banyak terjadi di pondok pesantren Tambak Beras dan Darul Ulum yang masih memegang teguh tradisi ke-NU-annya.

Kondisi riil di atas, sebenarnya juga pernah disinggung Abdul A'la, dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel pada kesempatan yang dalam seminar bertajuk *Local History Empowerment vis à vis Nationalism View: Upaya, Konflik dan Paradigma Baru Nahdliatul Ulama*. Dalam acara tersebut dia mengatakan bahwa "NU mempunyai komitmen kuat pada tradisi dan budaya lokal. Kedekatan NU dengan politik akan menyebabkan

pendangkalan agama dan menyebabkan pekerjaan kultural NU melalui pondok pesantren akan terbengkalai. Ketika NU tersedot dalam aktivitas politik pragmatis selama kurun waktu 1952-1984, pada masa itu kerja-kerja kultural dan sosial keagamaan yang selama periode awal merupakan garapan yang ditekuni NU menjadi terabaikan."

Tapi ternyata kondisi tersebut tidak hanya berlaku pada 1952-1984 saja, sampai sekarang itu masih terjadi. Di mana para ulama yang berada dalam kancah politik praktis, intensitas kerja kultural dan sosialnya menjadi berkurang, walaupun fungsi itu masih berjalan, kebanyakan hanya sebagai lipstik yang terlihat cantik di permukaan. Para ulama yang berjuang di jalur politik, kebanyakan hanya sibuk mengurus partai-partainya dan memenangkan partainya di arena pemilu.

Begitu juga dengan kerja kulturalnya yang berkaitan sebagai perantara dan pialang budaya, akhirnya juga banyak yang menjadi orong pembesar kebijakan pemerintah. Fenomena MUI (Majelis Ulama Indonesia) di zaman Orde Baru, tampak hanya menjadi "tukang doa" pada acara resmi negara, imam besar di masjid Istiqlal, atau mengumumkan jatuhnya hari raya keagamaan tertentu. Dan pada era Habibie, Gus Dur, Megawati, bahkan sampai pemilu 2004 kemarin, fenomena ulama yang membela patronnya juga masih tampak terjadi.

Tentu saja, tidak semua ulama berlaku seperti itu. Masih ada beberapa kiai atau nyai yang memilih untuk tetap melanjutkan kerja di bidang tersebut tanpa melirik dunia politik. Hal ini dilakukan oleh Bu Nyai dari sebuah pesantren di Tambak Beras, yang lebih memilih untuk mendidik santri-santrinya dengan wawasan kontemporer.

Saya kira untuk di dunia politik, nggak harus politik praktis ya. Selama ini, saya lebih ingin menerjemahkan, memahami dan memahami kitab-kitab kuning pada anak-anak itu dengan wacana kekinian. Jadi aktivitas saya dalam kaitannya dengan persoalan politik tidak terjun langsung tapi saya memberikan dukungan-dukungan pada para alumni, pada para santri-santri saya yang calon pemimpin masyarakat nanti, saya bekal dengan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Dan itu sumbernya adalah kitab-kitab salaf, di mana sosok perempuan itu kan jarang...., saya katakan jarang karena tidak setiap Bu Nyai bisa membaca kitab kuning, maaf saya terpaksa katakan tapi ini *of the record* ya. Kebetulan saya punya kemampuan di bidang kitab kuning itu, dan saya akan mencoba memahami kitab kuning itu saya pertemukan, saya benturkan dengan kenyataan dari buku-buku yang saya baca, yang masa kini itu, kemudian kita olah sedemikian rupa sehingga kita lemparkan kepada anak-anak sudah dalam bentuk wacana yang mereka bisa menyerap dan mungkin bermanfaat untuk masa yang akan datang bagi kehidupan mereka ke depan, ya politik, ekonomi, sosial, budaya, saya tanamkan bahwa tidak ada batas bagi perempuan untuk melakukan apa saja selama itu bermanfaat dan positif dan dalam koridor nilai-nilai agama.  
(Bu Nyai Aishah)

Memaknai aktifitas politik, tidak hanya terkait dengan politik praktis yang berkaitan dengan parpol, atau punya jabatan di lembaga-lembaga politik. Cucu Kiai Wahab ini lebih memilih meneruskan cita-cita sang abah menjadi pendidik, dan itu dianggap sebagai bagian aktifitas politik. Figur sang abah begitu membekas dalam hatinya, yaitu seorang kiai di Pesantren As-Saidiyah Tambak Beras dan sampai akhir hayatnya tetap konsisten berada dalam tradisi pesantren dengan kultur NU-nya. Tauladan dari sang abah ditambah dengan pengumpulannya dengan ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah dan organisasi yang dikuti semasa kuliah, beliau bertekad untuk memajukan pendidikan pesantren untuk lebih responsif terhadap wacana kontemporer sebagai bagian dari aktifitas politiknya. Posisinya sebagai seorang Bu Nyai dan juga kepala sekolah Muallimat akan memberi

kemudahan untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam kurikulum pendidikan di Tambak Beras. Bagi alumni IAIN Sunan Kalijaga ini, politik, kekuasaan tidaklah terbatas pada suatu institusi negara saja.

Sama halnya dengan pemikiran Michel Foucault mendefinisikan habitat kekuasaan sebagai tak terbatas, kekuasaan ada di mana-mana, suatu jaringan subtil dari wacana, pengetahuan, kenikmatan, dan kekuasaan. Definisi ini mau menjelaskan dua hal: *Pertama*, dalam wacana, kekuasaan dan pengetahuan erat terkait karena bahasa menjadi alat untuk mengartikulasikan kekuasaan pada saat kekuasaan harus mengambil bentuk pengetahuan. Kekuasaan pengetahuan terkonsentrasi dalam kebenaran pernyataan-pernyataan ilmiah. Karena itu, semua masyarakat berusaha mengontrol dan mengatur wacananya. Padahal strategi kekuasaan melekat pada kehendak untuk mengetahui. Semua orang cenderung ingin tahu. Maka, semua orang menjadi subyek potensial bagi perputaran kekuasaan.

*Kedua*, kekuasaan bekerja dalam jaringan. Dalam jaringan itu, orang-orang selalu dalam posisi menjalankan kekuasaan atau menderita kekuasaan. Kekuasaan tidak bisa dimiliki, tetapi sirkulasi. Orang menginginkan tetap dalam sirkulasi sehingga mengikuti arusnya untuk bisa bertahan. Maka, bukan individu memberi bentuk kepada kekuasaan, tetapi pertama-tama kekuasaan membentuk dan menghasilkan individu tertentu. Hanya orang luar biasa bisa memberi bentuk pada kekuasaan. Dengan demikian menjadi jelas mengapa kekuasaan bisa mengubah rakyat kecilpun menjadi lupa diri. Kekuasaan ini tidak terkait langsung dengan maksud atau keputusan.

Dalam perspektif Foucault, pengetahuan dilahirkan dalam bingkai kekuasaan agar kekuasaan itu dapat efektif dan operasional. Bukan pengetahuan yang menjelmakan diri dalam kekuasaan agar pengetahuan itu efektif seperti kata Francis Bacon (tokoh aliran modernisme), tetapi kekuasaanlah yang menjelma ke dalam pengetahuan itu agar kekuasaan itu efektif. Menurut Bacon, manusia perlu meraih pengetahuan karena dari situ akan menggenggam kekuasaan. Namun, sebaliknya bila mengikuti Foucault, jika kekuasaan telah diraih maka otomatis akan mengantongi pengetahuan. Pemikiran modernisme, dalam kehidupan sosial, menggambarkan hubungan itu sebagai *truth (knowledge), right, dan power*. Foucault menggambarkannya sebagai *power, right dan truth (knowledge)*.

Bagi para santri mereka tidak punya *power* untuk menunjukkan sikap secara langsung atas ketidaksukaannya jika pada pengasuh pesantren terjun di dunia politik. Karena takut dilabel sebagai santri yang “mbalelo” (pemberontak). Bagi mereka yang sudah tidak nyaman dengan lingkungan pesantren yang tanpa kiai atau nyai, biasa mereka memilih jalan tengah, yaitu dengan pindah ke pesantren lain yang mereka rasa lebih mendapat perhatian dari sang pengasuh pesantren. Hal ini dialami oleh Nisa’ yang pada awal semester kuliah di Staibu, dia berada di pesantren yang pengasuhnya aktif di parpol.

**Nggak masalah** kiai ikut politik, selama dia tidak berusaha memanfaatkan kepentingan pribadi atau kelompoknya pada para santrinya, ya sah-sah saja. Dan juga asalkan apa yang ada di pondok yang sudah diterapkan tidak terbengkalai. Kan kadang-kadang seperti ini... kiai itu di pondok aja nggak usah ikut ikut dunia politik. Kemudian dibantah, ya nggak papa kalau di pondoknya udah selesai, seperti ibu rumah tangga, kalau urusannya udah selesai ya nggak papa. Kalau memang kiai itu dianggap mampu ya nggak apa-apa, asalkan dia tidak

meninggalkan tugasnya di pondok atau misalkan kalau meninggalkan udah ada yang menggantikan, sehingga pondoknya nggak kacar-kacir. Karena ada juga beberapa kasus, saya juga pernah mengalami, ketika kiainya ikut politik, pondoknya itu akhirnya kegiatannya mati, kepentingan orang banyak dikorbankan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang sifatnya cuma sesaat.

(Nisa', Staibu)

Sekarang mahasiswa semester tujuh ini sudah pindah ke pesantren lain di mana kiai dan nyai aktif memberikan pengajian dan perhatian pada santrinya. Dia merasa lebih mantap jika memperoleh ilmu langsung dari sang pengasuh. Selain itu dia merasa menambah tambahan wawasan, karena sang pengasuh juga aktif melakukan diskusi-diskusi dengan santrinya saat pengajian.

Namun perasaan tidak *sreg* terhadap kiai yang bermain politik, bukan hanya kondisi pesantren yang menjadi penuh masalah. Tapi sering kali ketika sudah asyik dengan kegiatan parpol, apalagi menjelang pemilu, maka terkadang agama digunakan serta dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan massa. Agama dibawa serta dijadikan kendaraan untuk menuju panggung kekuasaan, serta tidak segan-segan menyitir ayat-ayat al-Quran yang bertujuan untuk kepentingan partai tersebut.

Sikap menolak terhadap kiai yang terjun ke politik tidak hanya dilakukan oleh santri yang merasakan langsung diasuh oleh kiai atau nyai yang kini aktif menjadi anggota dewan. Tapi sikap tersebut juga diungkapkan oleh santri lain yang pengasuhnya masih tetap *istiqomah* mengasuh pesantrennya. Hal ini dilontarkan oleh Fathih yang sangat kagum dengan Bu Nyai pengasuhnya yang begitu teguh untuk tetap

berada di pesantren, meskipun godaan untuk aktif di politik begitu banyak.

Kalau pengasuh itu aku **keberatan banget**, karena jadi kurang diperhatikan. Kita kan juga sungkan kalau mau konsultasi atau apa, soalnya kan sudah sibuk. Akhirnya santri di pondok itu berkurang. Ketika orang nggak sibuk kan bisa dekat sama yang Di Atas, kalau orang sudah sibuk susah lho untuk dekat sama Yang Di Atas. Sedangkan yang dibutuhkan santri adalah do'anya pengasuh. Kalau pengasuhnya dekat sama yang Di Atas, Insya Allah santrinya selamat, kalau nggak udah nggak tahu deh.  
(Fathih, Ikaha)

Bagi mahasiswa Ikaha yang sekarang aktif di berbagai organisasi ini, memandang nilai utama seorang ulama adalah ketika dia tetap menjaga perannya untuk 'amar ma'ruf nahi munkar dengan tetap melaksanakan tugasnya sebagai pencerahan bagi umat manusia sesuai dengan kedudukannya sebagai para pewaris Nabi (*waratsatul ambiya*). Tentunya dengan peran tersebut doa dan barokahnya para ulama itu yang diharapkan. Dan itu bukan sembarang doa, tapi sebuah doa yang bisa tetap membawa umat ini pada keselamatan bukan kehancuran dan pecah belah. Seperti penuturan seorang bendahara BEM Ikaha atas alasannya yang tidak mendukung semakin banyaknya kiai di Jombang yang *note benenya* sebagai ulama NU, "kesengsem" dengan dunia politik saat menjelang pemilu 2004.

Saya **nggak setuju**, karena apa? jangan-jangan pak kiaiinya sendiri belum punya *basic* pendidikan politik yang benar. Akhirnya dari segi dukungan dia memang menang, karena dia lebih dekat dengan masyarakat. Tapi SDM dari kiai itu sendiri itu yang kita pertanyakan, soalnya dari awal itu memang bukan porsinya. Akhirnya yaitu bangsa ini semakin carut marut, terus nanti santrinya sendiri jadi terbengkalai. Berpolitik itu nggak harus dia sendiri yang terjun, biar adil lah, kan ada porsi-porsi tersendiri. jurstru karena kiai berpolitik inilah yang membuat



pesantren nilainya semakin nggak ada, akhirnya pesantren sendiri menjadi kacau-balau, karena kiai nggak ngajar ngaji. Kiai harus tetap pintar tentang politik untuk ngajari santri-santrinya kritis.

(Izzah, Ikaha)

Selama ini banyak santri dan warga NU lainnya, hanya dijadikan pemandu sorak (*cheer leaders*), alat mobilisasi dan tawar-menawar ekonomi-politik para elitnya. Para elit pesantren, yang juga elit NU semakin masuk dalam kerja-kerja politik praktis. Kondisi itu tak pelak lagi telah membalikkan posisi NU dari organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyah-ijtima'iyah*) menjadi sebuah organisasi politik (*jam'iyah siyasiyah*). NU kian tergiring ke arus perebutan kekuasaan-politik. Padahal, gelombang kuat yang membawa NU ke dalam pusaran politik praktis ini telah menelan ongkos yang tidak murah. Bahwa terjunnya para kiai NU terutama yang duduk dalam struktur kepengurusan ke kancah politik praktis telah menguras "deposito" bidang-bidang kultural NU seperti dakwah, pendidikan, penyantunan sosial, dan sebagainya.

Jika arus keterlibatan aparatur NU dalam politik tidak segera dibendung, maka amat boleh jadi akan timbul dampak-dampak negatif bagi NU sebagai organisasi yang memiliki perhatian serius pada kerja-kerja pemberdayaan masyarakat NU di level bawah. Seyogianyalah pendekatan politik (*political approach*) tidak mengorbankan pendekatan kultural (*cultural approach*) yang dalam dua dasawarsa terakhir telah menunjukkan hasil yang mulai kelihatan.

Belakangan perhatian terhadap perbaikan pendidikan NU, ekonomi warga NU, persisnya pemberdayaan masyarakat NU di tingkat akar rumput semakin sepi. Para kiai yang dahulu sangat gigih berjuang di ranah

kultural, sekarang telah banyak memasuki gelanggang baru dengan menjadi anggota legislatif, pemain dan broker politik. Sehingga tidak bisa dipungkiri akan ikut arus politik yang penuh intrik dan *money politics*. Hal ini dilontarkan oleh mahasiswa Unipdu yang alasan ketidaksenangannya melihat kiai berpolitik juga mendukung apa yang dikatakan Izzah.

Saya **kurang setuju** ya, karena kiai atau ulama itu kan panutan masyarakat. Ketika terjun di dunia politik, maka dia kan ikut arus atau intrik-intrik yang ada di dunia politik yang sarat dengan korupsi, kolusi dan *money politics* serta saling menjatuhkan. Menurut saya kiai harus tahu perkembangan politik yang terjadi sekarang ini, tapi itu hanya dijadikan sebagai wacana atau pengetahuan saja dan itu bisa digunakan untuk mendidik atau sebagai pembelajaran politik bagi santrinya, bukan untuk masuk menjadi pelaku politik. Biarlah politik itu tetap menjadi urusan orang-orang yang selama ini berada di dunia tersebut yang mempunyai latar pendidikan politik.. Dan kiai tetap saja pada posisinya sebagai ulama.  
(Atik, Unipdu)

Bagi Atik maupun Izzah, politik itu bukan wilayah otoritas kiai. Apalagi dalam dunia modern sebagaimana dikatakan oleh Emile Durkheim, bahwa orang akan semakin terspesialisasi pada keahliannya masing-masing. Keterlibatan kiai di bidang politik hanya akan mengambil wilayah dan hak orang lain yang sebenarnya lebih punya kemampuan dan keahlian di bidang tersebut. Dengan kata lain para ulama tersebut menggunakan "aji mumpung" untuk terjun ke dunia politik tanpa didasari oleh kemampuan dan wawasan yang memadai.

Tentu saja keberadaan kiai dalam gelanggang politik tidak hanya berdampak negatif saja, ada juga nilai positif yang itu bisa dirasakan oleh umatnya (santri). Secara tidak langsung akan memacu santri tersebut untuk bisa meraih seperti apa yang telah diraih oleh pengasuhnya. Hal ini

dikatakan oleh santri Tambak Beras yang justru mendapat pendidikan politik ketika menuntut ilmu di ponpes yang bernafaskan NU tersebut, meski dia juga merasakan dampak negatif dari pengasuh pesantren yang kini sudah tinggal di Jakarta berkaitan dengan profesinya sebagai anggota legislatif.

**Kadang setuju, kadang juga nggak.** Setujunya, itu kan hak mereka juga untuk berpolitik. Dan untuk mahasiswa kan cara pandangnya lebih luas, jadi bisa menjadi suatu contoh juga, bisa menjadi suatu panutan bagi saya untuk bisa sampai ke sana. Bahkan Bu Nyai sini kan juga di DPR pusat dari PPP dan juga PDI., pernah juga yang Golkar terus pindah ke PDI, ya kurang tahu ya kepentingannya apa? Negatifnya, seharusnya kiai, bu nyai itu kan mengurus pondok, kenapa harus diributkan dengan urusan-urusan seperti itu, apalagi itu kan urusan keduniawian, harusnya kan ngurus santri. Cukup ngaji ajalah, nggak harus terjun ke dunia politik praktis.  
(Lilik, Staibu)

Kalau lihat dari ikut tidaknya sih, kenapa tidak? Kan seperti itu. Tapi kenyataannya banyak sekali yang menyalahgunakan profesi itu. Kalau masalah ikut sih **boleh-boleh saja**, apakah mungkin karena dia sebagai kiai kemudian nggak boleh ikut politik, kan nggak bisa juga. Mungkin selama ini yang disayangkan, yang dipandang negatif kan adanya permasalahan yang ketika beliau-beliau ikut politik ternyata melenceng, kalau seperti itu saya **nggak setuju**. Lebih baik beliau mengurus pesantrennya saja.  
(Ana, Staibu)

Sejalan dengan pernyataan kedua santri di atas, Kiai Sahal Mahfudz selaku Rais 'Am PBNU sudah berkali-kali menyampaikan perihal pentingnya berpegangan pada khittah NU pada saat pemilu legislatif maupun pemilihan presiden. Masdar Farid Mas'udi sebagai PIH ketua Umum PBNU telah menegaskan perihal netralitas NU terhadap pemilihan presiden. Akan tetapi, seruan dari puncak hirarki NU itu seperti tidak memiliki gema sama sekali di tengah syahwat politik para elit NU plus para

kiai yang kian mengharu biru. Statemen netralitas NU itu seakan tidak bermakna apa-apa. Oleh karena itu menjadi penting bagi PBNU untuk mengambil jalan organisatoris yang amat tegas. Yaitu, dengan memecat seluruh pengurus NU yang nyata terlibat dalam tim sukses pasangan capres-cawapres. Sebab, dengan cara inilah kiranya NU sebagai organisasi sosial keagamaan akan terselamatkan dan secara pragmatis tidak ikut tumbang, meskipun calon yang berasal dari NU (Hasyim Muzadi dan Solahudin Wahid) kalah dalam pertarungan.

Dengan ini, kiranya NU akan terbebas dari "belenggu" politik partisan. Sehingga model politik NU bisa lebih difokuskan pada wacana moral dan alokasi nilai. Bahwa, kehadiran sebuah partai politik yang menjadi medium artikulasi dan penyaluran aspirasi warga NU, itu merupakan perkara yang tidak bisa dibantah. Akan tetapi, tidaklah dengan cara menyulap NU sebagai partai politik. Dengan perkataan lain, kerja politik praktis hanya dimungkinkan untuk dilakukan di dalam partai politik, dan bukan di dalam wadah organisasi NU.

Berkaitan dengan "perselingkuhan" ulama atau pengasuh pesantren untuk masuk ke dunia politik baik secara transparan maupun tersembunyi, menurut Said Aqil Siradj, Rois Syuriah PBNU, mengatakan ada beberapa alasan yang melatarbelakangi tindakan mereka. *Pertama*, alasan historis, yaitu tradisi yang dirintis pendiri pesantren tersebut terbuka kepada siapa saja, termasuk kepada elit politik atau pejabat teras. Misalnya: Kiai Ahmad Fawaid As'ad, pengasuh PP Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang meneruskan tradisi kakek dan abahnya, yang mendirikan pesantren sukorejo. Kiai Syamsul Arifin -kakek Kiai Fawaid-

bersedia menerima kedatangan Van Der Plas (Gubernur Hindia Belanda Jawa Timur), Abdul Hamid Ono (pembesar Jepang), dan Panglima Divisi Untung suropati Malang-Besuki. Atau Kiai As'ad - abah Kiai Fawaid- yang menerima elit parpol dan pejabat teras dari petinggi sampai presiden.

*Kedua*, alasan teologis. Sebagian kalangan pesantren menganggap politik bisa dijadikan sebagai salah satu alat perjuangan dan mempermudah dakwah mereka. Mereka berpendapat, partai politik sebagai alat perjuangan yang berlandaskan kepentingan umum (masalah al-ammah), bukan kepentingan kelompok, apalagi pribadi. Di sini politik lebih dimaknai sebagai sendal dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan publik. Memang salah satu fungsi parpol adalah merebut kekuasaan. Kekuasaan perlu diraih untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, demokratis, aman dan sejahtera. Jika tujuan tersebut tidak bisa dicapai melalui kekuasaan- yang untuk mendapatkannya harus melalui partai politik- maka mendukung partai politik atau bahkan berperan aktif di parpol menjadi penting. Dalam salah satu term fiqh dikatakan *ilwasail hukma al maqashid* (suatu proses hukum, sangat tergantung kepada sasaran yang hendak dicapai).

*Ketiga*, alasan strategis-pragmatis, agar pesantren mempunyai kekuatan dan jaringan dengan kekuasaan. Sebab pesantren yang mempunyai basis massa yang kuat, kalau kekuatannya tidak dimanfaatkan akan terbuang percuma begitu saja. Karena itu harus ada tawar-menawar politik dan membangun kontrak politik dalam pengertian yang sangat pragmatis.

Terlepas dari *because to motive* maupun *in order to motive* yang berada dalam benak para ulama (pada dasarnya juga membawa bendera NU, karena mereka para elit NU) yang menerjuni dunia politik, mereka harus tetap memperhatikan bahwa pesantren maupun NU sendiri, yang perlu dikembangkan bukanlah "politik kekuasaan" yang cenderung menguntungkan para elitnya. Melainkan yang jauh lebih fundamental adalah "politik kewargaan" yang coba berjuang bagi terentasnya warga NU dari belitan penderitaan dan kemiskinan yang selama ini menderanya, serta memajukan pendidikan pesantren sehingga menghasilkan SDM yang mampu menghadapi era global. Kalaupun harus terjun ke dunia politik, selayaknya bisa dijadikan jembatan antara kepentingan rakyat dan penguasa, sehingga tetap membawa manfaat bagi semua pihak. Penguasa tidak akan menstigma kiai sebagai "pemberontak" dan umat pun tidak melabelinya sebagai "antek" pemerintah. Dan peran mereka sebagai penjaga moral umat dan aktor yang melakukan kontrol terhadap pemerintah tetap berjalan terus tanpa terpengaruh oleh berbagai intrik politik.

Namun kebanyakan apa yang dilakukan oleh para ulama maupun fungsionaris NU yang terlibat dalam gerbong politik, alih-alih hendak mempertahankan khittah NU, yang terjadi justru upaya merontokkan sendi-sendi khittah sendiri. Jika demikian, berarti gerakan kembali ke Khittah 1926 telah digembosi dari dalam NU dan oleh orang NU sendiri. Dan disinilah letak persis kekeliruannya. Akhirnya, sebelum semuanya terlambat, maka membendung arus politisasi NU dalam rangka mensterilkan organisasi NU dari para petualang politik yang bersemayam

di dalamnya menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Politisasi NU adalah titik hujan yang akan mengikis batu-batu fondasi NU sendiri.

Goda-godaan politik praktis yang menjebak gerakan kultural haruslah dieliminasi seminimal mungkin, sebab pengalaman sejarah telah membuktikan bahwa tarikan politik praktis biasanya justru malah menyebabkan stagnasi pemikiran dan terlalaikannya pencerahan terhadap masyarakat bawah, sehingga kemudian patut dipertanyakan apa sebenarnya yang dicari para ulama dengan terjun ke dunia politik praktis? Jangan-jangan mereka terkena *post power syndrom* atau inferioritas, atau atas nama “kepedulian”, para kiai justru terjebak pada “bunuh diri kelas”, yang justru akan menurunkan martabat dan peran keulamaannya. Semoga saja itu semua tidak terjadi, karena siapa lagi yang akan menjadi penjaga moral bangsa ini, jika yang seharusnya bertugas sebagai penjaga moral justru yang harus dijaga.

**TABEL 5.1**  
**Identitas Informan dan Wacana Santri Perempuan**  
**tentang Politik**

Identitas Informan	Wacana Politik
1. Fia ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif) ⇨ FE Undar; santri Puspuri ⇨ Aktif di HMI (anggota) dan Imatansi	Politik itu kan kotor, kalau menurut aku. Ya memang kalau kita nggak mengikuti dunia politik, kita nanti ketinggalan. Sebenarnya politik itu kan membodohi orang yang nggak tahu, ngomongnya kalau di depan itu gini, tapi kan kenyataannya yang dilakukan kan udah beda. Jadi menurut aku politik itu udah nggak sesuai dengan apa yang ada, realitanya, orang ya dibingungkan dengan politik itu
2. Indah ⇨ Orang tua tidak berbasic pesantren ⇨ FE Undar; santri Puspuri ⇨ Aktif di FMN (anggota) dan Imatansi	Politik itu kan suatu <b>strategi untuk menjadi pemimpin</b>
3. Ika ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif) ⇨ FAI Undar; santri Puspuri ⇨ Aktif di PMII (anggota)	Politik itu kan cuma nyari kursi, jabatan, nggak pernah mikirin rakyatnya seperti apa, mungkin dia cuma di atas enak-enak, nggak pernah mikirin aspirasi masyarakat seperti apa. Politik itu kan dunia gelap, mesti duit yang main, <i>money politics</i> selalu ada
4. Een ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga moderat) ⇨ Psikologi Undar; santri Fatkhul Ujum ⇨ Aktif di BEM (pengurus)	Kalau dari pengalaman saya, politik itu macem-macem. Dalam pendekatan pun perlu politik, dalam pengembangan program juga perlu politik, yang jelas politik itu kan juga <b>kembali ke orangnya</b> . Ada memang politik itu yang tujuan dari awalnya nggak baik, politiknya bagaimana dia nanti bisa jatuh dan kita bisa masuk ke sana. Kadang-kadang saya baca seperti itu, kalau politik yang seperti itu saya kurang sepakat. Kalau katanya musyawarah itu harus menghormati pendapat orang lain, ternyata di situ itu nggak. Politik seperti itu kan kurang dewasa. Kalau harus saling menjatuhkan nggak akan damai
5. Nia ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif) ⇨ FAI Undar; santri Puspuri ⇨ Aktif di PMII (anggota)	Politik itu saya lihat <b>kesannya negatif</b> . Orang-orang yang bergerak di bidang politik itu saling aduh omongannya, sifatnya lebih ke duniawilah. Jadi apapun yang dilakukan yang penting menang. Kita yang nggak ngerti apa-apa kan yang jadi korban
6. Hawa ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif) ⇨ FE Undar; santri Puspuri ⇨ Aktif di PMII (anggota) & Jamhur	Politik itu penuh dengan permainan dan bagi saya <b>politik itu menakutkan</b>



<p>7. Ima                  ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif)                  ⇨ FAI Undar; santri Al-Khodijah - Darul Ulum                  ⇨ Aktif di KSR dan Jamhur (anggota)</p>	<p>Politik itu <b>identik dengan kekerasan</b>, trus yang ada cuman keegoisan mementingkan kelompoknya sendiri, bukan kepentingan rakyat banyak</p>
<p>8. Ka'e                  ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga moderat)                  ⇨ Fakultas Tarbiyah Ikaha; santri Walisongo Tebuireng                  ⇨ Aktif di PMII (pengurus) &amp; BEM</p>	<p>Politik itu <b>persaingan untuk mendapat kekuasaan</b>, artinya persaingan yang mana tergantung kita yang menilai, kalau kita memandang itu sehat maka persaingan itu pun sehat jadinya. Tapi kalau kita sudah punya pemikiran politik itu sudah menjurus ke ide-ide, nilai-nilai yang <i>negatif thinking</i> maka akhirnya hasilnya pun akan negatif. Jadi tergantung pada persepsi awal kita, kalau kita memandang positif maka hasilnya pun akan positif.</p>
<p>9. Fathih                  ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif)                  ⇨ Fakultas Tarbiyah Ikaha; santri Walisongo Tebuireng                  ⇨ Aktif di PMII (anggota) &amp; BEM</p>	<p>Orang-orang di politik itu kan bermain <b>strategi untuk memperoleh kekuasaan</b></p>
<p>10. Mila                  ⇨ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif)                  ⇨ Fakultas Tarbiyah Ikaha; santri Walisongo Tebuireng                  ⇨ Aktif di HMI (anggota)</p>	<p>Politik itu <b>dunia yang kotor</b></p>
<p>11. Izzah                  ⇨ Orang tua tidak berbasic pesantren                  ⇨ Fakultas Tarbiyah Ikaha; santri Latifiyah II Tambakberas                  ⇨ Aktif di PMII (pengurus)&amp;BEM</p>	<p>Politik itu sebuah <b>aturan</b>, tidak hanya dalam konsep berbangsa dan bernegara saja, tapi dalam hal yang kecil pun juga ada politik</p>
<p>12. Lilik                  ⇨ Orang tua tidak berbasic pesantren                  ⇨ Jurusan PAI Staibu; santri Latifiyah I Tambakberas                  ⇨ Aktif di PMII (anggota)</p>	<p>Politik itu bukan sesuatu yang tabu untuk diketahui. Sekarang orang sudah biasa untuk mengetahui dan belajar tentang politik. Apalagi di era keterbukaan seperti saat ini, penting sekali untuk punya wawasan politik. Meski sebenarnya dunia politik saya nggak suka, <b>dunia gelap</b>, karena idealisme apapun akan luntur ketika seseorang masuk di dalamnya. Dulu ada aktivis PMII yang masuk Golkar. Ketika ditanya kenapa masuk ke partai tersebut? Katanya ingin mewarnai di situ, tapi ternyata justru tidak mewarnai malah diwarnai.</p>
<p>13. Susi                  ⇨ Orang tua tidak berbasic pesantren</p>	<p>Politik itu ya ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk <b>ketatanegaraan</b> dan kepemimpinan suatu negara, pemerintahan suatu negara</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Jurusan PAI Staibu; santri Latifiyah I Tambakberas</li> <li>⇒ Aktif di PMII (anggota)</li> </ul>	
<p>14. Ana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif)</li> <li>⇒ Jurusan PAI Staibu; santri Latifiyah I Tambakberas</li> <li>⇒ Aktif di PMII (pengurus)</li> </ul>	Politik kan hanya sebuah <b>aturan</b> , ketika membicarakan politik berarti kita membicarakan <b>pemerintahan</b> .
<p>15. Nisa'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif)</li> <li>⇒ Jurusan PAI Staibu; santri As-Saidiyah II Tambak Beras</li> <li>⇒ Aktif di PMII (pengurus) &amp; BEM</li> </ul>	Politik itu <b>aturan main</b> untuk menggunakan kekuasaan yang kemudian dibingkai dalam suatu sistem yang namanya negara. Jadi kalau kita mau main di situ kita harus tahu aturan mainnya.
<p>16. Ais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Orang tua berbasic pesantren (keluarga moderat)</li> <li>⇒ FAI Unipdu; santri As-Safri Darul Ulum</li> <li>⇒ Aktif di PMII (pengurus) &amp; BEM</li> </ul>	Politik itu permainan <b>untuk mencari sebuah kekuasaan</b>
<p>17. Nana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Orang tua tidak berbasic pesantren</li> <li>⇒ FAI Unipdu; santri Al-Khodijah Darul Ulum</li> <li>⇒ Aktif di PMII (pengurus)</li> </ul>	Politik itu kan sarana <b>untuk memperoleh kekuasaan</b>
<p>18. Atik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Orang tua berbasic pesantren (keluarga konservatif)</li> <li>⇒ FIA Unipdu; santri Al-Khodijah Darul Ulum</li> <li>⇒ Aktif di HMI (pengurus) dan BEM</li> </ul>	Tahu sendirilah orang yang di dunia politik itu <b>selalu berebut uang, jabatan</b> . Ya siapa sih yang nggak silau kalau dapat uang dengan mudah, tanpa harus banting tulang

Melalui tabel di atas diketahui bahwa wacana santri perempuan tentang politik sangat beragam. Ada yang berwacana politik sebagai hal yang negatif, melihatnya sebagai dunia kotor, penuh kekerasan, serta selalu berebut jabatan dan kekuasaan. Para aktivis kampus ini, masih melihat

politik diwarnai oleh kualitas sifat maskulin yang penuh konflik. Sehingga wilayah itu bukan domain perempuan dengan sifatnya yang feminin. Bagi mereka, realitas politik disarafi oleh dengan *horrocracy*- wajah yang penuh dengan kepalsuan, *chaos* dan horror.

Santri yang berwacana negatif, sebagian besar berasal dari latar belakang orang tua yang mempunyai dasar pendidikan dari pesantren. Bapak atau ibu yang pernah belajar di pesantren, terutama aliran salaf maka akan lebih intens dan ketat dalam menginternalisasi nilai-nilai agama dengan dilandasi oleh budaya patriarki. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi wacana santri tentang politik lebih ke arah negatif. Selain itu juga dipengaruhi oleh mobilitas mereka di organisasi. Ketika mereka hanya aktif sebagai anggota maka pengetahuan atau wawasan mereka lebih terbatas dibanding mereka yang menjadi pengurus di organisasi. Hal ini kemudian menyebabkan cara pandang mereka juga masih terbatas, sehingga politik pun masih dilihat dalam sisi yang biner patriarkhis yang cenderung negatif.

Bagi yang berwacana politik pada tataran negara (*state*) dan kekuasaan (*power*), maka inti dari politik adalah lebih pada lembaga-lembaga kenegaraan. Mereka memandang politik secara proporsional, tidak hanya dari sudut yang negatif, tapi lebih *positive thinking*. Bahwa aktor juga berperan dalam menentukan baik dan buruknya suatu sistem politik. Sehingga kekuasaan dianggap sebagai hasil politik yang dicapai sesuai ketentuan dan penguasaan atas kemampuan, kecakapan, kesanggupan dan kepandaian.

Para aktivis yang berwacana seperti itu, mempunyai latar belakang keluarga yang tidak mempunyai *basic* pendidikan pesantren. Atau kalau pun orang tua pernah menjadi santri di pesantren, tapi pola pengasuhan terhadap

anak-anaknya penuh dengan nilai demokratis. Dengan *back ground* tersebut, maka para santri memiliki wacana seimbang, dalam arti melihat sesuatu juga dari sisi positif dan negatif, bahkan cenderung ke muatan positif. Begitu juga dalam melihat politik.

Di samping itu di organisasi, mereka memiliki jabatan struktural, yang kemudian memungkinkan mereka melakukan interaksi dengan dunia luar yang lebih luas. Mobilitas yang tinggi dan persentuhannya dengan dunia di luar pesantren yang luas, secara tidak langsung juga berpengaruh pada pola pikir mereka. Pemahaman akan politik dan relasi gender lebih egaliter. Politik lebih dilihat dari sisi positif dan bisa memberi peluang pada perempuan untuk berpartisipasi.

Berbagai wacana politik yang muncul dalam penelitian ini tidak lepas dari tampilan realitas politik, serta konstruksi sosial dan budaya patriarki yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dominasi budaya patriarki, membuat perempuan disingkirkan dari kehidupan publik (politik). Di samping itu hegemoni negara dan agama (melalui penafsiran teks agama yang misoginis) telah mengkonstruksi dan mengukuhkan ketimpangan gender dalam masyarakat dengan melegitimasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk memarginalkan perempuan dalam ranah politik. Pemahaman politik yang didasari pada biner patriarkis, akhirnya menciptakan suatu wacana politik yang lebih bersifat negatif dari pada wacana politik yang bersifat positif.

Namun demikian wacana politik ini tidak sepenuhnya berimplikasi terhadap respon santri perempuan terhadap isu-isu politik. Respon mereka, juga dipengaruhi oleh pergumulannya dengan organisasi di luar pesantren

dan *back ground* keluarga di mana sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya pertama kali mereka terima. Selain itu juga basic pesantren saat mereka pertama kali belajar ilmu agama juga berimplikasi pada respon terhadap isu politik yang muncul.

Baik aktivis yang berwacana positif atau negatif mengenai politik, sepakat dengan kuota 30 persen perempuan di legislatif. Kuota dilihat sebagai peluang bagi perempuan untuk masuk dalam ranah politik dan sebagai tempat untuk unjuk kemampuan perempuan di dunia publik, serta bisa lebih memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya yang selama ini dirasa belum dicapai secara maksimal.

Begitu juga dengan pemilu dan golput, para santri merespon secara positif. Mereka menganggap pemilu itu sebagai hal yang penting dalam sebuah proses demokrasi. Meski ada yang masih meragukan nilai sebuah pemilu yang dianggap hanya sebagai sebuah permainan politik yang dilakukan oleh para elit. Sehingga golput itu dianggap suatu bentuk kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pemerintahan selama ini. Bahkan golput dilihat sebagai suatu hak asasi tiap individu.

Wacana positif tentang politik ternyata tidak berimplikasi secara signifikan terhadap isu kepemimpinan perempuan. Walaupun mereka menerima seorang perempuan menjadi *leader*, itu dilakukan dengan syarat tidak ada lagi laki-laki yang mampu menjadi pemimpin. Kalau masih ada laki-laki maka perempuan tidak diperkenankan berada pada posisi puncak. Tapi mereka yang sepenuhnya tidak menerima kepemimpinan perempuan, ternyata wacana politiknya juga negatif. Walaupun ada yang berwacana politik

secara positif, namun dia memegang teguh nilai salaf, sehingga itu yang membuat dia secara tegas menolak jika perempuan jadi pemimpin.

Respon terhadap isu kepemimpinan perempuan ini berpengaruh pada opini atas fatwa ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Sikap setuju atas fatwa tersebut didasarkan atas alasan agama (sesuai dengan ajaran agama). Tapi, mereka yang mendukung kepemimpinan perempuan, menganggap fatwa tersebut mengandung kepentingan tertentu yang bernuansa politik.

Sama halnya dengan tanggapan terhadap isu dekonstruksi agama yang bias gender serta isu keberadaan dan pemikiran JIL (Jaringan Islam Liberal), sedikit banyak dipengaruhi oleh sikap kontroversi terhadap isu kepemimpinan perempuan. Jadi, cenderung ada suatu konsistensi dalam merespon empat isu politik ini. Namun tidak ada konsistensi dengan isu elit pesantren yang “bermain” politik, di mana para santri lebih banyak tidak setuju. Meski sebenarnya, keikutsertaan elit pesantren di dunia politik praktis juga bermanfaat bagi para santri. Mereka mendapatkan pendidikan politik, dan menjadi energi positif bagi santri yang ingin terjun di dunia politik, sebagai tauladan dan *support*.



**BAB VI**  
**PELUANG DAN KENDALA PEREMPUAN  
MASUK DI DUNIA POLITIK**

**BAB VI****PELUANG DAN KENDALA PEREMPUAN MASUK  
DI DUNIA POLITIK****6.1. Perempuan di Dunia Politik**

Sekarang, bagaimana dengan peran perempuan dalam ranah politik? Inilah yang hingga kini menjadi polemik berkepanjangan di kalangan ulama, bahkan di kalangan para politikus muslim, terutama menyangkut legalitas perempuan untuk menjabat kepala negara. Menjadi perempuan di tengah masyarakat patriarki memang tidak mudah. Terlebih ayat-ayat Tuhan yang dijadikan tameng pengendalinya, serta disokong secara sosiologis oleh masyarakat setempat.

Perjalanan politik nasional sendiri dari masa ke masa hampir tidak memberi tempat layak kepada kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam posisi simetris, sederajat, dan saling bersinergi dengan laki-laki. Politik bahkan secara kultural lebih banyak mengeksploitasi perempuan daripada menjadi wadah pemberdayaan.

Sebenarnya kesetaraan dalam kesempatan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia untuk terjun ke dunia politik sudah mendapat payung legalitas dari hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945. Sehingga persoalan yang tersisa adalah kapasitas kemampuan masing-masing individu untuk diapresiasi dalam kehidupan politik. Dengan landasan tersebut, tentunya menyatakan bahwa perempuan punya hak untuk berpolitik.



Hak untuk berpolitik dalam artian, hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan<sup>1</sup>, dan untuk memperoleh kekuasaan, serta memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan presiden.<sup>2</sup> Hak-hak politik perempuan tentunya akan terkait dengan hak asasi manusia secara umum. Hak asasi ini dimiliki tanpa membedakan dasar bangsa, ras, agama, begitu pula jenis kelamin, karena dasar hak asasi ini adalah bahwa manusia memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>3</sup>

Untuk itu sudah selayaknya jika masuknya perempuan di dunia politik direspon secara positif. Hal ini seperti dikatakan oleh mahasiswa Staibu dan Ikaha yang berusaha menimba ilmu tidak hanya melalui dunia pesantren tapi juga lewat organisasi yang digelutinya.

Kalau saya **sepakat sekali**, kalau memang SDM itu mumpuni jadi nggak malu-maluin ketika duduk di sana. Karena mayoritas penduduk Indonesia itu lebih banyak wanitanya, sebenarnya kepentingan-kepentingan perempuan harus lebih banyak diaktualisasikan, lebih banyak diformulasikan. Kalau egoisme pasti ketika anggota dewan yang laki-laki, mereka juga akan ngomong kepentingan mereka sendiri, tentang kepentingan perempuan mereka mana tahu atau memang pura-pura nggak tahu. Jadi kalau ada anggota dewan dari perempuan, sangat sepakat sekali, yaitu salah satunya. Tapi SDMnya harus benar-bener oke dan memang benar-bener menyuarakan kepentingan perempuan.  
(Nisa', Staibu)

Justru itu saya **sangat sepakat sekali**, karena memang saya melihat ya yang bersuara selama ini laki-laki yang mewakilkan, yang mengatasnamakan saya menyuarakan suara perempuan tapi itu justru tidak sepenuhnya menyuarakan suara perempuan. Alangkah baiknya kalau perempuan itu yang berani menyuarakan hak-haknya sendiri, menyuarakan kebutuhannya, seharusnya yang dibutuhkan perempuan itu lho ini sebenarnya. Saya sangat senang dan sangat tertarik kepada orang yang

<sup>1</sup> Loc. Cit. Hal. 36

<sup>2</sup> Chusnul Mar'iyah, Kepemimpinan Politik Perempuan, dalam Jurnal Perempuan, edisi 07, 1998, hal 16

<sup>3</sup> Op.cit hal 12

seperti itu, yang jelas dia berani memperjuangkan itu menurut koridor-koridor keagamaan.  
(Ka'e. Ikaha)

Selama ini politik ditempatkan sebagai sarana pengambilan kebijakan publik. Dan selama itu pula jarang sekali kebijakan publik yang peka terhadap kepentingan perempuan. Untuk itu masuknya perempuan di dunia politik sangatlah penting dan diharapkan bisa memberikan warna dan nuansa kebijakan yang mempunyai sensitif gender. Karena rasa dan kehendak perempuan tidak mungkin terwakilkan oleh kaum lelaki pada tataran rumusan kebijakan. Masalah berskala nasional, seperti kesehatan ibu dan anak, reproduksi, perlindungan terhadap buruh perempuan, cuti hamil dan melahirkan, prostitusi, perdagangan perempuan dan anak, adalah sebagian persoalan spesifik perempuan yang selama ini tidak pernah meramaikan perdebatan kaum elit.

Selain itu, formula politik senantiasa berada dalam kecenderungan mengarus. Politik tidak sekadar formulasi aspirasi yang dikedepankan dalam ruang rapat mewah. Dengan miskinnya ideologi yang menjadi penghubung antara rakyat dan elit politik, kebijakan publik hampir selalu berupa perdebatan seputar wilayah kekuasaan demi mendapatkan dana dan akses berkuasa, dan jauh dari permasalahan-permasalahan pelik yang dihadapi perempuan baik dalam ruang publik maupun dalam ranah domestik.

Pada intinya, apa yang diinginkan perempuan adalah tersedianya ruang untuk berpartisipasi secara politik. Artinya, perempuan tidak hanya dijadikan objek pemenuhan suara pada agenda politik paling penting yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional, tetapi juga kesempatan

dan hak untuk bersuara dan menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan yang sensitif gender. Meskipun sebenarnya dalam hal suksesi kepemimpinan, keberadaan pemimpin perempuan masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan terutama para ulama. Hal ini diungkapkan oleh mahasiswa Unipdu yang mempunyai *background* keluarga politikus dari partai yang dilahirkan NU.

Saya rasa itu **hak semua manusia ya**, nggak membedakan. Jadi kalau bicara tentang keikutsertaan perempuan dalam politik itu ya bisa-bisa aja, cuman dalam segi memimpin suatu negara kan banyak orang yang memberi persepsi yang berbeda-beda.  
(Ais, Unipdu)

Selain itu ada juga informan yang setuju dengan masuknya perempuan di politik dengan syarat perempuan tersebut harus tetap mengetahui rambu-rambunya sebagai seorang perempuan. Di mana seorang perempuan tetap mempunyai kodrat yang itu tidak bisa menuntut keberadaannya sama persis dengan laki-laki. Pernyataan ini diungkapkan oleh Izzah yang sudah tiga tahun aktif di kepengurusan PMII komisariat Ikaha Tcbuireng.

**Sangat penting sekali.** Dan bagi kami ketika seorang perempuan bisa memahami dunia politik akan berpengaruh pada anak-anaknya. Tetapi saya kurang mendukung ketika perempuan itu sudah melampaui batas. Oke lah perempuan berpolitik tapi dia harus tetap memahami kodratnya sebagai wanita. Bukan berarti ketika dia sebagai wanita, dia minta sejajar dengan laki-laki dalam segala hal. Tetap ada batasan-batasannya. Bagi saya perbedaan itu justru keadilan.  
(Izzah, Ikaha)

Keadilan bagi Izzah bukan dilihat secara *fifty-fifty*, perempuan tidak harus sama persis dengan laki-laki. Perbedaan peran yang ada justru dianggap

sebagai keadilan. Dan ini seperti diungkapkan oleh Ratna Megawangi dalam buku *Membiarkan Berbeda?* Bahwa hubungan perempuan dan laki-laki merupakan kesatuan yang saling melengkapi. Masuknya perempuan ke dunia maskulin (atau dunia publik), telah menyebabkan peradaban modern semakin dominan diwarnai oleh kualitas maskulin. Oleh karena itu perlu mengembalikan kesadaran manusia akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas feminin dalam masyarakat.

Banyak para feminis yang semakin sadar bahwa pengapdosian kualitas maskulin, adalah sama saja dengan memisahkan perempuan dengan alam. Hal ini telah membuat ketidakseimbangan dalam peradaban modern sekarang ini begitu tidak seimbang, terlalu berat pada kualitas maskulin dan kurang pada kualitas feminin. Aliran ini dikenal dengan ekofeminisme.

Ekofeminisme ingin mengembalikan identifikasi perempuan dengan alam, sebagai usaha untuk membebaskan perempuan dari perangkap sistem maskulin yang membuat perempuan menjadi bimbang akan perannya. Sistem maskulin yang telah mewarnai peradaban modern, telah merusak dan menutupi nilai sakral kualitas feminin yang merupakan fitrah perempuan. Untuk itu perempuan harus bangkit untuk melestarikan kualitas feminin agar dominasi sistem maskulin dapat diimbangi, sehingga kerusakan alam, dekadensi moral yang semakin mengkhawatirkan dapat dikurangi.

Teori ekofeminisme ini tentunya akan semakin mempersulit pencapaian ide kesetaraan gender yang dicetuskan oleh para feminis liberal, sosialis dan radikal agar para perempuan dapat berkiprah secara

*fifty-fifty* di sektor publik. Namun di sisi lain ekofeminisme juga tetap menginginkan menghilangkan struktur hierarkhis dalam kehidupan masyarakat dan diganti dengan sistem matriarkat (horizontal). Ini justru membuat kerancuan dalam teori ini, sehingga dambaan untuk mewujudkan kesatuan dalam keragaman (*equality in diversity*) menjadi sulit dicapai.

Terlepas dari *equality in diversity* yang ingin dicapai oleh ekofeminisme untuk mewujudkan kesetaraan gender, perempuan tetap memiliki tempat dalam ranah publik (politik). Namun pada tataran realita, pemberian hak perempuan melalui terobosan politik masih belum ditopang struktur kebudayaan yang kompatibel dengan kesetaraan gender, dan proses ini akan banyak memakan waktu sebab transformasi kebudayaan bukan secepat membalik telapak tangan. Batu sandungan kedua adalah apakah pemberian hak ini dapat segera diikuti dengan meningkatnya kapasitas kaum hawa dalam mengelola kehidupan publik.

Dalam logika penyelenggaraan kehidupan publik yang maju, kapasitas dan kemampuan pemimpin adalah satu-satunya persyaratan yang tersisa dan berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Marjinalisasi kaum perempuan yang berlangsung sekian lama dengan sendirinya menurunkan kapasitas dan kompetensi kaum perempuan. Hal ini mudah dilihat dari keengganan orang tua yang memberi kesempatan anak gadisnya mengembangkan kemampuan intelektual karena dianggap percuma. Padahal, intelektualitas adalah syarat utama memasuki kehidupan publik.

Kini, pada saat satu demi satu atribut superioritas sosial kaum lelaki dirontokkan zaman dan kesetaraan gender makin mengemuka, terdapat kewajiban kaum perempuan menyegerakan diri mengejar ketertinggalan. Sehingga, kemudian dapat dimaklumi masuknya perempuan di dunia politik sebagai suatu pilihan bagi perempuan dan bukan suatu hal yang ditabukan lagi. Hal ini dikatakan oleh seorang mahasiswa psikologi Undar yang mengaku suka berorganisasi sejak SD, bahkan selalu menjadi ketua OSIS.

Perempuan masuk di dunia politik itu **sekarang ini sudah jadi pilihan** bagi mereka. Nggak papa sih, yang jelas kan mereka kan wakil dari parpol. Saya menghormati tujuannya aja, selama itu baik ya nggak papa.  
(Een, Undar)

Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh Mila, seorang santri Tebuireng yang kuliah di Fakultas Tarbiyah Ikaha.

Sekarang kan sudah zaman modern jadi **sah-sah saja** ketika perempuan aktif di politik, toh mereka juga banyak yang mempunyai kualitas yang tak kalah dengan laki-laki.  
(Mila, Ikaha)

Namun di sisi lain ada juga santri yang masih keberatan ketika perempuan masuk di dunia politik, meskipun perkembangan wacana politik dipandang sangat perlu diketahui oleh perempuan. Ketidaksetujuan keikutsertaan perempuan dalam politik ini dikatakan oleh mahasiswa administrasi negara Unipdu

Secara umum mungkin sudah menjadi **hal yang biasa** perempuan masuk ke dunia politik. Tapi bagi saya pribadi, saya **kurang sreg** kalau perempuan masuk ke dunia politik, politik itu kan dunia kotor. Meskipun begitu wanita harus tetap punya

pengetahuan tentang politik walaupun cuma sebatas wacana saja, karena itu penting.  
(Atik, Unipdu)

Adanya stereotip yang negatif terhadap partisipasi perempuan dalam politik atau menganggap rendahnya kemampuan perempuan dalam politik, termasuk aktifitas politik yang tercermin dalam pemberitaan media massa. Stereotip ini kadang-kadang dipercayai oleh perempuan. Selalu ada anggapan bahwa politik itu merupakan kegiatan kotor, padahal selama ini begitu banyak kebijakan yang dihasilkan oleh domain politik yang mempengaruhi kehidupan perempuan, termasuk dalam ranah yang privat. Seperti kebijakan KB, yang telah mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan.

Perjuangan untuk mencapai kesederajatan dalam hak politik harus tetap diteruskan, dimulai dengan menghapus kultur politik yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif terhadap perempuan. Kelompok pertama yang harus ditingkatkan perannya adalah kaum ibu dan para gadis dan remaja putri yang selama ini sudah bersentuhan dengan masalah politik melalui aktivitas anggota keluarga. Kepada mereka perlu dibangkitkan kesadaran untuk keluar dari kecenderungan eksploitasi dan mobilisasi atas dasar hegemoni anggota keluarga sendiri.

Selain itu, perlu dikembangkan pendidikan politik yang lebih luas dan berkelanjutan pada kalangan perempuan, untuk tidak hanya menyadari haknya, tetapi juga memiliki kemampuan memperjuangkannya melalui politik. Proses pendidikan mencakup pula kristalisasi isu khas gender sebagai ideologi politik, dan membangun komitmen yang luas di kalangan perempuan untuk mendukungnya. Ketika ideologi ini terkonsolidasi

dengan baik, perempuan akan tampil menjadi elemen yang sangat diperhitungkan. Hal ini juga didukung oleh Ka'e, seorang santri Tebuireng yang begitu gencar melakukan lobi-lobi pada pengasuh pondok agar diperbolehkan untuk aktif di organisasi di luar pondok dan juga Nisa', santri Tambak Beras.

Langkah pemberdayaan terhadap perempuan itu sangat perlu, bukan berarti perempuan itu selama ini tidak berdaya. Hanya memang nilai-nilai yang sudah menjamur di masyarakat bahwasannya perempuan memang tidak berdaya gitu kalau melihat dari fisiknya. Tapi dari kualitasnya bagaimana di dunia pendidikan, perempuan sangat sedikit sekali. Perempuan di daerah saya sendiri aja sangat minim yang bisa melanjutkan ke jenjang yang paling tinggi. Saya sangat prihatin dan sangat sepakat kalau ada orang yang mau siap, mau memperjuangkan, mau memberdayakan perempuan-perempuan yang ada apalagi sampai ke tingkat akar bawah ya, *grass rootnya* ya, nggak hanya memandang bagian atas gitu. Tapi kita mencoba memandang orang yang tidak pernah melihat dunia kota, yang ada di desa-desa itu bagaimana? Saya lebih sepakat itu. LSM itu sebaiknya tidak di kota, tapi terjun ke desa-desa hehe... LSM itu selama ini di kota, lebih banyaknya itu bergerak di kota dibanding di desa, kan sangat sedikit sekali. Kita bisa lihat bagaimana seorang aktivis perempuan yang bisa sampai masuk ke suku dayak itu kan sangat-sangat minim kan.

(Ka'e, Ikaha)

Ya sangat perlu sekali, toh ketika diadakan sensus, yang saya tahu itu masih 3:1. dan juga tidak mungkin bahwa perempuan itu lebih cerdas dari pada laki-laki dan karena mungkin selama ini budaya kita yang membuat perempuan itu termarginal, jadinya dalam pendidikan lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan. Sehingga kelihatannya perempuan itu bodoh, perempuan itu nggak bisa apa-apa. Tapi teman-teman yang sudah paham wacana gender selalu "ayo-ayo yang perempuan donk".

(Nisa', Staibu)

Kehidupan global tengah mendesakkan kepentingan kesetaraan gender ke seluruh penjuru dunia (termasuk Indonesia) merupakan pertanda yang tidak mungkin dibendung dan diingkari. Kita tidak mungkin



bertahan pada pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah *konco wingking*. Namun, tidak bisa juga melepaskan perempuan ke luar rumah tetapi tetap menuntut mereka dengan begitu banyak kewajiban domestik yang harus dilakukan, sementara kaum lelaki masih memandang hina pekerjaan itu.

Pada konteks tersebut, tahap pertama pencapaian kesetaraan gender adalah pemberian kesempatan kepada perempuan untuk terlibat dalam kehidupan publik dengan diiringi kemauan lelaki berbagi peran domestik. Sekali lagi persoalan kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin. Budaya patriarki yang telah berlangsung lama menuntut perempuan secepat mungkin menyesuaikan diri setelah sekian lama dipinggirkan dari proses sosial yang rumit, yang betapa pun sesungguhnya dapat dipelajari bila perempuan bersungguh-sungguh.

Dalam spektrum sosial-politik, era saat ini bisa disebut sebagai masa transisi. Robert W. Hefner (2000) lebih gemar menjulukinya dengan "masa uji coba demokrasi". Bertolak dari realitas ini, segala kekuatan politik dan potensi akan menjadi penentu dari keputusan sejarah kelak. Apakah akan mampu mengelolanya dengan baik, atau sebaliknya akan menjadi korban dari langkah politik yang pernah diretas sendiri.

Dari sini, penting ditelaah, sejauh mana peluang kaum perempuan bagi masa depan demokrasi, lebih-lebih di Indonesia. Ada pelbagai asumsi konklusif yang layak disodorkan dalam kaitan ini. *Pertama*, sebenarnya wacana keperempuanan dan model feminisme di Indonesia tumbuh dalam sebuah iklim sosial yang agamis. Tuntunan religi dan tuntutan adat

ketimuran adalah kendali kokoh yang menyebabkan feminisme disini cenderung lebih lunak untuk diarahkan.

*Kedua*, jika sudi jujur, di Indonesia nyaris tak terdapat hambatan (*stumbling block*) yang berarti, bagi pengembangan mobilitas kaum perempuan. Termasuk di bidang politik maupun sektor publik lainnya. Dibanding negara-negara di Timur Tengah, misalnya, di sini jauh lebih lapang dalam memberikan toleransi dan batasan sosial untuk beraktifitas dalam nyaris segala bidang kemasyarakatan.

*Ketiga*, di Indonesia tidak dikenal adanya segregasi ataupun pembatasan ruang (*space*) yang terlampau ketat bagi perempuan. Dengan kata lain, perempuan cukup dimanjakan dengan peran peran publik yang populer.

Berpangkal dari ketiga asumsi penting tersebut, maka kiranya bisa disimpulkan bahwa kaum perempuan di Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang publik yang cukup terbuka untuk sedapat mungkin aktif dan berkiprah leluasa di lapangan sosial-politik. Dalam pandangan Azyumardi Azra (2001), kenyataan ini jika dimanfaatkan dengan baik akan mendorong dan mendesain perempuan Indonesia untuk bersikap aktif, dinamis, serta relatif terjauhkan dari adanya *split identity* (identitas mendua) sebagaimana dialami banyak wanita di jazirah Arab.

Maka tidak ada alasan lagi bagi perempuan di negeri ini untuk terus menerus khawatir dalam meniti dunia politik. Dalam pandangan Fatima Mernissi, (seharusnya) tak ada lagi ketakutan terhadap demokrasi (*fear of democracy*), apapun bentuknya. Pada lingkup ini, wacana HAM, demokrasi, dan *gender sensitifity*, bisa saling rajut, berkelindan dan berjalan

beriringan menuju upaya penciptaan kondisi sosial yang dinamis dan penuh kedamaian.

Pada titik tersebut, alasan keberadaan (*raison d'etre*) suatu komunitas politik kian menjadi tegas dan jelas. Ia hadir sebagai warna dan nuansa lain dari cakrawala demokrasi. Demi menjamin terselenggaranya aturan sosial yang damai dan adil bagi segenap kelompok dan lapisan masyarakat tanpa kecuali.

## 6.2. Kendala Perempuan Masuk di Dunia Politik

Membangkitkan kesadaran politik kaum perempuan untuk menyadari betapa setiap perempuan mempunyai hak politik yang sama dengan kaum laki-laki bukan hal yang mudah. Suka atau tidak suka planet bumi yang dihuni manusia sekarang ini dunia yang terus mewariskan tradisi masyarakat patriarkat selama berabad-abad. Selama itu pula kekuasaan pribadi kaum perempuan telah dikerdilkan dan peran mereka selalu dipinggirkan. Namun demikian tidak tepat kalau hanya menyalahkan laki-laki atas semua kasus penindasan itu. Karena sesungguhnya laki-laki juga tertindas. Semua orang mengalami penindasan yang serupa (kendati tidak sama) oleh pola budaya patriarkat ini. Penindasan mental dan spiritual.

Pola budaya patriarkat dikatakan menindas semuanya karena pola budaya ini selalu menghidupkan mitos kalau laki-laki adalah perwujudan energi maskulin (maskulin, asertif dan terarah keluar) sedangkan perempuan wujud energi feminin (sensitif, pemelihara dan reseptif). Tentunya dengan dominasi energi maskulin.

Dominasi itu tidak mendapat imbalan yang cukup hingga laki-laki lah yang menentukan semua tatanan, baik nilai, etika, moral, sosial dan (mungkin juga) agama. Semua dibuat standar dengan dorongan alamiah kaum laki-laki. Akibatnya kaum perempuan semakin terpinggirkan dan hanya menjadi semacam "perkakas budaya" yang harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan paradigma budaya yang ada. Ketika perempuan akan masuk dalam dunia politik yang selama ini dianggap sebagai domain laki-laki, maka banyak sekali kendala yang dihadapi. Keluarga bahkan kodrat perempuan sendiri dianggap sebagai hal yang menghambat ketika dia berperan di ranah politik, seperti yang dikatakan oleh dua orang mahasiswa Undar, yang keduanya terdaftar sebagai mahasiswa jurusan akuntansi.

Kendalanya tetap ada Kita perempuan, ketika sudah mempunyai suami kendalanya itu **suami**, apakah suami mengizinkan atau tidak. Kalau suaminya mengizinkan nggak masalah, kendalanya ya satu itu. Posisi kita kan wanita, jadi harus manut pada suami.  
(Fia, Undar)

Kalau udah nikah kendalanya ya berada di **keluarga** itu sendiri. juga kendalanya ketika dia **hamil** dan waktu mereka **menstruasi**. Ketika hamil kan otomatis mereka dua bulan kan vokum kan aktivitasnya di dunia politik.  
(Indah, Undar)

Dengan menganggap kodrat perempuan itu menjadi penghalang ketika perempuan aktif di dunia publik, hal ini akan semakin mengukuhkan perempuan untuk terus berada dalam ranah domestik. Ketika perempuan hamil, melahirkan dan menyusui, maka aktivitas itu dianggap akan mengganggu aktivitasnya di luar dan tidak lagi produktif.

Untuk itu kemudian perempuan lebih ditekankan untuk bekerja di rumah dan laki-laki bekerja di dunia publik.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Budiman (1981) bahwa orang cenderung beranggapan pembedaan atau pembagian kerja secara seksual adalah sesuatu yang alamiah. Hal ini jelas tidak adil bagi kaum perempuan. Namun banyak perempuan tidak menganggap begitu, bahkan menerima peran yang diberikan kepada mereka sebagai sesuatu yang mulia dan harus dijunjung tinggi.

Bahkan Budiman (1981) mempertanyakan, mengapa perempuan sebagai kaum yang dirugikan tidak sadar akan keadaan mereka? Lihatlah keadaan perempuan: perempuan jadi tergantung kepada laki-laki secara ekonomis, karena pekerjaan yang dilakukan di rumah tangga tidak menghasilkan gaji (*unpaid*). Ditambah lagi, perempuan seakan-akan dipenjarakan di suatu dunia yang tidak merangsang perkembangan kepribadiannya. Mereka mengerjakan pekerjaan yang itu-itu juga setiap hari, diulang jutaan kali. Teman-temannya pun serba terbatas.

Pada akhirnya dia mengatakan bahwa persoalan pembagian kerja secara seksual merupakan persoalan yang sangat penting karena merupakan sebuah persoalan eksploitasi separuh dari umat manusia oleh separuh lainnya. Persoalan ini begitu sempurna tersembunyi, sehingga baru pada akhir-akhir ini sajalah persoalan ini mendapat perhatian semestinya. Bahwa sebenarnya ada banyak pilihan bagi perempuan untuk mengaktualisasikan dirinya.

Pembagian kerja secara seksual yang begitu terkonstruksi dalam pikiran perempuan, sehingga keberhasilan perempuan itu tidak hanya

ditentukan oleh perannya di dunia publik, tapi juga ruang domestik. Hal terpenting yang harus tetap diperhatikan ketika perempuan masuk ke dunia politik adalah menyeimbangkan perannya sebagai figur domestik (sebagai istri dan ibu) dan figur publik, ini dikatakan oleh mahasiswa psikologi Undar.

Kendala kan macem-macem, tiap orang beda-beda. Bagi saya budaya, agama tidaklah menjadi kendala. Bahwa perempuan nggak boleh masuk dunia politik itu nggak ada tuh seperti itu. Jadi yang menjadi kendala gimana dia bisa **menyeimbangkan antara menjadi istri atau ibu dengan dia sebagai figur publik**. Kalau masih single mungkin nggak ada masalah, tapi kalau udah *marriage* dia harus bisa berperan secara seimbang..  
(Een, Undar)

Dalam dunia yang didominasi oleh budaya patriarki, perempuan dikonstruksi sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan selama ini sering kali menjadi warga kelas dua. Stereotip semacam ini membuat laki-laki terkandang memandang rendah kemampuan perempuan. Ini menjadi kendala tersendiri ketika perempuan ikut ke dunia publik. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan yang merasakan bagaimana beratnya menjadi seorang pemimpin yang mayoritas laki-laki.

Kendalanya kalau memang dari segi **politik** sendiri ya, itu persaingannya tadi, baik sesama perempuan sendiri maupun dengan laki-laki. Mereka dari laki laki memandang rendah, artinya meremehkan perempuan, kalau kita bisa mempertanggungjawabkan itu dengan menunjukkan bahwa perempuan itu bisa, di situlah sebagai nilai pertimbangan mereka. Kalau dari segi **agama** ya, secara syara'nya, kendalanya dikhawatirkan pandangan-pandangan yang tidak sesuai itu. Kalau dari **masyarakat** sendiri, ya kendala dinilai masyarakat bahwasannya bisa terlantarkan keluarganya gitu. Karena orang-orang kayak gitu keluarganya kan sering ditinggal, pergi ke sana, pergi ke situ.  
(Ka'e, Ikaha)

Untuk bisa masuk dalam komunitas politik yang telah berabad-abad didominasi laki-laki, perempuan tidak hanya harus bisa menyeimbangkan perannya di dunia domestik dan publik, tapi juga harus bisa membuktikan kemampuannya, tentunya itu sesuai dengan standart maskulinitas. Pengakuan ini diungkapkan oleh Nisa' yang aktif di komisariat PMII Staibu.

Banyak sekali sih, ketika **budaya** itu harus menuntut dia harus menyelesaikan dulu masalah rumah tangganya. Itu dia kan beban berat banget. Kemudian juga yang kita lihat kayaknya masih jarang sekali dari kalangan laki-laki itu yang mau mengakui kemampuan perempuan. Mereka masih belum siap ketika mereka dipimpin perempuan, karena mereka selama ini merasa dirinya adalah yang diprioritaskan, *super power*, jadi manusia yang pertama, nggak mau dipinggirkan, padahal kemampuannya sih kadang kala memang masih lebih baik yang perempuannya. Jadi mereka itu masih menganggap bahwa perempuan itu sebenarnya lemah. Kalau **agama**, aslinya memberi keluasan kepada perempuan untuk beraktualisasi, cuma kemudian ayat-ayat dari Alqur'an itu ada yang menginterpretasikan begitu sakleknya, sehingga akhirnya menimbulkan dogma-dogma yang memojokkan perempuan. Sehingga banyak tokoh-tokoh yang banyak tidak menginginkan tampilnya perempuan di dunia publik, menyorot, mencembak mereka dengan dalih-dalih agama dengan interpretasi mereka sendiri. Padahal kan tidak seperti itu, kalau Islam seperti itu, berarti Islam kan bukan agama yang humanis.

(Nisa', Staibu)

Gambaran stereotip dari perempuan adalah sebagai seseorang yang lemah, emosional, sensitif, tergantung, pasif, submisif, luwes, memerlukan perlindungan dan sebagainya. Sedang gambaran stereotip dari laki-laki adalah fisik kuat, agresif, lebih rasional, ingin memimpin, melindungi, aktif kompetitif, kaku, keras dan sebagainya.

Melalui konsep stereotip ini dapat dianalisa mengapa kuantitas perempuan dalam dunia politik yang digambarkan sebagai dunia yang keras, sikut kanan sikut kiri, menggunakan segala cara untuk mencapai

tujuan, dianggap sebagai dunia laki-laki. Perempuan dengan stereotip yang terlanjur dilabelkannya seolah tidak punya potensi yang cukup kuat untuk terjun ke dalamnya.

Berdasarkan stereotip tersebut perempuan dianggap terlalu emosional, sensitif untuk memutuskan persoalan-persoalan masyarakat. Sehingga untuk masuk dalam partai politik tidak mudah bagi perempuan, ia harus bekerja keras dua kali lipat dari laki-laki, sampai ia bisa memenuhi berbagai kriteria yang dijadikan standar laki-laki. Pada akhirnya sedikit sekali perempuan yang bisa memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan menjadikan perempuan sebagai kaum minoritas dalam wilayah ini.

Kendala itu tidak hanya berhenti di situ saja, ketika perempuan itu kemampuannya tidak diragukan lagi ternyata sistem yang ada juga masih memarginalkan perempuan. Ketika menjadi caleg perempuan seringkali ditempatkan pada nomor sepatu (nomor tidak jadi), padahal sebenarnya perolehan suara yang didapat dari pada kandidat lainnya. Kenyataan ini diungkapkan oleh Ana, Ketua Komisariat PMII yang juga ikut sebagai pemantau pemilu, baik dalam pemilu legislatif maupun pilpres.

Ketika kita melihat waktu **sistem pemilu** kemarin banyak sekali rekayasa-rekayasa ternyata tidak diutamakan dari hasil suara perempuan itu, banyak sekali dia yang mendapat suara banyak sekali, lebih dari 50% itu di daerah Mojokerto dan dia di nomor urut 3, padahal jumlah yang diperoleh lebih dari nomor urut 1 dan 2. tapi dia akhirnya nggak jadi hanya karena pada nomor urut 3. Ketika perempuan di kasih kuota 30% memang ada aja sih permasalahannya, mungkin oh ternyata **perempuan belum mampu**, atau kadang perempuan itu punya kemampuan tapi ada saja hal yang menggagalkan mereka untuk naik ke atas. Dominasi laki-laki memang masih begitu kuat.  
(Ana, Staibu)



Sistem patriarki yang telah disosialisasikan sejak perempuan lahir hingga dewasa, perlahan tapi pasti membentuk konsep diri pada perempuan itu sendiri. Mereka menjadi tidak siap memimpin, tergantung dan menjadi manusia nomor dua dalam masyarakat. Perempuan menjadi prioritas kedua dalam berbagai hal termasuk bidang politik.

Hal di atas berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dua mahasiswa berikut ini. Mereka menganggap sudah tidak ada lagi kendala bagi perempuan untuk masuk ke politik. Tinggal bagaimana kaum perempuan sendiri membuktikan kemampuannya untuk bisa bersaing di dunia politik.

Kalau sekarang kayaknya **nggak ada**, ya semua mendukung perempuan. Tinggal nanti kita yang milih. Medan perang mereka sendiri yang membuktikan, mereka bisa terjun **nggak** di situ.  
(Nia, Undar)

**Nggak ada**, walaupun ada kendala itu datangnya dari perempuan itu sendiri. Dia bisa menunjukkan kan **nggak** eksistensinya ketika masuk ke dunia politik, ya memang selama ini kan laki-laki lebih banyak di situ dibandingkan perempuan.  
(Atik, Unipdu)

Jika perempuan dituntut untuk menunjukkan kemampuannya itu sebenarnya sah-sah saja. Tapi pada kenyataannya kapasitas yang dimiliki perempuan tersebut diukur dengan standart laki-laki yang masih begitu kuat memegang sistem patriarki. Di mana sistem tersebut merupakan suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut terutama menempatkan status dan peranan perempuan dibawah perwalian laki-laki. Konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya kesempatan dan akses perempuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas

publik (*public sphere*), lebih-lebih dalam wilayah politik, perempuan hanya berada dipinggiran (*periphery zone*). Bagi perempuan untuk menjadi bagian dari kelompok elit politik sangat terjal, penuh rintangan kultural.

Sebenarnya Indonesia telah meratifikasi hak-hak politik perempuan (UU No 68 tahun 1958) dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui UU No 7 tahun 1984, pada akhirnya belum cukup membantu dalam menghadapi permasalahan untuk menghapuskan apatisme dan membangun posisi tawar perempuan yang selama puluhan tahun direntankan terhadap intimidasi politik. Perempuan hanyalah sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang refresif.

Selain itu, kebijakan pemerintah orde baru yang telah berkuasa juga menempatkan perempuan hanya sebagai istri dan ibu, konsep peran ganda, pengukuhan konsep panca tugas wanita yang dioperasionalkan melalui organisasi-organisasi bentukan pemerintah seperti dharma wanita atau PKK, sistem politik yang birokratis, sentralistik dan militeristik, selama 32 tahun tersebut merupakan beberapa sebab yang menghambat partisipasi politik perempuan (kompas, 12 Desember 2000).

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa minimnya jumlah perempuan di parlemen merupakan hasil dari perjalanan sejarah perempuan itu sendiri yang telah di pinggirkan dari wilayah ini sejak awal perkembangan perempuan. Posisinya yang selalu dibuat tergantung pada laki-laki sebagai hasil dari budaya patriarki menjadi kurang dapat diperhitungkan, dianggap tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan besar yang dianggap sebagai wilayah laki-laki, apalagi dalam masalah politik yang

penuh intrik, seolah hanya laki-laki yang bisa memasuki wilayah ini. Kebijakan-kebijakan pemerintah juga menguatkan posisi tawar perempuan khususnya pemerintahan orde baru, yang melalui kebijakan serta programnya telah membentuk perempuan terus berada dibawah kendali laki-laki dengan gaya patriarkinya. Ini membuat seolah melegitimasi pengekanan perempuan dalam wilayah domestik dan sekalnya diberi kesempatan untuk masuk dalam wilayah politik hanya dijadikan alat untuk kepentingan politik sekelompok orang atau golongan tertentu.

Hal tersebut merupakan hasil dari sebuah konstruksi sosial budaya yang sangat tidak adil dalam menempatkan Perempuan. Perempuan hanya menempati ruang privat, keluarga, rumah tangga di bawah kontrol dan dominasi laki-laki, sementara ruang publik hanya menjadi milik laki-laki. Di samping itu tindak ketidakadilan terhadap perempuan juga terjadi oleh adanya tafsir agama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak dititahkan untuk menjadi pemimpin hanya laki laki yang pantas menjadi pemimpin. Laki-laki sebagai figur sentral dalam keluarga, sementara perempuan sebagai subordinasi yang selalu dalam kontrol laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Sehingga aktifitas perempuan di luar rumah atau kegiatan publik menjadi sangat tertutup. Ini merupakan kontruksi tafsir agama yang diskriminatif dan sudah begitu lama terinternalisasi dalam kehidupan. Sekarang yang dibutuhkan adalah melakukan dekonstruksi atas sejarah sosial budaya, tradisi dan agama yang diskriminatif terhadap perempuan tersebut.



**BAB VII**  
**KESIMPULAN DAN REFLEKSI TEORITIK**

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN REFLEKSI TEORITIK

#### 7.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada santri perempuan di Jombang dengan berbagai lokasi sosial dapat disimpulkan:

**Pertama,** wacana santri perempuan tentang politik sangat bervariasi. Mereka yang berwacana negatif, menganggap politik sebagai dunia yang menakutkan, kotor dan penuh kekerasan. Para santri masih berpandangan bahwa politik masih diwarnai oleh kualitas maskulin dan bukan domain perempuan. Realitas politik disarati dengan *horrocracy*-wajah yang penuh dengan kepalsuan, *chaos* dan horror.

Bagi yang berwacana politik pada tataran negara (*state*) dan kekuasaan (*power*), maka inti dari politik adalah lebih pada lembaga-lembaga kenegaraan. Mereka memandang politik secara proporsional, tidak hanya dari sudut yang negatif, tapi lebih *positive thinking*. Bahwa aktor juga berperan dalam menentukan baik dan buruknya suatu sistem politik. Sehingga kekuasaan dianggap sebagai hasil politik yang dicapai sesuai ketentuan dan penguasaan atas kemampuan (*ability*), kecakapan (*capacity*), kesanggupan (*faculty*) dan kepandaiann (*skill*).

Berbagai wacana politik yang muncul dalam penelitian ini tidak lepas dari tampilan realitas politik, serta konstruksi sosial dan budaya patriarki yang telah lama hidup dalam masyarakat. Dominasi budaya patriarki, membuat perempuan disingkirkan dari kehidupan publik (politik). Di samping itu hegemoni negara dan agama (melalui penafsiran

teks agama yang misoginis) telah mengkonstruksi dan mengukuhkan ketimpangan gender dalam masyarakat dengan melegitimasi nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk memarginalkan perempuan dalam ranah politik.

Kriteria manusia normal dipandang dari kaca mata laki-laki. Cara berpikir biner patriarkis, yang memposisikan si kuat menentukan kehidupan si lemah berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Pemahaman politik yang didasari pada biner patriarkis, akhirnya menciptakan suatu wacana politik yang lebih bersifat negatif dari pada wacana politik yang bersifat positif.

Perbedaan wacana tersebut juga dipengaruhi oleh pengetahuan dan latar belakang sosial. Kualitas wawasan atau pengetahuan merupakan hasil persentuhan para santri dengan dunia luar yang penuh dialektika. Tingginya mobilitas dan intensitas interaksi di luar pesantren, maka pemahaman akan politik dan relasi gender lebih egaliter. Politik lebih dilihat dari sisi positif dan bisa memberi peluang pada perempuan untuk berpartisipasi.

Latar belakang sosial, lebih ditentukan oleh *basic* pendidikan orang tua dan pola pendidikan dalam keluarga. Orang tua yang punya dasar pendidikan pesantren, terutama aliran salaf maka akan lebih ketat dalam menginternalisasi nilai-nilai agama dengan dilandasi oleh budaya patriarki. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi wacana santri tentang politik lebih ke arah negatif. Tapi bapak-ibu yang tidak punya *basic* pesantren atau dalam keluarga yang penuh dengan nilai demokratis maka memiliki wacana

seimbang, dalam artian melihat sisi positif dan negatif, bahkan cenderung ke muatan positif.

**Kedua**, respon santri perempuan terhadap isu-isu politik tidak hanya ditentukan oleh wacana politiknya. Tapi juga dipengaruhi oleh pergumulannya dengan organisasi di luar pesantren dan *back ground* keluarga di mana sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai agama dan budaya pertama kali mereka terima. Selain itu juga basic pesantren saat mereka pertama kali belajar ilmu agama juga berimplikasi pada respon terhadap isu politik yang muncul.

Santri yang menjadi informan dalam penelitian ini, sepakat dengan kuota 30 persen perempuan di legislatif. Hal tersebut dilihat sebagai peluang bagi perempuan untuk masuk dalam ranah politik yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki. Di samping itu juga dilihat sebagai tempat untuk unjuk kemampuan perempuan di dunia publik, bahwa mereka tidak kalah dengan kaum adam. Yang lebih penting, melalui kuota di legislatif perempuan bisa lebih memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya yang selama ini dirasa belum dicapai secara maksimal.

Mengenai pemilu dan golput, para santri merespon secara positif. Mereka menganggap pemilu itu sebagai hal yang penting dalam sebuah proses demokrasi dan untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin bangsa. Meski ada yang masih meragukan nilai sebuah pemilu yang dianggap hanya sebagai sebuah permainan politik yang dilakukan oleh para elit. Sehingga ini berimplikasi ketika mereka merespon golput itu dianggap suatu bentuk kekecewaan atau rasa tidak puas terhadap pemerintahan selama ini. Bahkan golput dilihat sebagai suatu hak asasi tiap individu.

Namun dalam hal kepemimpinan perempuan sebagian besar masih belum menerima sepenuhnya pemimpin perempuan. Wacana positif tentang politik ternyata tidak berimplikasi secara signifikan terhadap isu ini. Walaupun mereka menerima seorang perempuan menjadi *leader*, itu dilakukan dengan syarat tidak ada lagi laki-laki yang mampu menjadi pemimpin. Selagi masih ada laki-laki maka perempuan tidak diperkenankan berada pada posisi puncak. Ini dapat dimengerti, mengingat tafsir atas teks agama yang bias gender masih mendominasi wacana dominan di pesantren tempat mereka mengkaji ilmu. Walaupun ada juga beberapa pesantren yang pengasuhnya sudah mulai melakukan dekonstruksi atas teks agama.

Respon terhadap isu kepemimpinan perempuan ini berpengaruh pada opini atas fatwa ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Sikap setuju atas fatwa tersebut didasarkan atas alasan agama (sesuai dengan ajaran agama). Tapi, mereka yang mendukung kepemimpinan perempuan, menganggap fatwa tersebut mengandung kepentingan tertentu yang bernuansa politik. Begitu juga dengan tanggapan terhadap isu dekonstruksi agama yang bias gender serta isu keberadaan dan pemikiran JIL (Jaringan Islam Liberal), sedikit banyak dipengaruhi oleh sikap kontroversi terhadap isu kepemimpinan perempuan. Jadi, cenderung ada suatu konsistensi dalam merespon empat isu politik ini.

Berkaitan dengan isu elit pesantren yang “bermain” politik, para santri lebih banyak tidak setuju. Sikap ini, didasarkan pada nilai bahwa ulama adalah panutan yang harus tetap di jalur agama (*the right man in the right place*), jika masuk di dunia politik maka keistiqomahannya sebagai



ulama dipertanyakan. Selain itu, juga didasarkan pada realitas yang mereka lihat atau bahkan pengalaman pribadi. Di mana para kiai/nyai yang terjun ke dunia politik cenderung memomorduakan urusan pesantren, sehingga santri menjadi tidak terurus. Bahkan yang lebih celaka, pesantren hanya dijadikan kendaraan politik untuk mendapatkan *power*.

Namun demikian, keikutsertaan elit pesantren di dunia politik praktis juga bermanfaat bagi para santri. Mereka mendapatkan pendidikan politik, sehingga tidak lagi *gagap* politik. Dan bagi santri yang ingin menapaki karir di dunia politik, itu bisa tauladan dan *support*.

**Ketiga**, Masuknya perempuan di dunia politik menurut para santri di Jombang ini sebagai suatu pilihan dan hak perempuan untuk mendapat kesempatan dalam ranah politik. Tapi mereka harus tetap mengetahui rambu-rambunya sebagai seorang perempuan. Di mana seorang perempuan tetap mempunyai kodrat yang itu tidak bisa menuntut keberadaannya sama persis dengan laki-laki dan dituntut lebih mengutamakan keluarga. Persyaratan tersebut dikemukakan oleh para santri ini dalam menanggapi keberadaan perempuan di dunia politik.

Maka tidak heran, jika menurut para aktivis ini, kendala yang dihadapi perempuan ketika di dunia politik adalah keluarga dan bagaimana menyeimbangkan peran domestik dan publik. Ada juga yang menganggap agama, budaya, politik, hukum, bahkan perempuan sendiri menjadi hambatan kaum hawa ini masuk dunia politik.

Sebagaimana wacana dan respon santri tentang politik yang masih dipengaruhi budaya patriarki. Dalam melihat keberadaan dan kendala perempuan yang masuk di dunia politik juga masih dipengaruhi oleh

hegemoni patriarki. Meski sudah melakukan interaksi dengan dunia luar untuk mencari wacana baru dalam upaya melakukan *counter* hegemoni. Namun lompatan-lompatan pemikiran belum sepenuhnya bisa melihat masuknya perempuan ke dunia politik dalam kaca mata yang lebih sadar gender.

## 7.2. Refleksi Teoritik

Berbagai analisis yang berperspektif gender, dikotomi pembagian tugas dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan dianggap tidak terjadi secara niscaya. Menurut Foucault, sebelum terjadi dan terimplementasi dalam konstruksi sosial yang baku, dikotomi tersebut terlebih dahulu dilatarbelakangi oleh sebuah pra kondisi yang berasal dari institusi terkecil yakni: keluarga. Lebih jauh, Foucault menyatakan bahwa di mana ada kekuasaan, di situ ada perlawanan (resistensi) dan keberadaan dari kekuasaan bergantung pada penggandaan dari butir-butir resistensi. Butir-butir resistensi ini ada dimana-mana dalam jaring kekuasaan. (Foucault, 1990:93-95).

Akhirnya, dibanding dengan pemikiran Marx dan Gramsci yang memandang bahwa suatu kekuasaan hanya dipegang oleh satu penguasa atau golongan, di mana golongan-golongan lainnya yang tidak berkuasa tidak memiliki akses untuk masuk ke dalam kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, pemikiran ini memandang bahwa satu golongan dianggap memiliki kekuasaan, sedangkan golongan-golongan yang lain semua disubordinasikan oleh golongan penguasa (Farganis, 1993). Maka pemikiran Foucault dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa setiap

individu –termasuk individu perempuan– memiliki kekuasaan dan kebebasan yang otonom.

Berbeda dengan Marx yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang terpusat melalui konsep ideologinya, Michel Foucault mendefinisikan habitat kekuasaan sebagai tak terbatas: "Kekuasaan ada di mana-mana, suatu jaringan subtil dari wacana, pengetahuan, kenikmatan, dan kekuasaan" (M Foucault, 1976). Pengetahuan sendiri menurut Foucault (1981) ditentukan oleh kekuasaan. Kebenaran akan merujuk pada sebuah rezim kebenaran yang sedang bertahta. Kebenaran merupakan hasil dinamika dari fungsi kekuasaan.

Kekuasaan dan diskursus secara langsung berkaitan sebagai dua sisi dari proses yang sama. Hubungan kekuasaan hanya hadir dengan keberadaan korlatif sebuah wilayah pengetahuan. Tidak ada diskursus yang tidak secara stimulan mensyaratkan atau mendasari hubungan-hubungan kekuasaan.

Pandangan Foucault, terutama dalam hal bagaimana diskursus dan pengetahuan mampu menjadi alat berkuasa, karena kekuasaan dan pengetahuan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Melalui proses "pendisiplinan" dan "normalisasi", proses penggunaan pengetahuan, kekuasaan telah diterapkan dalam berbagai aspek (misalnya kegilaan, sakit, kejahatan dan seksualitas). Maka dari itu bentuk perjuangan tidak hanya melawan eksploitasi (ekonomi) dan dominasi (sosial, etnis, seksual, agama) saja, namun juga melawan subjection (yakni bentuk penyerahan seseorang sebagai individu seperti hubungan psikiater dan pasiennya). Baginya apabila mengabaikan ketiga hal tersebut pasti akan gagal.

Foucault tidak menunjukkan ambisi melakukan pembebasan masyarakat dari pengaruh diskursus. Ia melihat munculnya diskursus hasil hubungan kuasa sebagai sesuatu yang pasti terjadi dalam masyarakat. Yang harus dilakukan adalah menerima adanya berbagai diskursus dan menyadari pengaruh masing-masing terhadap kesadaran manusia. Ia juga mengingatkan bahwa setiap diskursus mengasumsikan kebenaran masing-masing yang tidak dapat diklaim sebagai yang paling benar.

Munculnya berbagai wacana dalam penelitian ini sebagai tanda heterogenitas pemikiran santri perempuan yang merupakan reaksi terhadap apa yang terjadi padanya. Yaitu reaksi terhadap kekuasaan atau hegemoni teks agama dan budaya patriarki yang telah dikonstruksi oleh sang penguasa (Kiai/Nyai, orang tua, guru dll). Hubungan kekuasaan dan ketertindasan akan melahirkan berbagai pemikiran yang sejauh ini merupakan proses dinamika perkembangan peradaban manusia. Foucault menempatkan pengetahuan sebagai sebuah hasil dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Atau dengan kata lain, bagi Foucault asal-usul pengetahuan dan wacana-wacana lainnya adalah adanya hubungan kekuasaan.

Respon mereka terhadap isu politik, juga hasil interaksi antara pengetahuan dan kekuasaan yang mengelilingi kehidupan mereka. Melalui respon yang terlontar menunjukkan arah pemikiran dan gerakan yang mereka lakukan untuk melakukan reaksi terhadap kekuasaan yang selama ini membelenggunya. Dengan sebagai aktivis organisasi dan persentuhan

mereka dengan dunia di luar pesantren, telah memberi energi untuk melakukan suatu penyadaran terhadap relasi gender yang lebih egaliter.

Sebagaimana menurut Gazala Anwar, bahwa gerakan feminis muslim dalam berbagai persoalan perempuan dapat digolongkan menjadi lima yaitu: *Pertama*, apologis yang lebih menekankan pada perbedaan antara bunyi teks dan praktik budaya. Untuk itu, bagaimana perempuan dapat menyadari akan hak-haknya, terutama penyadaran itu dilakukan di kalangan masyarakat akar rumput. Tanpa melakukan reinterpretasi teks agama sehingga tidak mengancam posisi kelompok konservatif.

*Kedua*, Reformis yang menekankan persoalan utama adalah perbedaan teks dengan interpretasinya. Menurut reformis, firman Allah telah disalahpahami, karena itu melalui pendekatan filosofis dan kontekstual dilakukan untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Para reformis mengambil sikap aktif dalam keterlibatannya merekonstruksi penafsiran dan menggugat penafsiran tradisional.

*Ketiga*, Transformasionis. Para feminis muslim berusaha melakukan pendekatan hermeneutika terhadap ayat-ayat suci dengan memetakan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dengan melakukan *penta' wilan* dan deskripsi yang dapat mengantarkan pada kesimpulan yang tidak berlawanan dengan keseluruhan maksud teks dari ayat mutasyabihat.

*Keempat*, Rasionalis. Pendekatan yang digunakan dalam golongan ini adalah "keadilan" sebagaimana konsep gender Riffat Hassan. Menurutnya, Allah Maha Adil, Pengasih, dan Penyayang, maka firmanNya pun harus dipahami selaras dengan sifat sifatNya. Karena itu, parameter (standar penilaian) nya adalah keadilan. Ini harus dipegang oleh mufassir.

*Kelima*, Rejeksionis. Pendekatan feminis muslim berani melakukan terobosan dalam menyikapi ayat-ayat al qur'an. Corak pemikirannya adalah kepentingan perempuan semata tanpa dibangun terlebih dahulu relasi gender yang berkeadilan sehingga apa pun ayat atau hadist yang telah tersosialisasikan jika mendiskriminasikan perempuan (misoginis) ditolak dan ditinggalkan.

Dari kelima gerakan di atas, maka gerakan yang dilakukan para santri di Jombang ini masuk dalam kategori apologis, reformis dan transformasionis. Bagi apologis, Mereka melakukan penyadaran diantara temannya di organisasi maupun di kampus tentang pentingnya eksistensi dan peran perempuan di dunia publik. Hal ini dilakukan tanpa melakukan dekonstruksi terhadap teks agama, sebab mereka merasa masih belum mempunyai kemampuan dalam bidang tersebut. Menurutnya yang bisa melakukan interpretasi terhadap teks agama secara intertekstual adalah para ulama yang sudah *mumpuni* dalam kitab kuning dan *nahwu-shorof* (tata bahasa Arab).

Untuk gerakan reformis dan transformasionis, cenderung dilakukan secara bersamaan. Di mana ketika melakukan dekonstruksi mereka juga melakukan pemilahan terhadap ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat dapat diikuti sebagaimana adanya. Sedang pada ayat mutasyabihat, mereka melakukan dekontruksi yang dapat mengantarkan pada kesimpulan yang tidak berlawanan dengan keseluruhan maksud teks itu sendiri. Hal yang sama dilakukan oleh Syahid (Sudan) dan Mahmud Muhammad Thoha dengan memetakan ayat-ayat *makiyah* dan *madaniyah*.

Karakter antara keduanya berbeda sehingga dalam konteks apa ayat itu turun lalu di mana posisi perempuan sebenarnya.

Gerakan reformis dan transformasionis ini dilakukan para santri dengan seorang pengasuh pesantrennya. Kelompok ini baru dijumpai di Tambakberas, di mana seorang Bu Nyai yang juga alumni IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta melakukan dekonstruksi Al-Qur'an - Hadist dan kitab kuning. Pemikirannya ini ditularkan pada semua santri dan siswanya, baik di tingkat Madrasah Aliyah maupun Perguruan Tinggi.

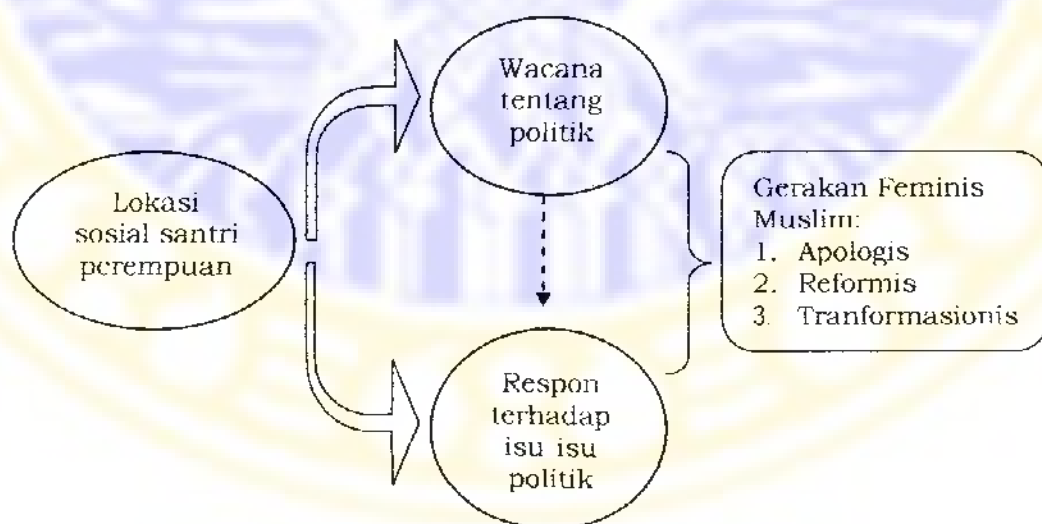
Memahami teks agama secara kontemporer, disadari betul sebagai tuntutan zaman. Mengingat teks agama diberikan sebagai materi pelajaran, tidak hanya di pesantren tapi juga pada unit pendidikan formal yang berada di naungan yayasan pesantren. Di mana institusi pendidikan formal sangat diwarnai oleh tuntutan nilai globalisasi. Yang pada akhirnya menuntut para santri untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kebutuhan zaman.

Usah kaum reformis dan transformasionis ini tidak berjalan mulus tanpa kendala. Masih ada komunitas pesantren yang menyambut dengan sebelah mata, bukan dengan pemikiran yang terbuka. Karena dianggap tidak sesuai dengan paradigma pemikiran yang selama ini berkembang. Namun wacana ini terus saja digulirkan di tengah kultur pesantren yang masih diwarnai nilai-nilai kesalafan. Agar ketika para santri menghadapi kehidupan real dan menemui kejanggalan antara realita dengan teori, mereka bisa menggunakan wacana tersebut untuk menjawab tantangan zaman.

Walaupun santri perempuan masih berada di tiga gerakan feminis tersebut, tapi mereka juga menerima gerakan rasionalitas seperti yang dikembangkan oleh Ulil dan kawan-kawan di Utan Kayu dengan gerakan JIL-nya (Jaringan Islam Liberal). Terhadap pemikiran liberal ini, mereka hanya sekedar pada tataran sikap menerima dan menghormati keberadaan dan pemikiran yang lebih mengedepankan rasionalitas dalam memahami teks agama.

Dari penelitian ini maka bisa dilihat bagaimana lokasi sosial santri perempuan (latar-belakang keluarga atau orang tua, Jenis organisasi yang diikuti, posisi di organisasi, basic awal pesantren, *background* pesantren di mana santri sekarang berada, tempat kuliah, asal suku/keturunan) mempengaruhi wacana santri perempuan tentang politik dan respon santri perempuan terhadap isu-isu politik. Pada akhirnya itu semua memperlihatkan bagaimana pola gerakan feminis muslim yang ada di Jombang. Hal ini bisa dilihat pada bagan Alur hasil penelitian berikut ini:

**Bagan Alur Hasil Penelitian  
Wacana Santri Perempuan tentang Politik**







# DAFTAR PUSTAKA